

## MANAJEMEN LABA DAN PENERAPAN UU No.36/2008 TENTANG PERUBAHAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

Eko Arief Sudaryono

*ekoarifs14@yahoo.com*

Doddy Setiawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

### ABSTRACT

*This research aims at examining earnings management around Law Nu.36/2008 regarding tax tariff. Indonesian government change tax tariff from progressive tariff to single tariff. Indonesian government also provide incentives for listed companies. There is 5% reduction in tax tariff for listed companies. Sample of this research consists of non-financial firms in Indonesian Stock Exchange during 2006–2010 observations. The result of this research shows that there is no significant different between earnings management before and after the application single tariff for tax. This result is consistent using compare means test and regression analysis. Further analysis shows that ROA and leverage have positive effect on earnings management. Thus, leveraged firms are engaged in earnings management actively. This result also finds similar effect of ROA on earnings management. Firms with high earnings are more aggressive to manage earnings. On the other hand, this research does not find significant effect of firm size on earnings management.*

*Key words: earnings management, tax, leverage, ROA*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji manajemen laba di sekitar penerapan UU No.36/2008 tentang perubahan tarif pajak. Berdasarkan UU No.36/2008, tarif pajak berubah dari tarif progresif menjadi tarif tunggal. Pemerintah juga memberikan insentif bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berupa pengurangan tarif pajak sebesar 5% dari tarif yang berlaku. Sampel penelitian ini terdiri dari perusahaan non-keuangan selama periode pengamatan 2006–2010. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara manajemen laba sebelum dan setelah penerapan UU No.36/2008. Hasil ini konsisten dengan pengujian menggunakan uji beda rata-rata dan regresi. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan ROA dan *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi cenderung akan melakukan manajemen laba di sekitar pergantian UU Perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* dan laba yang tinggi cenderung lebih agresif untuk melakukan manajemen laba. Akan tetapi, penelitian ini tidak menemukan pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba di sekitar penerapan UU No.36/2008.

Kata kunci: manajemen laba, pajak, *leverage*, ROA

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting. Kontribusi pajak terhadap APBN pada periode 2006 – 2011 adalah sebesar 70% (Firmanzah, 2012). Hal ini menunjukkan pajak merupakan penyumbang utama dalam pendapatan negara. Analisis lebih lanjut menunjukkan

penyumbang terbesar berasal dari kategori pajak penghasilan (PPH) yaitu sebesar 52% dari total penerimaan pajak. Pajak penghasilan merupakan penyumbang utama bagi penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Dalam kaitannya dengan penghitungan pajak penghasilan, pemerintah mengeluarkan-

kan UU baru yang mengatur penghitungan pajak penghasilan. UU No.36/2008 mengatur perubahan perhitungan pajak penghasilan menjadi menggunakan satu tarif saja. UU No.36/2008 menyatakan pajak penghasilan badan pada tahun 2009 akan dikenakan tarif tunggal sebesar 28%. Tarif ini akan kembali menurun pada tahun 2010 menjadi 25%. Tentu saja hal ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengalihkan labanya dari tahun 2008 ke tahun 2009 dan 2010 karena perusahaan dapat menghemat pajak yang dibayarkan. Untuk perusahaan yang terdaftar di BEI, masih memperoleh insentif tambahan, yaitu tarif pajak yang dikenakan adalah 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku, sehingga tarif yang berlaku untuk perusahaan yang terdaftar di BEI adalah 23% dan 20% untuk tahun 2009 dan 2010.

Perubahan peraturan penghitungan pajak penghasilan bagi perusahaan ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan dapat menunda pendapatan atau mempercepat biaya, sehingga laba pada tahun 2008 akan lebih kecil dibandingkan laba sesungguhnya. Dampaknya pada tahun 2009 atau 2010 adalah laba perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan laba sesungguhnya. Strategi ini mengakibatkan perusahaan dapat menghemat pengeluaran dari pembayaran pajak penghasilan, sehingga perusahaan mempunyai motivasi untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan meminimalkan pajak. Ronen dan Yaari (2008) mengungkapkan salah satu motivasi penting perusahaan untuk melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak (Blaylock, Gaertner, dan Shevlin, 2012). Motivasi pajak tersebut dapat berupa pemanfaatan perubahan pajak yang mengakibatkan tarif pajak menjadi lebih rendah, sehingga/perusahaan berusaha untuk mengalihkan labanya (Guenther, 1994; Monem, 2003; Roubi dan Richardson, 1998; Yamashita dan Otagawa, 2007; Yin dan Cheng, 2004), perusahaan berusaha memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak (tax holiday)

yang diberikan oleh pemerintah (K. Z. Lin, 2006), perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala, 2006; Huseynov dan Klamm, 2012; Taylor dan Richardson, 2012).

Penelitian mengenai manajemen laba di sekitar pergantian UU Perpajakan tahun 2008 di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Subagyo dan Octavia (2010) Suwardi (2013), Wijaya dan Martani (2011). Wijaya dan Martani (2011) menunjukkan perusahaan melakukan manajemen laba sebagai respon terhadap penurunan tarif pajak. Akan tetapi Suwardi (2013) tidak menemukan perbedaan manajemen laba yang signifikan antara periode sebelum dan setelah penerapan UU No.36/2008. Perusahaan di Indonesia tidak melakukan manajemen laba pada saat pergantian UU Perpajakan. Di lain pihak, Subagyo dan Octavia (2010) menunjukkan hanya perusahaan yang mengalami keuntungan yang melakukan manajemen laba saat perubahan UU perpajakan. Penelitian Subagyo dan Octavia (2010), Suwardi (2013), dan Wijaya dan Martani (2011) tidak menemukan hasil yang konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kembali apakah perusahaan melakukan manajemen laba pada saat terjadi perubahan peraturan perpajakan. Penelitian ini meneliti dampak penerapan UU No.36/2008.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: pertama, penelitian ini menguji periode waktu yang lebih panjang yaitu periode tahun 2006–2010. Penelitian yang dilakukan oleh Subagyo dan Octavia (2010) dan Wijaya dan Martani (2011) melakukan pengamatan periode 2008–2009. Dengan pengamatan yang lebih panjang maka diharapkan akan dapat mendeteksi apakah perusahaan melakukan manajemen laba pada periode satu tahun dan atau dua tahun setelah penerapan UU No.36/2008. Penelitian yang dilakukan oleh Subagyo dan Octavia (2010) dan Suwardi (2013) fokus pada industri manufaktur, sedangkan penelitian ini menguji seluruh perusahaan

non-keuangan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006–2010. Kedua, penelitian ini akan menguji dampak penerapan UU No.36/2008 terhadap manajemen laba dengan mengamati seluruh perusahaan dan untuk masing-masing industri yang terdaftar di BEI, kecuali industri keuangan dan perbankan. Dengan demikian penelitian ini akan bisa menunjukkan industri mana yang lebih responsif terhadap perubahan peraturan perpajakan di Indonesia.

Penelitian di luar negeri menunjukkan perusahaan melakukan manajemen laba dalam menyikapi penerapan tarif pajak yang lebih rendah (Guenther, 1994; Roubi dan Richardson, 1998; Yin dan Cheng, 2004) akan tetapi bukti di Indonesia tidak menunjukkan manajemen laba yang signifikan dalam menyikapi pemotongan tarif pajak (Hidayati dan Zulaikha, 2003; Setiawati, 2001). Penelitian mengenai manajemen laba yang dimotivasi oleh keputusan pajak sangat dianjurkan, karena bukti-buktinya masih sangat diperlukan (Graham *et al.*, 2012; Hanlon dan Heitzman, 2010). Penelitian mengenai manajemen laba yang dimotivasi oleh pajak juga sangat dianjurkan untuk dilakukan di negara-negara berkembang karena faktor institusi yang berbeda dengan negara Amerika Serikat (Li dan Cai, 2011). Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di BEI dengan keluarnya UU No.36/2008 tentang penerapan tarif pajak tunggal yang berlaku sejak tahun 2009.

## TINJAUAN TEORETIS

### Manajemen Laba untuk Meminimalkan Pajak

Teori agensi menyatakan terdapat perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen) (Jensen dan Meckling, 1976). Masing-masing pihak berusaha untuk mendahulukan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, akan terjadi benturan kepentingan antara pihak manajemen dan pemilik. Pihak manajemen sebagai pihak yang menjalankan

perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan untuk pihak mereka. Manajemen bisa saja melakukan manajemen laba untuk meningkatkan laba perusahaan. Peningkatan laba ini menunjukkan kinerja perusahaan meningkat, sehingga manajer bisa melakukan klaim bahwa kinerjanya meningkat. Manajer bisa memperoleh bonus yang lebih tinggi. Kassipilai dan Mahenthiran (2013) menemukan bahwa manajer melakukan manajemen laba dengan menggunakan akun *deferred tax* dan penyesuaian penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa manajer menggunakan akun yang terkait dengan pajak untuk melakukan manajemen laba (Badertscher *et al.*, 2013).

Definisi manajemen laba yang diajukan oleh Healy dan Wahlen (1999) adalah sebagai berikut: *Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring transaction to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers.*

Definisi ini menyatakan manajemen laba terjadi jika manajer menggunakan pertimbangannya dalam pelaporan keuangan, sehingga mengakibatkan laporan keuangan tidak melaporkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya akan mengakibatkan keputusan investasi yang diambil oleh pengguna laporan keuangan menjadi tidak maksimal. Kebijakan manajer tersebut dapat berupa memilih salah satu metode akuntansi dari berbagai metode yang tersedia, dengan tujuan untuk kepentingan mereka sendiri. Atau manajer dapat menggunakan akun pajak di laporan keuangan untuk mencapai target laba (Dhaliwal *et al.*, 2004).

Ronen dan Yaari (2008) mengungkapkan salah satu motivasi yang dapat mendorong manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Manajer melakukan manipulasi laba dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang dibayar

oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan penghematan pajak. Mengingat pentingnya pajak, maka beberapa peneliti seperti Graham *et al.* (2012), Hanlon dan Heitzman (2010), Li dan Cai (2011) menganjurkan penelitian mengenai hubungan antara manajemen laba dan pajak semakin diperbanyak. Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa pemindahan laba dari periode dengan tarif pajak tinggi ke tarif pajak rendah (Balachandran *et al.*, 2007; Boynton *et al.*, 1992; Dharmapala dan Riedel, 2013; Guenther, 1994; Marques *et al.*, 2011; Monem, 2003; Roubi dan Richardson, 1998; Yin dan Cheng, 2004); melakukan manajemen laba dengan tujuan penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala, 2006, 2009; Huseynov dan Klamm, 2012; Taylor dan Richardson, 2012); atau dengan memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak yang diberikan oleh pemerintah (Bachek *et al.*, 2012; Hashim *et al.*, 2012; K. Z. Lin, 2006).

Guenther (1994) melakukan penelitian yang terkait dengan manajemen laba saat perusahaan menghadapi pemotongan tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat melakukan pemotongan tarif pajak maksimal dari 46% menjadi 34%. Perusahaan di Amerika Serikat dapat memanfaatkan pemotongan pajak ini untuk meminimalkan pajak mereka. Hasilnya menunjukkan *discretionary accruals* pada satu tahun sebelum penerapan tarif pajak baru adalah signifikan negative. Hasil ini menunjukkan perusahaan di Amerika Serikat melakukan manajemen laba sebelum penerapan peraturan pajak baru. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil Boynton, *et al.* (1992) yang menemukan perusahaan melakukan *discretionary accrual* yang tidak biasa pada tahun sebelum penerapan The Tax Reform Act 1986 di Amerika Serikat. Selanjutnya Yin dan Cheng (2004) membandingkan perusahaan yang menderita rugi dan memperoleh laba dalam melakukan manajemen laba untuk meminimalkan pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang

mengalami kerugian cenderung tidak *opportunistic* dalam menghadapi kesempatan untuk meminimalkan pajak dari pemotongan tarif yang berlaku, sedangkan perusahaan yang mengalami keuntungan menggunakan kesempatan untuk meminimalkan pajak dengan melakukan manajemen laba yang mengakibatkan penurunan laba.

Balachandran *et al.* (2007) melakukan pengujian terhadap perilaku perusahaan di Australia dalam menghadapi reformasi pajak tahun 1988 yang mengakibatkan penurunan tarif pajak. Hasilnya mengkonfirmasi dugaan mereka bahwa perusahaan di Australia melakukan manajemen laba dengan tujuan merendahkan nilai laba pada periode sebelum penerapan peraturan pajak yang baru. Monem (2003) menguji peraturan pajak yang dikenakan ke perusahaan di industri emas di Australia. Hasilnya menunjukkan perusahaan yang termasuk dalam industri emas di Australia melakukan manajemen laba pada periode sebelum penerapan pajak di Australia. Hasil penelitian Balachandran *et al.* (2007) dan Monem (2003) menunjukkan perusahaan di Australia bereaksi terhadap penerapan pemotongan pajak dengan melakukan manajemen laba dengan tujuan meminimalkan laba pada periode sebelum penerapan peraturan pemotongan pajak.

Yamashita dan Otogawa (2007) menginvestigasi perilaku perusahaan di Jepang dalam menyikapi peraturan baru yang mengurangi beban pajak mereka. Jepang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lain yaitu terdapat hubungan yang eksplisit antara laba akuntansi dan laba pajak. Hasilnya menunjukkan ada *discretionary accruals* yang negative pada periode sebelum penerapan peraturan pajak baru yang mengurangi tarif pajak. Hal ini menarik karena walaupun laba pajak dan laba akuntansi mengarah kearah penyatuan, tapi tetap saja perusahaan di Jepang melakukan manajemen laba untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar.

Marques, *et al.* (2011) menginvestigasi manajemen laba dan pajak di Portugal.

Perusahaan di Portugal diwajibkan untuk membayar sejumlah uang sebagai pembayaran awal pajak penghasilan dalam suatu akun yang disebut “special payment on account” (SPA). Nilai SPA ini di antara nilai minimum dan nilai maksimum pajak penghasilan. Marques, *et al.* (2011) menunjukkan perusahaan di Portugal melakukan manajemen laba dengan tujuan meminimalkan SPA.

Penelitian mengenai manajemen laba dengan tujuan meminimalkan pajak di China juga mengkonfirmasi usaha manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan (B. Lin *et al.*, 2012; K. Lin *et al.*, 2012). Pemerintah China menurunkan tarif pajak dari 33% menjadi 25% yang berlaku sejak tahun 2008. B. Lin *et al.* (2012) menguji perilaku perusahaan di China dalam menghadapi insentif untuk meminimalkan pajak karena ada pemotongan tarif. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan di China melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak mereka. Akan tetapi, manajemen laba ini *berkurang* jika pemerintah memiliki saham di dalamnya. Selanjutnya K. Lin, *et al.* (2012) menguji perilaku perusahaan public dan perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa dalam menyikapi pemotongan tarif pajak di China. Hasilnya menunjukkan perusahaan yang tidak terdaftar di China lebih agresif dalam melakukan manajemen laba.

Hashim, *et al.* (2012) menganalisis manajemen laba dan kebijakan *tax holidays* di Malaysia pada tahun 1999. Hasilnya menunjukkan perusahaan di Malaysia tidak menggunakan insentif untuk meminimalkan pajak yang ada karena adanya *tax holidays*. Hal ini disebabkan pada tahun 1999 Malaysia dilanda krisis, sehingga *tax holidays* tidak terlalu berpengaruh signifikan. Akan tetapi, penelitian Bachek, *et al.* (2012) menunjukkan perusahaan di Malaysia melakukan manajemen laba untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia dari *tax holidays*. Hasil Bachek, *et al.* (2012) sejalan dengan hasil K.Z. Lin (2006) yang juga menemukan perusahaan di China

melakukan manajemen laba saat penerapan *tax holidays*.

Dharmapala dan Riedel (2013) dan Roubi, *et al.* (1998) melakukan pengujian lintas negara terkait dengan manajemen laba untuk meminimalkan pajak. Roubi, *et al.* (1988) menguji perilaku perusahaan di Kanada, Malaysia dan Singapura dalam menghadapi penurunan tarif pajak di negara masing-masing. Hasilnya menunjukkan perusahaan di ketiga negara tersebut melakukan manajemen laba dengan cara mempercepat biaya dan menunda pendapatan. Kebijakan ini mengakibatkan laba pada periode sebelum penerapan peraturan pajak baru menjadi lebih rendah dibandingkan laba sesungguhnya. Dengan demikian, perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak untuk pajak penghasilan. Selanjutnya Dharmapala dan Riedel (2013) menguji manajemen laba yang dilakukan perusahaan multinasional di Eropa untuk meminimalkan pajak. Perusahaan multinasional mempunyai keuntungan berupa dapat memindahkan labanya dari negara yang mempunyai tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hasil penelitian mendukung teori yang diajukan oleh peneliti. Perusahaan multinasional di Eropa melakukan manajemen laba untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Penelitian di luar negeri menunjukkan perusahaan memanfaatkan insentif dari penurunan tarif pajak yang berlaku dengan melakukan manajemen laba untuk meminimalkan pajak. Di Indonesia, penelitian mengenai manajemen laba dan perubahan tarif pajak juga sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain: Hidayati dan Zulaikha (2003), Setiawati (2001) dan Swardi (2011). Hidayati dan Zulaikha (2003) dan Setiawati (2001) meneliti perilaku perusahaan di Indonesia dalam menghadapi UU Pajak Penghasilan tahun 2000. Hasil dari kedua penelitian tersebut menunjukkan tidak ada discretionary accrual yang negative pada tahun sebelum pelaksanaan

UU No.17/2000. Hal ini menunjukkan perusahaan di Indonesia tidak melakukan manajemen laba pada tahun sebelum pelaksanaan peraturan penghitungan pajak penghasilan yang baru. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian di luar negeri (Balachandran *et al.*, 2007; Guenther, 1994; Roubi dan Richardson, 1998; Yin dan Cheng, 2004) yang menunjukkan perusahaan memnfaatkan insentif perubahan peraturan pajak untuk meminimalkan pajak. Penelitian selanjutnya oleh Suwardi (2011) menginvestigasi perilaku perusahaan manufaktur di Indonesia dalam menghadapi UU No.36/2008. Penelitian Suwardi (2011) menunjukkan sebagian besar nilai *discretionary accruals* perusahaan manufaktur di BEI adalah negative, akan tetapi penelitian ini tidak menguji secara statistik apakah nilai ini signifikan atau tidak, sehingga tidak bisa mengambil keputusan apakah perusahaan manufaktur di Indonesia melakukan manajemen laba atau tidak saat penurunan tarif pajak yang dilaksanakan berdasarkan UU No.36/2008. Bukti dari ketiga penelitian: Hidayati dan Zulaikha (2003), Setiawati (2001) dan Suwardi (2011) tidak menunjukkan bukti perusahaan di Indonesia melakukan manajemen laba saat terjadi perubahan peraturan pajak yang memungkinkan perusahaan melakukan penghematan pajak.

UU No.36/2008 menerapkan tarif pajak tunggal yaitu: 23% dan 20% bagi perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 dan 2010. Tarif pajak ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif sebelumnya. Penerapan UU No.36/2008 ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk memindahkan labanya dari periode dengan tarif tinggi ke periode dengan tarif rendah. Pemindahan laba ini dilakukan dengan manajemen laba dengan cara mempercepat biaya atau dengan menunda pendapatan. Bukti-bukti empiris menunjukkan perusahaan memanfaatkan insentif pemotongan tarif pajak untuk meminimalkan pajak (Guenther, 1994; B. Lin *et al.*, 2012; K. Lin *et al.*, 2012; Roubi dan Richardson, 1998; Yin dan

Cheng, 2004), oleh karena itu, penelitian ini menduga perusahaan di Indonesia melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan nilai laba untuk meminimalkan pajak pada tahun 2008 (satu tahun sebelum penerapan UU No.36/2008). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>1</sub> : Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan manajemen laba saat penerapan UU No. 36/2008.

### **Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Manajemen Laba**

Bagian ini akan membahas secara mendalam tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba dalam konteks pemanfaatan perubahan peraturan perpajakan. Penelitian ini fokus pada tiga variabel yaitu ukuran perusahaan, leverage dan tingkat keuntungan. Watts dan Zimmerman (1978) berpendapat bahwa perusahaan besar akan memperoleh pengawasan yang lebih ketat, sehingga mereka akan melakukan manajemen laba untuk meminimalkan laba. Pendapat ini dikonfirmasi oleh Guenther (1994). Selain itu, perusahaan yang sedang mengalami tekanan hutang akan berusaha menunjukkan kinerja yang baik dengan meningkatkan laba (Guenther, 1994; B. Lin *et al.*, 2012). Perusahaan yang memperoleh laba juga cenderung untuk melakukan manajemen laba dalam rangka mengurangi laba, sehingga pajak yang dibayar akan lebih sedikit (Richardson, Taylor, dan Lanis, 2013), oleh karena itu, penelitian ini menguji dampak ukuran perusahaan, leverage dan tingkat keuntungan terhadap manajemen laba.

### **Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba**

Berdasarkan teori akuntansi positif (Watts dan Zimmerman, 1978) lebih sensitive terhadap kos politik, sehingga cenderung untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan menghasilkan laba yang lebih kecil. Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan di-

amati oleh pihak regulator. Dalam konteks manajemen laba saat menghadapi peraturan yang mengakibatkan penurunan tarif pajak, perusahaan cenderung untuk melakukan manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994) menunjukkan perusahaan besar di Amerika Serikat melakukan manajemen laba dengan cara mengurangi nilai laba dibandingkan laba sesungguhnya dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Hasil ini mengkonfirmasi teori akuntansi positif yang diajukan oleh Watts dan Zimmerman (1978). Hasil penelitian Guenther (1994) ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Gupta dan Newberry (1997) yang menunjukkan perusahaan di Amerika Serikat memanfaatkan kesempatan pengurangan biaya pajak pada saat penerapan Tax Reform 1986. Kedua hasil penelitian ini, yaitu Guenther (1994) dan Gupta dan Newberry (1997) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap manajemen laba di Amerika Serikat. Hasil penelitian ini juga dikonfirmasi oleh beberapa peneliti dari berbagai negara, seperti Derashid dan Zhang (2003) yang menunjukkan hubungan negative antara ukuran perusahaan dan *effective tax rate* di Malaysia. Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2007) terhadap dampak peraturan Ralph Review of Business Taxation juga menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap *effective tax rate*. Semakin besar ukuran perusahaan di Australia cenderung meminimalkan pajak yang mereka bayarkan.

Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Roubi *et al.* (1998) menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan di Singapura dan Kanada pada satu tahun sebelum penerapan pemotongan tarif pajak. Roubi, *et al.* (1998) menunjukkan ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh bagi perusahaan dalam memutuskan untuk melakukan manajemen laba atau tidak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Bachek, *et al.* (2012) dengan menggunakan

sampel penelitian perusahaan Malaysia mengkonfirmasi hasil Roubi *et al.* (1998). Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan di Malaysia untuk melakukan manajemen laba pada periode pembebasan pajak (*tax holidays*). Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian Adhikari, *et al.* (2005) yang melakukan penelitian dampak ukuran perusahaan terhadap kebijakan *effective tax rate* di Malaysia. K. Lin, *et al.* (2012) juga menemukan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba di China dalam menghadapi penurunan tarif pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) dengan menggunakan sampel 627 perusahaan di Australia pada tahun 2008/2009 tidak menunjukkan dampak signifikan ukuran perusahaan terhadap *effective tax rates*.

Penelitian yang dilakukan oleh Van Tendeloo (2007) dengan menggunakan sampel penelitian perusahaan yang tidak terdaftar di London Stock Exchange menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan harapan. Ukuran perusahaan berpengaruh positive dan signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan teori akuntansi positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian B. Lin, *et al.* (2012) yang menguji ukuran perusahaan terhadap manajemen laba untuk meminimalkan pajak dengan adanya pemotongan tarif pajak di China. B. Lin, *et al.* (2012) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Armstong, Blouin, dan Larcker (2012) juga mengkonfirmasi Van Tendeloo (2007) dan B. Lin, *et al.* (2012) dengan menemukan hubungan positif antara ukuran perusahaan dan manajemen laba untuk memanipulasi *effective rate* perusahaan di Amerika Serikat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Richardson, Taylor dan Lanis (2013) juga menunjukkan ukuran perusahaan di Australia berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Dalam konteks Indonesia, Suwardi (2011) menguji dampak ukuran perusahaan

terhadap manajemen laba. Hasilnya menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan manajemen laba perusahaan. Suwardi (2011) tidak mengkonfirmasi hasil Guenther, *et al.* (1994) dan Derashid dan Zhang (2003), namun, penelitian Suwardi (2011) mengkonfirmasi penelitian Adhikari, *et al.* (2005), K. Lin, *et al.* (2012) dan Lanis dan Richardson (2012)

Berdasarkan teori akuntansi positif, perusahaan yang besar cenderung untuk menghindari sorotan dari pemerintah dengan cara melakukan manipulasi laba untuk menampilkan laba yang lebih kecil dari laba sebenarnya, oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap manajemen laba

### Leverage dan Manajemen Laba

Berdasarkan teori *debt covenant hypothesis*, perusahaan yang sedang mengalami kesulitan (tingkat hutangnya tinggi) cenderung untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan menampilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan laba sesungguhnya. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan perusahaan dari penalti karena nilai hutang yang terlalu tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994) mengkonfirmasi hal ini, sehingga, terdapat hubungan positif antara tingkat hutang perusahaan dengan manajemen laba. Hasil penelitian ini dikonfirmasi oleh B. Lin, *et al.* (2012) yang menunjukkan perusahaan di China dengan tingkat leverage tinggi berhubungan dengan tingkat *discretionary accruals* yang tinggi.

Penelitian Roubi, *et al.* (1998) justru menunjukkan hubungan negative antara tingkat hutang perusahaan dengan manajemen laba dalam rangka meminimalkan pajak di Kanada, Malaysia dan Singapura. Hasil ini tidak mengkonfirmasi Guenther (1994) dan B. Lin, *et al.* (2012). Penelitian yang dilakukan oleh Van Tendeloo (2007) mengkonfirmasi Roubi *et al.* (1998) dengan menemukan hubungan negative antara

leverage dan tingkat *discretionary accrual* untuk tujuan pajak di Inggris, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh K. Lin, *et al.* (2012) dengan menggunakan sampel perusahaan di China juga menemukan hubungan negative antara leverage dan manajemen laba. Penelitian di Malaysia juga menemukan hasil negative antara leverage dan manajemen laba (Adhikari *et al.*, 2005; Adhikari *et al.*, 2006; Derashid dan Zhang, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Gupta dan Newberry (1997) juga menunjukkan hubungan negative antara *leverage* dan *effective tax rates*. Semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka semakin rendah rasio biaya pajak/laba. Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat leverage tinggi melakukan manajemen laba supaya tingkat pembayaran pajak mereka rendah. Hasil ini dikonfirmasi oleh Richardson dan Lanis (2007) yang menunjukkan perusahaan di Australia yang mempunyai tingkat leverage tinggi mempunyai tingkat *effective tax rate* yang rendah. Selain itu, perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi cenderung agresif dalam melakukan penanganan terhadap pajaknya dengan tujuan untuk meminimalkan biaya pajak (Richardson *et al.*, 2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Bachek, *et al.* (2012) menunjukkan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dalam menghadapi *tax holidays* di Malaysia. Hasil ini sejalan dengan hasil Armstrong *et al.* (2012) yang juga tidak menemukan dampak signifikan leverage terhadap manajemen laba di Amerika Serikat.

Berdasarkan telaah literature, perusahaan dengan tingkat hutang tinggi cenderung untuk melakukan manajemen laba lebih agresive dalam rangka menghindari penalti karena tingkat hutang yang tinggi. Perusahaan cenderung untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan meningkatkan nilai laba dibandingkan dengan nilai laba sebenarnya. Leverage diharapkan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.



Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : leverage berpengaruh positive terhadap manajemen laba.

### Tingkat Keuntungan dan Manajemen Laba

Penelitian yang dilakukan oleh Yin dan Cheng (2004) dan Richardson, *et al.* (2013) menunjukkan perusahaan yang mengalami laba cenderung agresif untuk melakukan manajemen laba saat terjadi pemotongan tarif pajak yang berlaku. Perusahaan yang mendapatkan laba berusaha untuk meminimalkan pajaknya dengan cara melakukan penurunan nilai laba. Penurunan nilai laba dapat dilakukan dengan cara mengatur biaya dan pendapatan. Biaya akan diakui dipercepat, sedangkan pendapatan akan ditunda, diharapkan akan terdapat hubungan negative antara profitabilitas dan manajemen laba. Hubungan negative ini juga ditemukan oleh Hanlon *et al.* (2012) dengan menggunakan sampel perusahaan di Amerika Serikat.

Bachek, *et al.* (2012) tidak menemukan pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba di Malaysia. Di lain pihak, Richardson dan Lanis (2007) juga menunjukkan perusahaan di Australia yang mempunyai laba tinggi juga cenderung melakukan pengurangan nilai pajak dengan cara melakukan manajemen laba. Mereka menemukan kaitan yang positif antara profitabilitas dan manajemen laba. Hasil ini sejalan dengan hasil Hashim, *et al.* (2012) yang juga menunjukkan hubungan positif antara kinerja perusahaan, yang diukur dengan ROA, dan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan Malaysia di sekitar periode penghapusan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adhikari *et al.* (2005) dan Derashid dan Zhang (2005) justru menunjukkan nilai negative antara profitabilitas dan manajemen laba. Perusahaan di Malaysia melakukan manajemen laba dengan tujuan merendahkan nilai laba (*income decreasing earnings management*) jika mengalami keuntu-

ngan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Moore (2012) yang menunjukkan hubungan negative antara laba dan *book-tax difference*. Perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi justru mempunyai *book-tax difference* yang rendah. Perusahaan cenderung melakukan manajemen laba untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung.

Berdasarkan telaah literatur di atas, maka penelitian ini menduga tingkat keuntungan atau profitabilitas berpengaruh negative terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan di sekitar penerapan UU No.36/2008.

H<sub>4</sub> : profitabilitas berpengaruh negative terhadap manajemen laba

## METODE PENELITIAN

### Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah: (1) Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2007-2010, (2) Perusahaan mempunyai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember, (3) Perusahaan tidak melakukan merger dan akuisisi. Laporan keuangan tersedia lengkap untuk periode 2007-2010.

Data mengenai laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan diperoleh dari internet dan Pojok BEI di Universitas Sebelas Maret dan Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Penelitian ini fokus pada perusahaan non-keuangan karena sektor keuangan mempunyai karakteristik yang berbeda. Sektor keuangan mempunyai regulasi yang jauh lebih ketat dibandingkan sektor non-keuangan. Sektor keuangan diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu, penelitian ini fokus pada industri non-keuangan di Indonesia.

### Definisi Operasional Variabel

Bagian ini membahas definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini;

1. Manajemen laba diukur dengan menggunakan *discretionary current accrual* yang diajukan oleh Guenther (1994).

Metode ini banyak digunakan oleh peneliti lain, antara lain seperti Balachandran *et al.* (2007), Roubi, *et al.* (1998) dan Yin dan Cheng (2004)

$$CACC_{it} / TA_{it-1} = s_i [\Delta SALES_{it} / TA_{it-1}] + v_{it} \dots\dots\dots(1)$$

yaitu:

- CACC<sub>it</sub> = akrual
- TA<sub>it-1</sub> = total asset tahun sebelumnya
- ΔSALES<sub>it</sub> = perubahan penjualan

Penghitungan akrual adalah sebagai berikut;

$$CACC_{it} = (\Delta CA_{it} - \Delta Cash_{it}) - (\Delta CL_{it} - \Delta STD_{it} - \Delta ITP_{it}) \dots\dots\dots(2)$$

yaitu:

- CACC<sub>it</sub> = akrual saat ini;
- ΔCA<sub>it</sub> = perubahan asset lancar
- ΔCash<sub>it</sub> = perubahan kas
- ΔCL<sub>it</sub> = perubahan kewajiban lancar
- ΔSTD<sub>it</sub> = perubahan hutang jangka pendek
- ΔITP<sub>it</sub> = perubahan pajak penghasilan yang dibayarkan

Penghitungan discretionary current accrual adalah dengan mengurangkan current accrual dengan ekspektasi current accrual seperti berikut ini

$$DCA_{it} = CACC_{it} / TA_{it-1} - E[CACC_{it} / TA_{it-1}] \dots\dots\dots(3)$$

Nilai ekspektasi diperoleh dari menjalankan persamaan 1 dengan menggunakan cross sectional model. Setelah diperoleh nilai koefisien beta maka persamaan tersebut dijalankan lagi untuk memperoleh nilai ekspektasi.

2. Ukuran perusahaan diukur dengan log asset.
3. Profitabilitas diukur dengan Return on Assets (ROA)

$$ROA_{it0} = \frac{Laba_{it0}}{Total\ asset_{it0}}$$

4. Rasio hutang diukur dengan membagi jumlah hutang terhadap nilai asset

$$Debt_{t0} = \frac{Hutang_{t0}}{Total\ asset_{t0}}$$

**Pengujian Statistik untuk faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba di sekitar penerapan UU No.36/2008**

Penelitian ini akan menggunakan pair sample t-test untuk menguji apakah ada perbedaan *discretionary current accrual* antara tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010. Selanjutnya, penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang berpengaruh dengan menggunakan regresi berganda sebagai berikut;

$$DCA = a + \beta_1 UP + \beta_2 ROA + \beta_3 Lev + \beta_4 DPe \dots\dots\dots(4)$$

yaitu:

- DCA = *discretionary current accruals*
- UP = ukuran perusahaan (diukur dengan total asset)
- ROA = return on asset (merupakan profitabilitas perusahaan)
- Lev = rasio hutang (jumlah hutang/asset)
- DP = dummy periode, 1 jika tahun 2009 dan 2010 dan 0 jika tidak

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
Pemilihan Sampel**

Berikut ini akan disajikan proses pemilihan sampel penelitian ini.

**Tabel 1  
Pemilihan Sampel**

	<b>Jumlah</b>
Populasi	341
Perusahaan perbankan	(62)
Total sampel	279
Data tidak lengkap	(51)
Perusahaan Sampel	228

Dari tabel 1 dapat kita lihat populasi penelitian ini adalah 341 perusahaan yang merupakan jumlah perusahaan yang terdaftar pada tahun 2006. Dari jumlah perusahaan tersebut, perusahaan yang tergolong perbankan dan keuangan sebanyak 62 perusahaan. Selanjutnya perusahaan

yang tidak mempunyai laporan keuangan lengkap sebanyak 51 perusahaan. Jadi jumlah sampel penelitian ini adalah 228 perusahaan, sedangkan analisis jumlah perusahaan berdasarkan sektor adalah sebagai berikut: sampel terbanyak berasal dari industri manufaktur sebanyak 111 perusahaan sedangkan yang paling sedikit adalah sektor pertanian sebanyak 9 perusahaan.

Tabel 2 berikut ini akan disajikan data mengenai nilai rata-rata *discretionary current accrual* pada sampel penelitian ini.

Nilai rata-rata *discretionary accrual* pada periode pengamatan 2006–2010 menunjukkan nilai manajemen laba pada periode 2006 dan 2007 adalah 0,0296 dan 0,0355. Hal ini menunjukkan nilai yang positif, sedangkan pada tahun 2008, yang merupakan tahun terakhir penerapan pajak bertingkat menunjukkan nilai negative. Perusahaan pada tahun 2008 melakukan manajemen laba negative. Mereka tidak melakukan manajemen laba yang agresif pada tahun 2008, sedangkan berikutnya pada tahun 2009 dan 2010 perusahaan melakukan manajemen laba yang positif.

#### **Pengujian Rata-Rata Manajemen Laba Pada Periode Sebelum Dan Setelah Penerapan UU No.36/2008**

Bagian ini membahas mengenai perbandingan manajemen laba antara periode sebelum dan setelah penerapan peraturan perpajakan UU No.36/2008. Hasil penelitian terhadap pengujian perbedaan untuk seluruh sampel perusahaan menunjukkan

terdapat perbedaan yang signifikan antara tahun 2006 dan 2008. Pada periode akhir penerapan pajak penghasilan yang menggunakan metode lama perusahaan melakukan manajemen laba yang negative dibandingkan dengan tahun 2006. Manajemen laba pada periode ini menunjukkan hasil yang negative. Akan tetapi pengujian terhadap periode lainnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hasil ini menunjukkan secara keseluruhan perusahaan tidak terdapat perbedaan manajemen laba pada periode sebelum dan setelah penerapan UU No.36/2008.

Pengujian berikutnya terhadap perusahaan yang tergolong industri pertanian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara tahun 2007 dan 2009. Ada perbedaan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang tergolong industri pertanian antara sebelum penerapan dan setelah penerapan UU No.36/2008. Berikutnya juga terdapat perbedaan manajemen laba yang signifikan antara periode 2007–2010. Dengan demikian, perusahaan yang tergolong industri pertanian melakukan manajemen laba pada periode sebelum dan setelah penerapan UU No. 36/2008.

Hasil pengujian lainnya tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Perbandingan manajemen laba antara periode 2006–2008, 2006–2009 dan 2006–2010 menghasilkan nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel, sehingga pengujian ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua periode tersebut.

**Tabel 2**  
**Nilai Rata-rata Discretionary Accrual**

	Total	Agriculture	Mining	Manufaktur	Property	Infrastuktur	Investment
2006	0,0296	0,0313	-0,0441	0,0025	0,087	-0,0173	0,0435
2007	0,0355	-0,1117	0,0903	0,0372	-0,017	0,0774	0,0368
2008	-0,0048	-0,112	-0,2575	-0,0212	0,0209	0,0317	-0,0058
2009	0,0173	0,0701	-0,0181	0,0873	-0,0067	-0,0201	0,0135
2010	0,0218	0,0873	0,0075	0,231	0,0995	-0,0041	0,0121

Pengujian berikutnya antara tahun 2008-2009 dan 2008-2010 juga menunjukkan nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel dan probabilitas yang lebih besar dari 10%, sehingga hal ini tidak menunjukkan nilai yang signifikan antara kedua periode pengamatan tersebut, selanjutnya pengujian manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang tergolong industri pertambangan pada periode sebelum dan setelah penerapan UU No. 36/2008 menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hasil ini konsisten pada pengujian perbedaan manajemen laba antara periode 2006-2008, 2006-2009, 2006-2010, 2007, 2008, 2007-2009, 2007-2010, 2008-2009, dan 2008-2010. Hal ini menunjukkan perusahaan yang tergolong industri pertambangan tidak melakukan perubahan yang drastis dalam hal pengelolaan manajemen laba antara periode sebelum dan setelah penerapan UU No. 36/2008.

Pengujian berikutnya adalah meneliti perbedaan manajemen laba antara periode sebelum dan setelah penerapan UU No.36/2008 pada industri manufaktur. Hasil pengujian terhadap manajemen laba pada periode 2006-2008, 2006-2009 dan 2006-2010 menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian terhadap perbedaan manajemen laba antara periode 2007-2008, 2007-2009, 2007-2010 yang juga tidak menemukan hasil yang signifikan, akan tetapi pengujian terhadap perbedaan manajemen laba antara periode 2008-2009 menunjukkan nilai t-hitung sebesar -1.813. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 90%. Terdapat perbedaan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang tergolong industri manufaktur antara tahun 2008 dan 2009. Perusahaan manufaktur memanfaatkan perubahan peraturan pajak yang berdasarkan UU No.36/2008 untuk melakukan manajemen laba, sedangkan penelitian selanjutnya dengan membandingkan manajemen laba antara tahun 2008-2010 tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Perusahaan manufaktur melaksanakan mana-

jemen laba yang berbeda antara periode sebelum dan setelah penerapan UU No.36/2008.

Pengujian terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang tergolong industri properti menunjukkan tidak ada perbedaan manajemen laba antara tahun 2006-2008 dan 2006-2010, namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara periode 2006-2009. Hal ini menunjukkan perusahaan properti melakukan manajemen laba yang berbeda antara tahun 2006 dan 2009. Ada perbedaan manajemen laba antara periode sebelum dan sesudah penerapan UU No.36/2008, sedangkan pengujian manajemen laba antara tahun 2007-2008, 2007-2009, 2007-2010 menunjukkan nilai t-hitung yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai t-tabel, sehingga pengamatan ini tidak menemukan perbedaan yang signifikan. Pengujian antara periode 2008-2009 dan 2008-2010 juga tidak menemukan hasil yang signifikan.

Pengujian terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang tergolong industri infrastruktur pada periode 2006-2008, 2006-2009, dan 2006-2010 tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini juga berlaku untuk pengujian perbedaan manajemen laba untuk 2007-2008 dan 2007-2010, akan tetapi, pengujian perbedaan manajemen laba antara periode 2007-2009 menunjukkan nilai t sebesar 2,366. Nilai t-hitung ini mempunyai probabilitas sebesar 0,035. Terdapat perbedaan manajemen laba antara tahun 2007-2009 untuk sektor infrastruktur. Pengujian terhadap perbedaan manajemen laba antara tahun 2008-2009 dan 2008-2010 tidak menunjukkan hasil signifikan.

Dari Tabel 3 dapat kita lihat bahwa pengujian perbedaan manajemen laba industri investasi untuk tahun 2006-2008, 2006-2009, 2006-2010 menunjukkan nilai probabilitas yang lebih besar dari 10%, tidak ada perbedaan manajemen laba pada periode tersebut. Pengujian perbedaan manajemen laba antara periode 2007-2008 menghasilkan nilai t-hitung sebesar 2,065 dengan

**Tabel 3**  
**Uji Beda Rata-rata Manajemen Laba**

	Total	Agriculture	Mining	Manufaktur	Properti	Infrastuktur	Investment
2006-2008	1,866*	0,984	1,015	0,663	1,238	-0,851	1,661
	(0,063)	(0,354)	(0,33)	(0,509)	(0,227)	(0,409)	(0,103)
2006-2009	0,64	-0,727	-0,224	-1,515	2,459**	0,114	1,048
	(0,523)	(0,488)	(0,827)	(0,133)	(0,021)	(0,911)	(0,3)
2006-2010	0,463	-1,143	-0,502	-1,015	-0,115	-0,269	1,048
	(0,644)	(0,286)	(0,625)	(0,312)	(0,909)	(0,792)	(0,299)
2007-2008	1,459	1,033	1,131	1,222	-0,459	0,639	2,065**
	(0,146)	(0,329)	(0,28)	(0,224)	(0,65)	(0,533)	(0,044)
2007-2009	0,656	-2,611**	1,462	-0,821	-0,125	2,336**	1,148
	(0,513)	(0,031)	(0,17)	(0,413)	(0,901)	(0,035)	(0,256)
2007-2010	0,499	-2,891**	1,187	-0,848	-1,076	1,733	1,076
	(0,618)	(0,02)	(0,258)	(0,398)	(0,292)	(0,105)	(0,287)
2008-2009	-0,846	-1,169	-0,776	-1,813*	0,88	0,85	-1,148
	(0,398)	(0,272)	(0,453)	(0,073)	(0,387)	(0,41)	(0,256)
2008-2010	-1,397	-1,123	-0,909	-1,14	-0,704	0,534	-0,953
	(0,164)	(0,294)	(0,381)	(0,257)	(0,488)	(0,602)	(0,345)

\*, \*\* signifikan pada tingkat 10%, 5%

tingkat probabilitas 0,044. Terdapat perbedaan manajemen laba yang signifikan antara periode 2007–2008 pada industri investasi. Selanjutnya pengujian terhadap manajemen laba 2007–2009 dan 2007–2010 tidak menghasilkan nilai t hitung yang lebih besar dibandingkan dengan t-tabel. Berikutnya pengujian terhadap periode 2008–2009 dan 2008–2010 juga tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

#### **Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Manajemen Laba di Sekitar Penerapan No.36/2008**

Bagian ini akan membahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba di sekitar penerapan UU No.36/2008. Ada 4 faktor yang akan diuji: asset, ROA, hutang, dan periode penerapan peraturan pajak.

**Tabel 4**  
**Hasil Pengujian Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba saat penerapan UU No.36/2008**

Variable	t-stat	Prob.
C	0.1597	0.9059
Lev	0.0002***	4.9231
LOG_UP	-0.0238	-0.8093
ROA	0.0001*	1.8624
DP	0.0408	0.8704
adj R <sup>2</sup>		0.0155
Fvalue		6.8544***
Fprob		0.0000

$DCA = a + \beta_1 UP + \beta_2 ROA + \beta_3 Lev + \beta_4 DP + e$ , *DCA*= discretionary current accruals, *UP*= ukuran perusahaan (diukur dengan total asset), *ROA*= return on asset (merupakan profitabilitas perusahaan), *Lev* = rasio hutang (jumlah hutang/asset), *DP*= dummy periode, 1 jika tahun 2009 dan 2010 dan 0 jika tidak. \*\*\*, \*\*, \* signifikan pada tingkat 1%, 5%, dan 10%.

Berdasarkan Tabel 4 dapat kita lihat bahwa nilai *F* hitung adalah 6,8544 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,0000. Model penelitian ini adalah signifikan pada tingkat 1%. Dengan demikian model penelitian ini dapat digunakan untuk pengujian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba di sekitar penerapan UU No.36/2008.

Dari Tabel 4 dapat kita lihat bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Nilai *t* hitung untuk pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba adalah 4,9231 dengan nilai probabilitas 0,0000. *Leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi *leverage*, maka semakin tinggi manajemen laba. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi cenderung akan melakukan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah. Hasil ini menunjukkan *leverage* merupakan faktor yang berperan dalam melakukan manajemen laba. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu seperti Adhikari, *et al.* (2005, 2006), Derashid dan Zhang (2003), K. Lin, *et al.* (2012), Roubi *et al.* (1998) dan Van Tendeloo (2007) yang menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, akan tetapi, hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu, seperti B. Lin, *et al.* (2012) dan Guenther (1994) yang juga menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Di sekitar penerapan peraturan perpajakan UU No.36/2008 *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Hasil pengujian terhadap ukuran perusahaan menunjukkan nilai *t*-hitung sebesar -0,8093 dengan tingkat probabilitas 0,4185.

Hal ini menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba di sekitar penerapan UU No.36/2008, sehingga tidak ada perbedaan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil dalam hal manajemen laba. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian terdahulu seperti: Derashid dan Zhang (2003), Guenther (1994), Gupta dan Newberry (1997) dan Lanis dan Richardson (2007) yang menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap manajemen laba. Hasil ini pun tidak sejalan dengan hasil penelitian Armstong, *et al.* (2012), B. Lin, *et al.* (2012), Ricardson, *et al.* (2013) dan Van Tendeloo (2007) yang juga menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bacheck, *et al.* (2012), K. Lin, *et al.* (2012), Lanis dan Richardson (2012), dan Roubi *et al.* (1998) yang tidak menemukan dampak ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian ini, ukuran perusahaan di Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dari tabel 4 dapat kita lihat *ROA* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Nilai *t*-hitung pengaruh *ROA* terhadap manajemen laba adalah 1,8624 dengan tingkat probabilitas 0,0627. Hasil ini menunjukkan tingkat profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan manajemen laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini tidak sejalan dengan Adhikari *et al.* (2005), Derashid dan Zhang (2005) dan Moore (2012) yang menunjukkan tingkat keuntungan berpengaruh negative terhadap manajemen laba, sedangkan Bacheck, *et al.* (2012) tidak menemukan dampak yang signifikan terhadap manajemen laba, akan tetapi penelitian ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya seperti oleh Hashim, *et al.* (2012), Richardson, *et al.* (2013), Richardson dan Lanis (2007), dan Yin dan Cheng

(2004) yang menunjukkan pengaruh positif tingkat keuntungan terhadap manajemen laba. Perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi cenderung melakukan manajemen laba yang agresif. Hal ini menunjukkan tingkat keuntungan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan manajemen laba di sekitar penerapan UU No.36/2008.

Pengujian terhadap dampak penerapan UU No.36/2008 terhadap manajemen laba dengan menggunakan variabel dummy, yaitu 1 jika data tersebut merupakan periode 2009 dan 2010 dan 0 jika tidak termasuk tahun 2009 dan 2010 menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Nilai t-hitung adalah 0,8704 dengan nilai probabilitas sebesar 0,3842. Hasil ini menunjukkan tidak ada pengaruh penerapan UU No.36/2008 terhadap manajemen laba di sekitar penerapan UU No.36/2008. Hasil ini menunjukkan perusahaan tidak terpengaruh dengan penerapan UU No.36/2008. Hal ini menunjukkan secara umum perusahaan tidak melakukan manajemen laba di sekitar penerapan peraturan perpajakan yang baru.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menguji manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan di sekitar penerapan UU No.36/2008 mengenai pengenaan tarif pajak. UU No. 36/2008 menyatakan tarif pajak yang berlaku di Indonesia menjadi tarif pajak tunggal. Sebelumnya tarif pajak di Indonesia mengacu ke tarif pajak progresif. Selain itu perusahaan yang terdaftar di BEI juga memperoleh insentif berupa pengurangan tarif pajak sebesar 5% dari tarif pajak yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010. Hal ini menimbulkan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak dengan tujuan meminimalkan biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan manajemen laba yang dilakukan oleh per-

usahaan pada periode sebelum penerapan dan setelah penerapan. Pengujian terhadap manajemen laba pada tahun 2008 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan tahun setelah penerapan. Hal ini menandakan perusahaan di Indonesia tidak melakukan manajemen laba di sekitar periode penerapan UU No.36/2008. Namun penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara periode 2006–2008. Hal ini menunjukkan perusahaan melakukan pengurangan aktifitas manajemen laba pada tahun terakhir penerapan model lama dalam penghitungan pajak.

Pengujian terhadap faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba di sekitar penerapan UU No.36/2008 menunjukkan ROA dan leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi kepemilikan hutang perusahaan dan semakin tinggi tingkat keuntungan yang dihasilkan perusahaan mengakibatkan perusahaan melakukan manajemen laba yang lebih tinggi, sehingga perusahaan lebih agresif saat posisi leverage mereka meningkat atau saat perusahaan memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi. Faktor ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Pengujian dampak periode penerapan UU No.36/2008 juga tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini sejalan dengan pengujian uji beda yang telah dilakukan. Tidak ada perbedaan manajemen laba antara periode sebelum dan setelah penerapan UU No.36/2008.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, A., C. Derashid, dan H. Zhang. 2005. Earnings Management To Influence Tax Policy: Evidence from large Malaysian firms. *Journal of International Financial Management dan Accounting* 16(2): 142-163.
- Adhikari, A., C. Derashid, dan H. Zhang. 2006. Public Policy, Political Connections, And Effective Tax Rates: Longitudinal Evidence From Malaysia. *Journal*

- of *Accounting and Public Policy*, 25(5): 574-595.
- Armstrong, C. S., J. L. Blouin, dan D. F. Larcker. 2012. The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economics* 53(1-2): 391-411.
- Bachek, Z. A., N. Ahmad, dan N. M. Saleh. 2012. Correlation Between Tax Holidays And Earnings Management: An Empirical Study. *Jurnal Pengurusan* 12: 55-64.
- Badertscher, B. A., S. P. Katz, dan S. O. Rego. 2013. The Separation of Ownership And Control And Corporate Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics* 56(2-3): 228-250.
- Balachandran, B., J. Godfrey, D. Hanlon, dan H. Tu. 2007. *Earnings Management in Response to the Corporate Tax Law Changes Evidence from Australia* Paper presented at the AAFANZ Conference, Gold Coast, Queensland.
- Blaylock, B., F.B. Gaertner, dan T. Shevlin. 2012. The association between book-tax conformity and earnings management. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)
- Boynton, C. E., P. S. Dobbins, dan G. A. Plesko. 1992. Earnings Management and the Corporate Alternative Minimum Tax. *Journal of Accounting Research* 30(3): 131-153.
- Derashid, C., dan H. Zhang. 2003. Effective tax rates and the “industrial policy” hypothesis: evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting Auditing and Taxation* 12(1): 45-62.
- Desai, M. A., dan D. Dharmapala. 2006. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics* 79(1): 145-179.
- Desai, M. A., dan D. Dharmapala. 2009. Earnings Management, Corporate Tax Shelters, and Book-Tax Alignment. *National Tax Journal* 62(1): 169 - 186.
- Dhaliwal, D. S., C.A. Gleason, dan L.F. Mills. 2004. Last-Chance Earnings Management: Using the Tax Expense to Meet Analysts' Forecasts. *Contemporary Accounting Research* 21(2): 431-459.
- Dharmapala, D., dan N. Riedel. 2013. Earnings Shocks and Tax-Motivated Income-Shifting: Evidence from European multinationals. *Journal of Public Economics* 97: 95-107.
- Firmanzah. 2012. Pajak dalam struktur pendapatan negara. <http://www.Setkab.go.id/artikel-5247-.html>
- Graham, J. R., J. S. Raedy, dan D. A. Shackelford. 2012. Research in Accounting For Income Taxes. *Journal of Accounting and Economics* 53(1-2): 412-434.
- Guenther, D. A. 1994. Earnings Management In Response To Corporate Tax Rate Changes: Evidence From The 1986 Tax Reform Act. *Accounting Review* 69(1): 230-243.
- Gupta, S., dan K. Newberry. 1997. Determinants of The Variability In Corporate Effective Tax Rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy* 16(1): 1-34.
- Hanlon, M., dan S. Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics* 50(2-3): 127-178.
- Hanlon, M., G.V. Krishnan, dan L.F. Mills. 2012. Audit Fees and Book-Tax Differences. *The Journal of the American Taxation Association* 34(1): 55-86.
- Hashim, J., M. N. Hafni, dan I. K. A. Rahman. 2012. Tax waiver year effect on earnings management practices in Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting* 10(2): 171-189.
- Healy, P. M., dan J. M. Wahlen. 1999. A Review of The Earnings Management Literature And Its Implications For Standard Setting. *Accounting Horizons* 13(4): 365-383.
- Hidayati, S. M., dan Zulaikha. 2003. *Analisis perilaku earnings management: Motivasi minimalisasi income tax*. Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Huseynov, F., dan B.K. Klamm. 2012. Tax Avoidance, Tax Management and



- Corporate Social Responsibility. *Journal of Corporate Finance* 18(4): 804-827.
- Jensen, M. C., dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360.
- Kasipillai, J., dan S. Mahenthiran. 2013. Deferred Taxes, Earnings Management, and Corporate Governance: Malaysian Evidence. *Journal of Contemporary Accounting dan Economics* 9(1): 1-18.
- Lanis, R., dan G. Richardson. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy* 31(1): 86-108.
- Li, O. Z., dan N. Cai. 2011. Capital market research in taxation: Do it in China! *China Journal of Accounting Research* 4(1-2): 1-7.
- Lin, B., R. Lu, dan T. Zhang. 2012. Tax-Induced Earnings Management In Emerging Markets: Evidence from China. *The Journal of the American Taxation Association* 34(2): 19-44.
- Lin, K., L. F. Mills, dan F. Zhang. 2012. The Tradeoff Between Tax Savings and Financial Reporting Costs: Public vs private firms in China. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)
- Lin, K. Z. 2006. The impact of tax holidays on earnings management: An empirical study of corporate reporting behavior in a developing-economy framework. *The International Journal of Accounting* 41(2): 163-175.
- Marques, M., L. L. Rodrigues, dan R. Craig. 2011. Earnings management induced by tax planning: The case of Portuguese private firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 20(2): 83-96.
- Monem, R. M. 2003. Earnings Management in Response to the Introduction of the Australian Gold Tax. *Contemporary Accounting Research* 20(4): 747-774.
- Moore, J. A. 2012. Empirical evidence on the impact of external monitoring on book-tax differences. *Advances in Accounting*, 28(2): 254-269.
- Richardson, G., dan R. Lanis. 2007. Determinants of The Variability In Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6): 689-704.
- Richardson, G., G. Taylor, dan R. Lanis. 2013. The Impact of Board of Director Oversight Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy* 32(3): 68-88.
- Ronen, J., dan V. Yaari. 2008. *Earnings Management: Emerging Insights in Theory, practice, and research* New York: Spriner Science + Business Media, LLC.
- Roubi, R. R., dan A.W. Richardson. 1998. Managing Discretionary Accruals In Response To Reductions In Corporate Tax Rates in Canada, Malaysia and Singapore. *The International Journal of Accounting* 33(4): 455-467.
- Setiawati, L. 2001. *Rekayasa Akruar Untuk Meminimalkan Pajak*. Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi IV, Semarang.
- Subagyo, dan Octavia. 2010. *Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Pajak Penghasilan Badan di Indonesia*. Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Suardi, E. 2011. *Income Tax Rate and Earnings Management of Firms Listed on the Indonesian Stock Exchange*. Paper Presented at the 15th. International Business Conference, Sydney, Australia.
- Suardi, E. 2013. Income Tax Rate and Earnings Management of Firms Listed On the Indonesian Stock Exchange. *Journal of Business and Policy Research* 8(1): 78-89.
- Taylor, G., dan G. Richardson. 2012. International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting* 47(4): 469-496.

- Van Tendeloo, B. 2007. Audit quality and Tax-Induced Earnings Management In UK Private Firms. *Research Paper 2007-04 Faculty of Applied Economics, University of Antwerpen*. [www.ua.ac.be/tew](http://www.ua.ac.be/tew) Retrieved from [www.ua.ac.be/tew](http://www.ua.ac.be/tew)
- Watts, R. L., dan J. L. Zimmerman. 1978. Towards a Positive Theory of The Determination of Accounting Standards. *The Accounting Review* 53(1): 112-134.
- Wijaya, M., dan D. Martani. 2011. *Praktik Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai Uu No. 36 Tahun 2008*. Paper yang dipresentasikan di Simposium Nasional XIV Banda Aceh.
- Yamashita, H., dan K. Otogawa. 2007. Do Japanese Firms Manage Earnings in Response to Tax Rate Reduction in the Late 1990s? *working paper from Kobe University*. [www.ms.kuki.tus.ac.jp/~shelf/MS-07-01.pdf](http://www.ms.kuki.tus.ac.jp/~shelf/MS-07-01.pdf)
- Yin, Q. J., dan C. S. A. Cheng. 2004. Earnings Management of Profit Firms and Loss Firms in Response to Tax Rate Reductions. *Review of Accounting dan Finance* 3(1): 67-92.

## PEMODELAN SKENARIO KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA DENGAN METODE PROMETHEE

**Nafiah Ariyani**  
*nafiah\_ariyani@yahoo.com*  
Universitas Sahid Jakarta

### ABSTRACT

*One of the challenging issues in poverty alleviation programs is to determine the set of multi criteria which encompass aspect of inputs, process and output that yield the best alternative program. This is important due to the fact that poverty is multidimensional issue and criteria to be considered in the program are vary. This study aimed to address a challenge by employing a mutli-criteria analysis. PROMETHEE was used to assess existing various poverty alleviation patterns. In addition, a new set of policy alternative, namely a hybrid policy was introduced in order to compare with existing policies. The results show that zakat patterns performs well in terms of time to eradicate poverty, the completeness of the program, accuracy of the target, recipient satisfactory, satisfactory of the admission process, data availability, and cost management. In contrast, CSR patterns perform well in management aspect, cost of management, data availability and satisfactory for the time of delivery program, while the pattern of government programs excel in aspects: the completeness of the program and the availability of funds. Overall, the newly introduced policy of hybrid program offers the best performance for all aspect of input, process and output in administering the poverty alleviation programs.*

*Key words: poverty alleviation, hybrid program, PROMETHEE*

### ABSTRAK

Salah satu tantangan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan adalah mengembangkan program yang bersifat multidimensi baik dari sisi input, proses dan output yang akan menghasilkan alternatif kebijakan pengentasan kemiskinan terbaik. Hal ini penting mengingat kemiskinan adalah masalah multidimensi dan kriteria yang harus dipertimbangkan bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan menerapkan analisis mutli-kriteria pada kriteria input, proses dan output. Metode PROMETHEE (*Preference Ranking Organization Methode for Enrichment Evaluation*), digunakan untuk menilai berbagai pola program pengentasan kemiskinan yang dikembangkan oleh pemerintah, lembaga zakat dan sektor swasta. Selain itu, satu alternatif kebijakan baru, yaitu kebijakan hibrida diperkenalkan untuk dibandingkan dengan kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola program zakat mempunyai kinerja yang baik dalam aspek waktu yang diperlukan untuk memberantas kemiskinan, kelengkapan program, ketepatan sasaran, kepuasan terhadap waktu penerimaan program, kepuasan terhadap proses penerimaan program, ketersediaan data, serta biaya pengelolaan. Sebaliknya, program pengentasan kemiskinan yang diprakarsai oleh sektor swasta, yaitu CSR tampil baik dalam aspek manajemen, biaya pengelolaan, ketersediaan data serta kepuasan terhadap waktu penyerahan program; sedangkan pola program pemerintah unggul dalam aspek: kelengkapan program dan ketersediaan dana. Secara keseluruhan, kebijakan baru yang diperkenalkan yaitu pola program hybrid menawarkan kinerja terbaik pada seluruh aspek pengelolaan program pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: pengentasan kemiskinan, hibrida, PROMETHEE

### PENDAHULUAN

Kemiskinan terus menjadi agenda pembangunan berkelanjutan/SDGs (*Sustainable*

*Development Goals*) yang merupakan kelanjutan dari MDGs (*Millineum Development Goals*). Hal ini menunjukkan bahwa pem-

berantasan kemiskinan masih menjadi kesepakatan sebagian besar negara-negara di seluruh dunia. Demikian pula Indonesia.

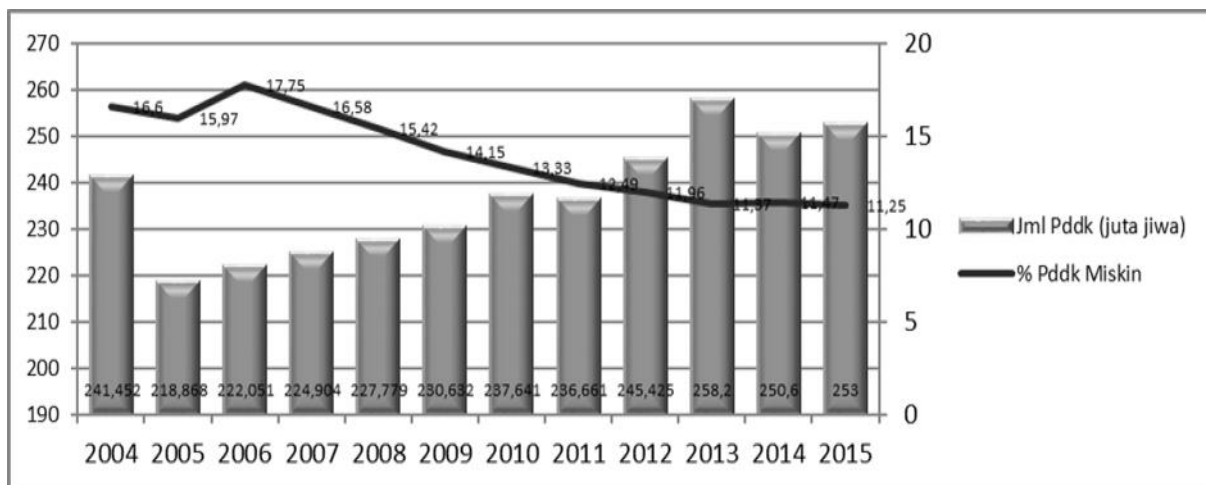
Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup pelik. Meskipun ekonomi tumbuh dan berkembang selama beberapa tahun terakhir dan berbagai langkah kebijakan pengurangan kemiskinan telah dilakukan, namun nampaknya belum membuahkan hasil yang signifikan. Target-target kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintahpun hampir tidak pernah tercapai. Kemiskinan tetap menjadi masalah sosial yang paling *persistence* yang sulit ditanggulangi sebagaimana kemiskinan “abadi” yang terjadi di Afrika (Korankye, 2014).

Gambar 1 menunjukkan kondisi kemiskinan dan perubahannya selama 10 tahun terakhir di Indonesia. Jika dilihat dari prosentase, jumlah penduduk miskin memang mengalami penurunan, namun dengan pengurangan yang cenderung menurun dan melambat sehingga secara nyata jumlah penduduk miskin tetap meningkat. Rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin selama kurun waktu ini hanya sebesar 0,56% per tahun. Data pada tahun 2015 bahkan mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 meningkat menjadi 11,22% dari total penduduk (28,59 juta jiwa), yang

berarti mengalami penambahan dibanding September 2014 yang sebesar 10,96% (27,737 juta jiwa) ((BPS, 2015). Jumlah kemiskinan itupun masih menggunakan kategori garis kemiskinan dari pendapatan kurang US\$ 1 per hari. Jika perhitungan menggunakan standar Bank Dunia yakni pendapatan US\$ 1,9 per hari, maka jumlah penduduk miskin akan mencapai 42% atau hampir 100 juta jiwa.

Kemiskinan tidak hanya menggambarkan keadaan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, namun juga merupakan suatu proses yang kompleks dengan banyak dimensi, mulai dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Dilihat dari dinamikanya, kemiskinan dapat sementara, namun jika dibiarkan akut dapat menjadi persisten dan menjebak generasi penerus.

Dasgupta (2007) menyatakan kemiskinan adalah suatu jalur berlumpur berbentuk spiral, ketika seseorang atau suatu keluarga masuk ke jalur itu maka akan sulit keluar bahkan cenderung merosot ke bawah. Untuk menangani permasalahan yang multi dimensional ini diperlukan upaya yang berkelanjutan yang didukung oleh kebijakan yang komprehensif meliputi aspek input, proses dan output.



**Gambar 1**  
Jumlah Penduduk Miskin, Proporsi Penduduk Miskin dan Target Penduduk Miskin 2004-2015

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan situs [www.datastatistik-indonesia.com](http://www.datastatistik-indonesia.com)

Dengan pendekatan ini, maka penanggulangan kemiskinan akan mampu membawa orang miskin keluar dari kemiskinannya, yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahannya secara mandiri tanpa tergantung pihak lain.

Di Indonesia, upaya mengatasi kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1970-an hingga saat ini melalui berbagai program baik yang bersifat bantuan sosial maupun yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya untuk mengatasi masalah sosial ekonomi ini juga dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian terhadap kemiskinan. Salah satunya adalah lembaga zakat. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp.217 triliun per tahun dengan peningkatan rata-rata 10% (Mubarok dan Fanani, 2014). Zakat telah menjadi alternatif terbaik dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sebagaimana hasil penelitian Ariyani *et al.* (2015) dan Bremer, 2013 sebagaimana dikutip oleh Ariyani *et al.* (2016) Zakat tidak hanya sekedar sarana untuk memperbaiki kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin, tetapi juga menjadi sistem dan mekanisme untuk mengatur ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang kontinyu.

Lembaga zakat di Indonesia baik yang beraviliasi kepada pemerintah seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) beserta jajarannya di daerah (Bazda) maupun lembaga-lembaga zakat swasta, melalui pen-dayagunaan zakat telah berkontribusi cukup besar dengan melakukan pengembangan program-program yang sangat variatif dan inovatif.

Pihak lain yang juga terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah sektor swasta melalui program *corporate social responsibility* (CSR). CSR merupakan umpan balik kepada masyarakat sehubungan dengan aktifitas perusahaan yang tidak jarang menjadi pemicu munculnya kemiskinan. Gagasan bahwa perusaha-

an harus memikul tanggung jawab di luar kepentingan *stakeholders* adalah konsep lama dan menuntut komitmen yang tinggi (The Economist, 2008). Jika dikelola dengan tepat CSR akan memungkinkannya bertransformasi menjadi CCR (Corporate Community Resource Responsibility) yang menjadi dasar terbangunnya tanggung jawab pembangunan ekonomi masyarakat (CEE-Community Economic Responsibility) (Fauzi, 2012). Berdasarkan pada pemikiran ini, CSR dapat menjadi model yang tepat dalam pengembangan kemampuan ekonomi sosial masyarakat, khususnya masyarakat lokal di sekitar perusahaan.

Konfigurasi keterlibatan pihak-pihak dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan adanya komitmen sosial yang sangat baik, maka jika ide dan program-program pengentasan kemiskinan benar-benar disusun dan dieksekusi dengan komitmen yang tinggi disertai dengan pengelolaan yang tepat, maka pemberantasan kemiskinan akan mungkin terwujud, namun dikarenakan lemahnya koordinasi di antara pihak-pihak tersebut, maka program-program sangat variatif dan pada aspek pelaksanaan memunculkan berbagai permasalahan.

Berbagai hasil penelitian terdahulu diantaranya menyatakan bahwa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak koordinatif, masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri, tidak komprehensif dalam memenuhi kebutuhan orang miskin yang serba kekurangan, masih berorientasi kepada bantuan sosial serta tidak berkelanjutan. Beberapa penelitian bahkan mengatakan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antar program, ego sektoral, ambiguitas, tidak terpadu, tidak merata, memicu konflik struktural maupun konflik horizontal di kalangan masyarakat, serta parsial baik dalam: program, aturan, acuan, kriteria penerima manfaat, maupun pengelolaannya (Dolles, 2010; Muktasam dan Nurjannah, 2011; Pusat Studi Sosial Asia Tenggara-UGM, 2014).

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, maka sangat bijak sekiranya dapat dirancang suatu upaya terpadu yang melibatkan pihak-pihak tersebut secara konsisten yang didukung oleh koordinasi yang memadai. Tujuannya tidak lain adalah agar seluruh potensi dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Untuk itu dapat dipertimbangkan kemungkinan dikembangkannya pola penanggulangan kemiskinan dengan model *hybrid* yaitu model kombinasi antara pola program pemerintah, pola zakat dan pola CSR sebagai representasi dari upaya terpadu tersebut.

Ide model *hybrid* merupakan ide yang relatif baru. Agar terdukung oleh argumentasi ilmiah, maka ide ini perlu dievaluasi untuk dibandingkan dengan pola program-program eksisting. Salah satu pendekatan adalah dengan melakukan perbandingan pemeringkatan terhadap pola program-program eksisting dan pola model *hybrid* sehingga diketahui mana pola yang merupakan pola terbaik. Pola program terbaik nantinya dapat ditetapkan sebagai *raw model* pola program pengentasan kemiskinan dalam menghadapi kemiskinan yang *persistence*.

Berdasarkan urian permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menentukan pola program terbaik di antara pola program pemerintah, pola program zakat, pola program CSR dan pola model *hybrid*; (2) mengetahui atribut-atribut yang menjadi sumber keunggulan pola program-program tersebut. Untuk mendukung proses pemeringkatan dan memberikan analisis lebih rinci baik terhadap program-program eksisting maupun program model *hybrid* digunakan kaidah sains yakni melalui pendekatan *multi criteria analysis* dengan menggunakan metode PROMETHEE (*Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation*) yang dikembangkan oleh Brans dan Vincke (1985). Metode Promethee merupakan metode yang banyak digunakan untuk mengkaji secara mendalam potensi alternatif-alternatif melalui prinsip yang disebut *outranking*, yaitu proses pemeringkat-

an alternatif-alternatif melalui perbandingan nilai dengan mempertimbangkan preferensi pengambil keputusan (Brans *et al.* 1986). Metode PROMETHEE semakin banyak diminati dalam praktek keputusan multi-kriteria dan peneliti yang tertarik pada aspek sensitivitas karena praktis dan fleksibel (Behzadian *et al.* 2010).

#### TINJAUAN TEORETIS

##### Kemiskinan dan Kerangka Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan melalui berbagai perspektif. Menurut Komisi Hak Asasi Manusia PBB, kemiskinan dapat dinyatakan dalam tiga cara yang berbeda Sarshar, 2010 sebagaimana dikutip oleh Khan (2014). Pertama, kemiskinan adalah situasi di mana terjadi kelangkaan fasilitas penting akibat dari pendapatan yang tidak memadai. Kedua, kemiskinan terjadi karena kegagalan memenuhi kebutuhan dasar. Ketiga dan yang lebih modern, kemiskinan menggambarkan kurangnya kesempatan. Dari sisi pengukuran, kemiskinan umumnya diukur sebagai kemiskinan absolut atau relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada standar garis kemiskinan yang ditetapkan konsisten dari waktu ke waktu dan antar negara. Bank Dunia sejak 2008 mendefinisikan kemiskinan sebagai hidup kurang dari US \$1,9 perhari, sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang pengukurannya didasarkan pada pemerataan distribusi pendapatan.

Kajian secara luas terhadap kemiskinan telah dilakukan oleh berbagai kalangan baik akademisi, ekonom bahkan politisi, namun hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan kebijakan dan program yang dianggap paling berdayaguna, demikian pula teori yang membahas hal tersebut. Diantara sedikitnya teori dan konsep kebijakan pengentasan kemiskinan, Bradshaw (2007) menyatakan bahwa penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan memerlukan kajian komprehensif terhadap berbagai faktor yang menentukan keberhasilannya, yang

meliputi aspek: pelaku, proses, evaluasi serta dasar teori yang relevan.

Menurut Rank dalam Sameti *et al.* (2012) memahami konsep dan penyebab sebenarnya dari kemiskinan penting dan sangat berguna dalam merancang program pengentasan kemiskinan yang efektif. Menurutnya penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan dalam empat faktor utama, yaitu: faktor individu, budaya, lingkungan, dan struktural. Sementara itu Schiller (2008), Laderchi, Saith dan Stewart, 2003 dalam Sameti *et al.* (2012) menyatakan cara kita mengkonsep dan mengukur kemiskinan akan mempengaruhi dalam merancang kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.

Kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif memerlukan penjabaran yang lebih operasional dalam bentuk program. Terhadap hal ini Dasgupta (2007) menyatakan bahwa desain program pengentasan kemiskinan yang tepat harus memenuhi kriteria berikut: (1) spesifik, artinya suatu program tidak cocok untuk segala situasi dan harus disesuaikan dengan institusi lokal, (2) relevan dengan permasalahan, (3) berbasis sumber daya lokal, (4) memahami konsekuensi yang tidak diinginkan atas pelaksanaan suatu program, (5) didasari oleh kesadaran bahwa kemiskinan adalah suatu situasi sebab akibat, tidak berdiri sendiri.

Chambers *et al.* sebagaimana dikutip oleh Muktasam dan Nurjannah (2011) menyatakan keberhasilan program pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh: (1) kesadaran terhadap nilai-nilai lokal, (2) pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh, serta (3) bersifat pengembangan sumberdaya manusia. Sedangkan faktor-faktor penyebab kegagalan program adalah: (1) pendekatan 'target' dan 'top-down'; (2) bias 'outsiders'; (3) kurangnya partisipasi; (4) pendekatan yang tidak holistik; dan (5) ilusi investasi. Lebih mendasar Bradshaw (2007) menyatakan membantu orang miskin penekanannya adalah kepada penyediaan dukungan dan layanan yang menyeluruh

untuk mencapai "swasembada", sehingga mampu melahirkan kemandirian bagi penerimanya.

Pramanik dalam Hasan dan Khan (2007) menyatakan, agar berhasil, kebijakan dan program pengentasan kemiskinan perlu didukung dengan strategi yang tepat. Terdapat dua jenis strategi yang dapat diterapkan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, yaitu: (a) strategi tidak langsung yang berupa kebijakan makro untuk menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi kemiskinan, dan (b) strategi langsung, yang merupakan kerangka kebijakan mikro berupa penyediaan bantuan yang diperlukan oleh penduduk miskin. Keterpaduan dua strategi ini akan melahirkan kebijakan anti kemiskinan yang efektif.

### Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Zakat adalah mekanisme distribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin yang didukung oleh kewajiban agama. Menurut Bremer, 2013 dalam Ariyani *et al.* (2016), struktur zakat secara eksplisit mendorong terjadinya kesetaraan dan keadilan sosial melalui kedua ujung spektrum pendapatan. Di ujung atas, zakat berfungsi untuk mencegah *overconcentration* dan akumulasi kekayaan yang berlebihan melebihi kebutuhan keluarga pada keluarga-keluarga mampu, sedang pada ujung bawah, zakat menentukan kategori pada populasi masyarakat yang membutuhkan dan seharusnya menerima bantuan. Dalam tatanan sistem ekonomi yang berlaku saat ini zakat menjadi sistem nilai yang berperan dalam mengatasi permasalahan distribusi pendapatan selain pajak dan transfer. Zakat juga merupakan sistem penggerak ekonomi yang akan menginisiasi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai taraf kehidupan yang lebih baik (Damilola, 2015).

Kewajiban mengeluarkan zakat tidak pernah usang baik dari sisi waktu maupun kondisi masyarakat. Kewajiban tersebut

tetap harus dilaksanakan meskipun para penerima zakat telah sejahtera. Konsepsi ini menjadikan zakat sebagai aset dan "dana abadi" yang sangat potensial untuk memerangi kemiskinan (Ali, 2010).

Al-Qardawi dalam Ali (2010) menyatakan pembayaran zakat yang dilakukan oleh seseorang secara tidak langsung akan memberi kebaikan terhadap pembayar zakat itu sendiri, diantaranya perasaan bahagia, yang menurut Andreoni perasaan bahagia ketika memberi disebut *warm glow* sebagaimana dikutip oleh List (2011).

Ali (2010) menyatakan zakat dapat meningkatkan *aggregate demand* dan meningkatkan *capital stock* yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks makro zakat memberi efek terhadap akumulasi kapital melalui peningkatan rasio modal tenaga kerja, meningkatkan potensi ekonomi dan sosial bagi para penerimanya. Untuk itu upaya mentransformasikan zakat dari sebatas nilai dan kewajiban religius menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi perlu dilakukan guna mencapai kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

### **Peran Sektor Swasta dalam Pengentasan Kemiskinan**

Sektor swasta dapat berperan penuh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. (Dobers dan Halme, 2009) Peran tersebut dapat diwujudkan dengan berinvestasi dalam lingkungan sesuai dengan kebijakan bisnis dan kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab kepada seluruh *stakeholder*. Carroll (1979) sebagaimana dikutip oleh Sharma dan Kiran (2013) menyatakan tanggung jawab sosial bisnis meliputi ekspektasi dalam aspek ekonomi, hukum, etika serta organisasi. Pemikiran ini telah melahirkan konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta

perwakilan mereka, keluarga, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat. CSR mempunyai potensi dalam mengurangi dampak negatif keberadaan bisnis terutama dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang kompleks ini.

### **Model Kelembagaan Hybrid**

Semakin terlibatnya masyarakat dan sektor swasta dalam penanganan permasalahan-permasalahan publik memerlukan tata kelola yang lebih baik untuk memfasilitasi berbagai perbedaan yang ada dalam sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. Williamson, 1991 sebagaimana dikutip oleh German (2010) menyatakan bahwa model kelembagaan pemerintah dan swasta berbeda. Model pemerintah sangat *regulated*, terstruktur, dengan aktifitas yang direncanakan (*intentional ordering*), sementara model swasta dicirikan dengan fleksibel dan *spontaneous*. Untuk mengatasi perbedaan di antara ke dua model tersebut serta dalam meningkatkan efektivitas peran masing-masing lembaga, Williamson menyarankan untuk mengkombinasikan keduanya. Model kelembagaan kombinasi ini disebut model *hybrid*.

Altman dan Cochrane (2003) dalam Russell (2011) menyatakan model *hybrid* merupakan model kelembagaan yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang kompleks dimana banyak aktor terlibat, melalui kemampuannya dalam meningkatkan koordinasi dan interdependensi. Hal ini terjadi karena pengaturan model *hybrid (hybrid arrangement)* akan menjadikan sumber daya terkumpul (*pooled resources*) sehingga potensi untuk terselesaikannya permasalahan semakin baik (Menard dan Shirley, 2014).

Menurut Elsner (2004) dalam Proff (2015) model *hybrid* akan memfasilitasi terjadinya *collective learning* di antara berbagai institusi yang rendah dalam koordinasi dan kerjasama. German (2010) menyatakan dengan menerapkan model *hybrid* maka interdependensi antar lembaga akan



muncul melalui koordinasi dan kerjasama yang intensif tanpa menghilangkan otonomi masing-masing. Pemahaman tentang peran dan pendekatan yang koordinatif dalam model *hybrid*, mendorong pihak-pihak dapat membuat kemajuan yang realistis dalam menghadapi kompleksnya tugas-tugas (Mc Kague *et al.* 2015). Pache dan Santos (2013) menyatakan strategi hibrida memungkinkan legitimasi kepada para pemangku kepentingan eksternal tanpa harus terlibat dalam negosiasi yang mahal. Inisiatif penerapan model *hybrid* dalam pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan akan melahirkan program-program komprehensif, berjangka panjang, berkelanjutan dan berfokus pada hasil.

### Metode PROMETHEE

PROMETHEE adalah salah satu metode pembuatan keputusan multikriteria yang semakin populer digunakan oleh peneliti (Keyser dan Peeters, 1996). Metode ini menggunakan konsep *outranking* (urutan) sebagai dasar pengambilan keputusan, dimana urutan ditetapkan berdasarkan prinsip apakah suatu alternatif “mendominasi” atau “didominasi” oleh alternatif lainnya. Suatu alternatif mendominasi ketika melakukan kinerja lebih baik daripada alternatif yang lain setidaknya pada satu kriteria dan tidak lebih buruk pada kriteria lainnya, sedangkan didominasi terjadi jika suatu alternatif melakukan kinerja lebih buruk daripada alternatif yang lain setidaknya pada satu kriteria dan tidak lebih baik pada kriteria lainnya (Hersh, 2006). Dengan mempertimbangkan preferensi pengambil keputusan, metode ini mampu mengantisipasi adanya *bounded rationality* dan *incomplete information* yang dihadapi oleh pengambil keputusan dalam hal informasi, kemampuan kognitif dan waktu Bouyssou dan Perny (1992).

Dibandingkan dengan metode analisis multikriteria yang lain, PROMETHEE merupakan metode yang efisien dengan memberikan interpretasi langsung dari parameter dan hasil analisis sensitivitas

(Amponsah *et al.* 2012; Al-Rashdan *et al.* 1999; Goumas dan Lygerou, 2000). Selain itu, PROMETHEE juga menawarkan konsep dan aplikasi yang sederhana, fleksibel, hasilnya stabil, interpretasinya mudah, serta dapat digunakan untuk mengolah data baik kuantitatif, kualitatif maupun data stokastik (Schwartz dan Göthner, 2009 sebagaimana dikutip oleh Şehitoğlu dan Özdemir, 2013), sedangkan menurut Huylenbroeck (1995) gabungan antara pendekatan fungsi preferensi ELECTRE dan PROMETHEE akan menghasilkan sebuah kerangka kerja yang komprehensif untuk pengambilan keputusan multikriteria yang dapat diterapkan untuk semua jenis masalah baik pada data ordinal atau kardinal.

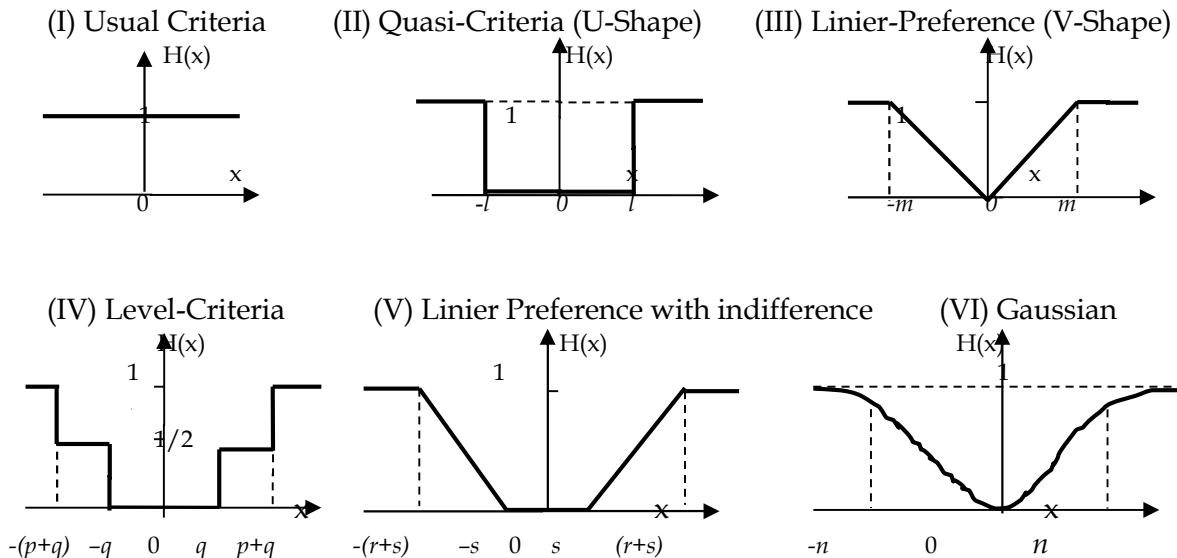
Sebagai pendekatan pengambilan keputusan, PROMETHEE menggunakan kriteria dan skala ukuran yang relevan berdasarkan preferensi pembuat keputusan. Menurut Brans dan Vinke (1985), Hersh (2006) terdapat enam jenis fungsi preferensi mewakili preferensi pengambil keputusan sebagaimana pada Gambar 2. Penentuan tipe preferensi menggambarkan kesesuaian pemilihan parameter yang dicerminkan dalam dua nilai-nilai ambang batas, yaitu: *indifference threshold* dan *preference threshold* (Figuera, Yose, et al, 2005 dalam Wimmmler *et al.* 2015). *Indifference threshold* menggambarkan penyimpangan terbesar antara dua alternatif yang oleh pembuat keputusan dianggap diabaikan, sedangkan *preference threshold* mewakili penyimpangan terkecil antara dua alternatif yang dianggap cukup oleh pembuat keputusan untuk menghasilkan preferensi mutlak (Kangas dan Pykäläinen, 2001 dalam Şehitoğlu dan Özdemir, 2013).

Secara matematis, urutan peringkat pada metode PROMETHEE didasarkan pada besarnya nilai aliran keluar (*leaving flow/ $\Phi^+$* ) dan aliran masuk (*entering flow/ $\Phi^-$* ) (Fauzi, 2015). *Leaving flow* menggambarkan keunggulan alternatif, sementara *entering flow* menggambarkan kelemahan alternatif. Berdasarkan kedua aliran tersebut diper-

oleh dua tipe peringkat yaitu *partial preorder* dan *complete preorder*.

*Partial preorder* atau disebut PROMETHEE I menyatakan bahwa suatu alternatif merupakan alternatif yang lebih baik dibandingkan alternatif lain jika mempunyai aliran keluar lebih tinggi dan aliran masuk

lebih rendah, namun pada kondisi tertentu dapat terjadi *indifference* yaitu jika arus preferensi *leaving flow* dan *entering flow* keduanya sama, dan dalam beberapa kasus aliran preferensi ini tidak selalu menghasilkan informasi yang konsisten (Brans *et al.*, 1986).



**Gambar 2**  
**Tipe-tipe Kriteria PROMETHEE**

Sumber: Brans dan Vinke (1985); Brans, *et al.* (1986); Hersh, 2006

Menyadari adanya kemungkinan inkonsistensi tersebut, maka terdapat PROMETHEE II (*complete preorder*), yang didasarkan pada net flow ( $\Phi_n$ ), yaitu selisih antara leaving flow ( $\Phi^+$ ) dan aliran masuk ( $\Phi^-$ ).  $\Phi_n$  yang lebih tinggi menggambarkan alternatif yang lebih baik. PROMETHEE II akan menghasilkan pemeringkatan yang lengkap dan memvisualisasikan urutan seluruh alternatif sehingga jelas alternatif mana yang mendominasi dan yang didominasi.

Brans *et al.* (1986) menyadari bahwa terdapat kemungkinan bagian informasi relevan yang cukup banyak hilang ketika menentukan *net flow* yang akan mempengaruhi hasil keputusan. Untuk mengatasi persoalan ini ia merekomendasikan untuk menerapkan PROMETHEE I dan PROMETHEE II secara bersamaan guna menentukan keputusan yang tepat.

**Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang program pengentasan kemiskinan pemerintah, zakat dan CSR telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Beberapa penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menegaskan pentingnya penelitian ini dilakukan. Beik (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu solusi alternatif dalam mengurangi kemiskinan, namun, potensi dana yang besar dan peningkatannya dari tahun ke tahun yang cukup baik tidak disertai dengan realisasi dalam pengumpulannya (kurang dari 0,02% dari potensi zakat yang ada) sehingga mengurangi kemampuannya dalam memerangi kemiskinan. Salah satu penyebab dari hal ini adalah banyak diantara masyarakat yang masih mempertahankan pola penyaluran zakat secara tradisional yaitu penyaluran zakat secara

langsung tanpa melalui lembaga zakat.

Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Indonesia menyatakan bahwa program pengentasan kemiskinan memperagakan model kebijakan yang tidak koordinatif dan parsial, baik dalam hal aturan, acuan, kriteria penerima manfaat, dan pengelolannya. Implementasi program pengentasan kemiskinan masih memperlihatkan adanya ego sektoral, *overlapping*, ambiguitas, konflik struktural, dan memicu konflik horisontal di kalangan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muktasam dan Nurjannah (2011) yang berjudul Kajian Kritis Atas Fenomena Dan Program Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Sekitar Hutan Di Pulau Lombok menyatakan bahwa program-program pengentasan kemiskinan pemerintah sebagian besar tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan gagal. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan program diantaranya: tidak ada kegiatan pemantauan, tidak dilanjutkan setelah proyek selesai, tidak ada pembinaan, pengelolaan program kurang optimal, mental pengelola tidak serius membantu, tidak ada hasilnya.

## METODE PENELITIAN

### Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini berupa 3 pola program pengentasan kemiskinan, yakni pola program pemerintah meliputi 11 program, terdiri dari: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Jaminan Kesehatan (Jamkesmas), Program Bantuan Operasi Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), serta PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), PNPM Generasi, dan PNPM Pariwisata. Pola kedua adalah pola program zakat, terdiri dari program-

program zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), program-program zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa, program-program zakat Majelis Amil Zakat (MAZ) Baitussalam dan CSR terdiri dari program CSR PT. Antam, Tbk dan program CSR PT. Pertamina, Tbk.

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, sebagai berikut: (1) diskusi mendalam secara berkelompok dengan metode *world cafe*. Dipandu seorang fasilitator, 24 orang peserta yang terdiri dari pengelola program zakat, konsultan CSR, dosen dan mahasiswa program pascasarjana, berkontribusi dalam diskusi tentang kondisi upaya pengentasan kemiskinan dan criteria evaluasi program pengentasan kemiskinan. Secara berkala peserta berpindah dari suatu meja ke meja yang lain. Perpindahan berlangsung dalam tiga putaran. Perpindahan ini memungkinkan diskusi berlangsung secara silang dan berkembang. Pada sesi akhir, ide-ide utama dan kemungkinan tindak lanjutnya dibahas dan disampaikan dalam forum pleno; (2) wawancara mendalam dengan pengelola program pemerintah, program zakat dan program CSR serta penerima program; (3) melakukan observasi proses pelaksanaan program.

Dari data yang cukup beragam tersebut kemudian diekstraksi untuk memperoleh gambaran yang lebih aktual tentang pelaksanaan pengelolaan program pengentasan kemiskinan eksisting. Untuk keperluan analisis, data hasil ekstraksi kemudian diskoring dengan menggunakan skala kualitatif lima poin (sangat baik-buruk). Hasil skoring menjadi masukan (*entry*) pada *software* PROMETHEE.

### Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi terhadap pola program pengentasan kemiskinan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari sembilan atribut meliputi aspek input, proses dan output. Kriteria pada aspek

input adalah: kualitas data, ketersediaan dana serta kelengkapan program. Kriteria pada aspek proses berupa: rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan orang miskin dari kemiskinannya (*time to exit from poverty*), biaya pengelolaan dan manajemen. Kriteria pada aspek output meliputi: ketepatan sasaran, kepuasan penerima program terhadap waktu penyerahan program dan kepuasan penerima program terhadap proses penerimaan program.

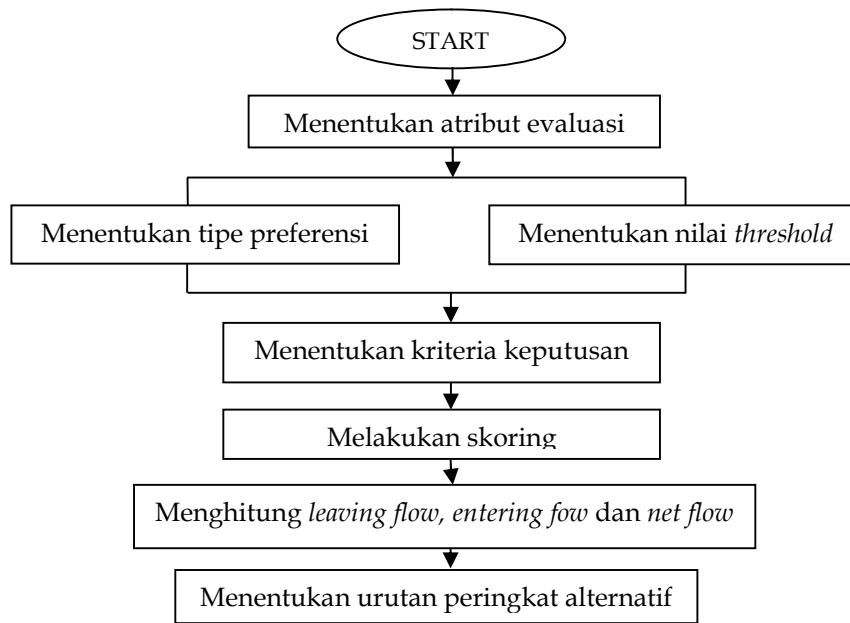
Sesuai prosedur metode PROMETHEE, pada setiap kriteria evaluasi ditetapkan fungsi preferensi dan nilai ambang batas (*threshold*). Mengingat ketersediaan data yang bersifat kualitatif, maka dari ke 6 tipe preferensi hanya tipe “linier” dan “usual” yang digunakan. Guna mendukung proses pengambilan keputusan selanjutnya di-

tetapkan kriteria untuk menetapkan arah tujuan keputusan apakah dimaksimumkan atau diminimumkan. 2 kriteria yaitu waktu yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan dan biaya pengelolaan dinilai dengan kriteria minimum, 7 kriteria yang lain dinilai dengan kriteria maksimum. Gambar 3 menunjukkan entry pada software PROMETHEE yang merangkum hasil skoring, kriteria evaluasi dan fungsi preferensi yang digunakan dalam penelitian ini. Selain ketiga pola program eksisting juga dinilai pola model hybrid sebagai pembandingan.

Secara lengkap tahapan analisis pemeringkatan pola program pengentasan kemiskinan menggunakan metode PROMETHEE sebagaimana pada gambar 4.

Scenario 1	Ketersediaa...	Ketersediaa...	Kelengkapan...	Waktu peng...	Biaya Pengel...	Manajemen	Ketepatan s...	Kepuasan th...	Kepuasan te...	
Unit	5-point	5-point	5-point	5-point	5-point	point	5-point	5-point	5-point	
Cluster/Group	◆	◆	◆	■	■	■	●	●	●	
<b>Preferences</b>										
Min/Max	max	max	max	min	min	max	max	max	max	
Weight	6,25	12,50	6,25	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	
Preference Fn.	Usual	Usual	Usual	Linear	Usual	Usual	Usual	Usual	Usual	
Thresholds	absolute	absolute	absolute	absolute	absolute	absolute	absolute	absolute	absolute	
- Q: Indifference	n/a	n/a	n/a	0,30	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
- P: Preference	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
- S: Gaussian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
<b>Statistics</b>										
Minimum	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Maximum	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Average	2,75	3,50	3,50	3,25	2,75	3,50	3,00	3,25	3,25	
Standard Dev.	0,83	1,12	0,87	1,30	1,30	0,87	1,00	0,83	0,83	
<b>Evaluations</b>										
<input checked="" type="checkbox"/> PROG.PEMERINT...	<input type="checkbox"/>	2,00	4,00	4,00	4,00	5,00	bad	bad	bad	bad
<input checked="" type="checkbox"/> Zakat	<input type="checkbox"/>	3,00	2,00	4,00	2,00	2,00	good	good	good	good
<input checked="" type="checkbox"/> CSR	<input type="checkbox"/>	2,00	3,00	2,00	5,00	2,00	good	bad	average	average
<input checked="" type="checkbox"/> Hybrid	<input type="checkbox"/>	4,00	5,00	4,00	2,00	2,00	good	good	good	good

**Gambar 3**  
**Entri PROMETHEE Evaluasi Pola Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah, Zakat, CSR dan Model Hybrid**



**Gambar 4**  
**Tahapan Analisis Metode Promethee**

#### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

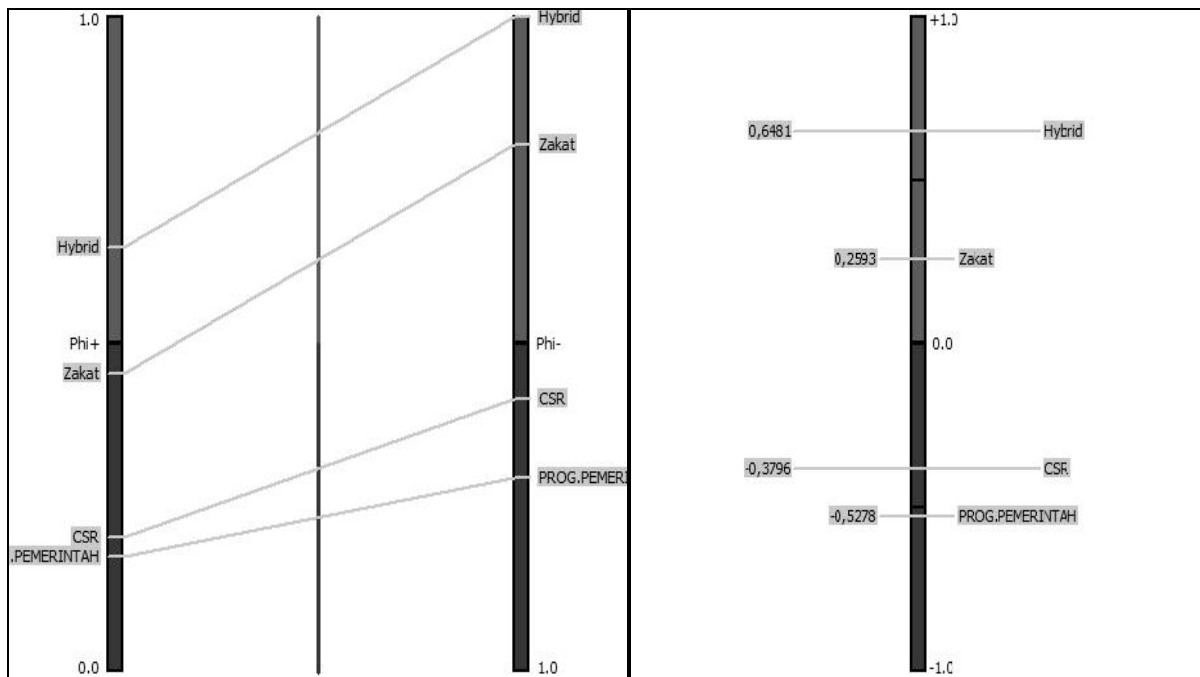
##### Urutan Peringkat Pola Program Pengentasan Kemiskinan

Hasil analisis perbandingan antara pola program pemerintah, pola zakat, pola CSR dan pola model *hybrid* menghasilkan *partial ranking* sebagaimana pada Gambar 5. Pada bar sebelah kiri (Gambar 5 sebelah kiri) menunjukkan urutan peringkat pola program berdasarkan  $\Phi^+$  (*leaving flow*) sedangkan bar sebelah kanan menunjukkan urutan peringkat berdasarkan  $\Phi^-$  (*entering flow*). Atas dasar kedua aliran tersebut, hubungan dominasi preorder parsial (PROMETHEE I) dapat diketahui. Analisis pada  $\Phi^+$  menunjukkan bahwa pola model *hybrid* berada pada peringkat teratas disusul oleh pola zakat, pola CSR pada urutan berikutnya dan disusul kemudian oleh pola program pemerintah pada peringkat terakhir. Analisis pada  $\Phi^-$  menunjukkan urutan tersebut tidak mengalami perubahan. Temuan ini menunjukkan kekuatan dari pola model *hybrid* yang mendominasi pola program lainnya.

Urutan peringkat pada PROMETHEE I didukung pula oleh hasil analisis PROMETHEE II (*complete preorder*). Urutan peringkat

pada PROMETHEE II yang didasarkan pada *net flow*, menjadi kompromi terbaik (*best-compromise solution*) dalam menentukan pemeringkatan. Dari analisis *net flow* diketahui pola model *hybrid* merupakan pola yang mempunyai nilai  $\Phi^n$  paling besar dibandingkan dengan pola program lainnya. Dari temuan ini maka, pola model *hybrid* mendominasi program lainnya. Sementara, pola program zakat berada pada urutan kedua, disusul kemudian oleh pola CSR pada peringkat ke tiga, dan pola program pemerintah yang memiliki *net flow* terendah berada pada peringkat terakhir. Hasil analisis PROMETHEE II menggambarkan bahwa pola model *hybrid* adalah pola program terbaik dibandingkan dengan pola zakat, pola CSR maupun model pemerintah.

Metode PROMETHEE merupakan metode pengambilan keputusan yang komprehensif, selain menentukan hubungan *out-ranking*, juga memberikan ilustrasi tentang kriteria yang menjadi sumber keunggulan dan kelemahan masing-masing pola program. Untuk mengetahui kriteria yang menjadi sumber keunggulan dan kelemahan pola program disajikan Gambar 6.

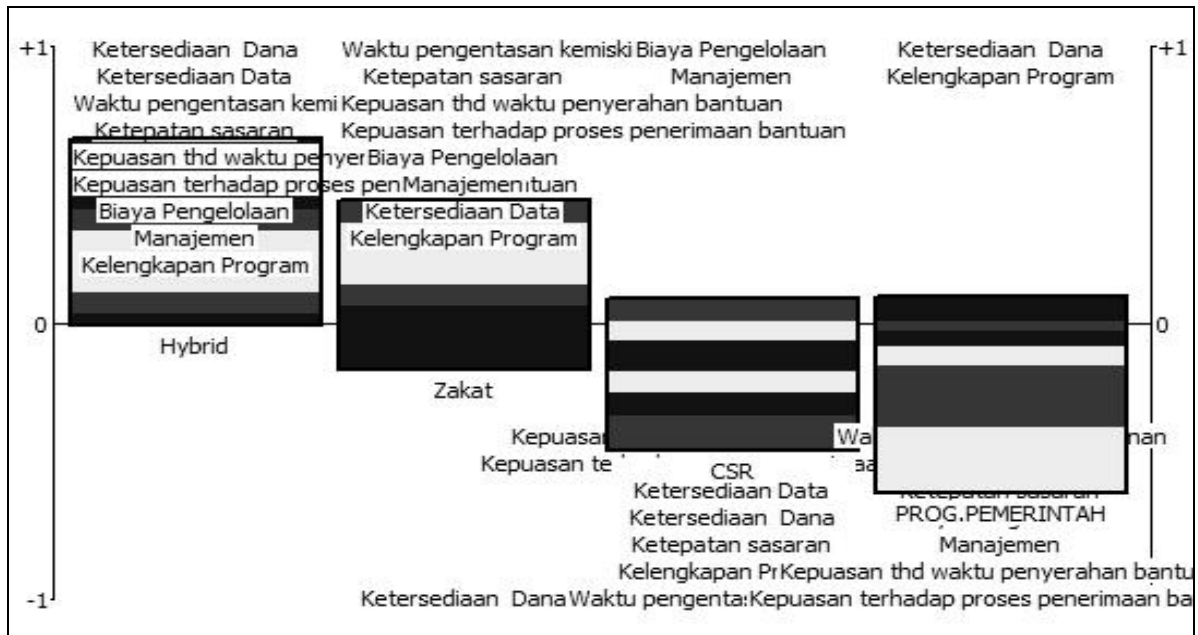


**Gambar 5**  
*Partial Ranking dan Complete Ranking*

Gambar 6 menunjukkan bahwa pola program zakat memiliki keunggulan hampir pada seluruh kriteria evaluasi kecuali pada kriteria ketersediaan dana. Keunggulan pola zakat kemungkinan disebabkan oleh aturan agama yang telah mengarahkan dengan jelas target penerima zakat serta mekanisme pembagian zakat sehingga berdampak terhadap efektivitas manajemen, efisiensi dalam biaya pengelolaan serta waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan mustahik (penerima zakat) dari kemiskinannya. Kelemahan dalam hal dana sangat mungkin disebabkan oleh masih banyaknya pembayar zakat yang membayar zakatnya secara langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga zakat. Temuan tentang kelemahan pola zakat ini menguatkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Beik (2009).

Pola CSR yang berada pada urutan ketiga unggul pada kriteria biaya pengelolaan dan manajemen. Keunggulan pola CSR kemungkinan disebabkan oleh budaya organisasi sektor swasta yang efisien serta

kinerja manajemen yang baik. Pada kriteria lainnya, yaitu: ketersediaan dana, waktu yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan, ketepatan sasaran, dan kelengkapan program. Kelemahan program CSR kemungkinan disebabkan oleh kebutuhan untuk program CSR di wilayah *remote* yang relatif besar dibandingkan dengan ketersediaan dana yang relatif terbatas, sehingga mempengaruhi kualitas serta ragam program yang dirancang. Kelemahan pada kriteria waktu pengentasan yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan serta ketepatan sasaran, sangat mungkin disebabkan oleh fokus perhatian perusahaan terhadap isue pengentasan kemiskinan yang relatif masih rendah pada lembaga perusahaan, terkesan hanya memenuhi aturan dan perundangan meskipun ada potensi peningkatan kesadaran dari waktu ke waktu. Pendistribusian program CSR hanya kepada calon penerima yang menyerahkan proposal saja, juga menjadi alasan kuat rendahnya kinerja CSR pada ketepatan sasaran.



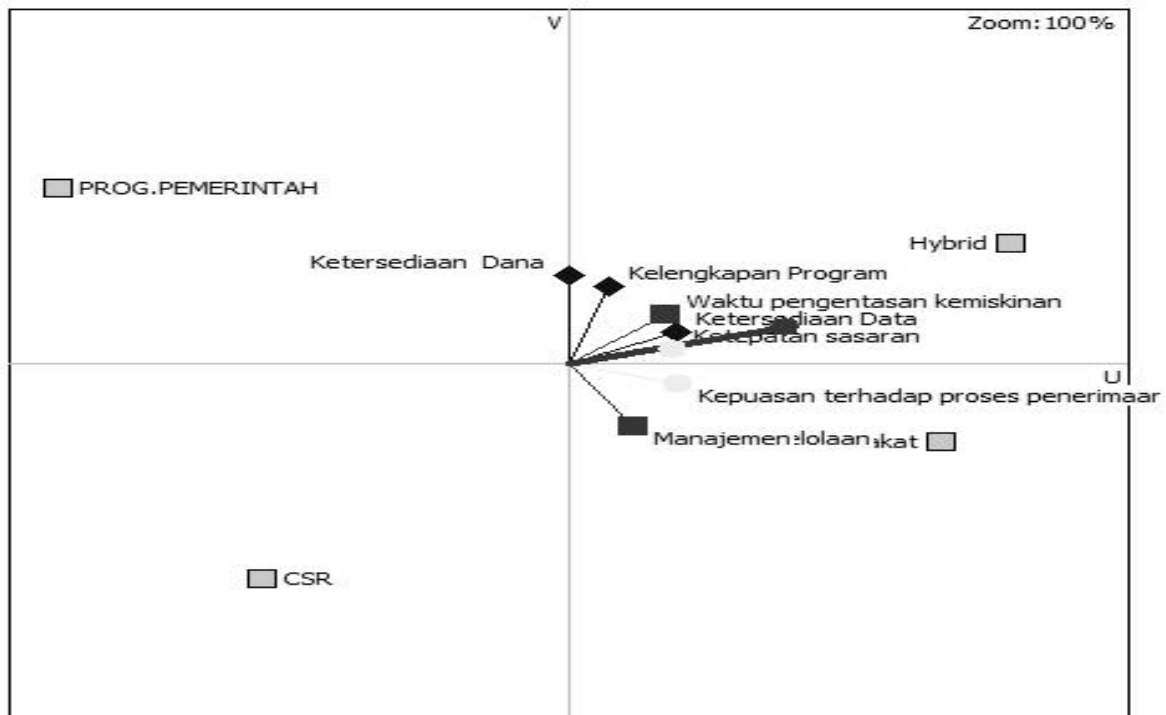
**Gambar 6**  
**Kontribusi Atribut yang Menentukan Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan**

Pola program pemerintah mempunyai keunggulan dalam kriteria kelengkapan program dan ketersediaan dana. Keunggulan pola program pemerintah kemungkinan terutama disebabkan oleh ketersediaan anggaran belanja negara untuk pengentasan kemiskinan yang cukup besar sehingga dapat dirancang berbagai program yang sangat lengkap. Sementara itu beberapa atribut menjadi sumber kelemahan program pemerintah yaitu: biaya pengelolaan, manajemen, ketepatan sasaran, kepuasan terhadap waktu penyerahan program, kepuasan terhadap proses penerimaan program, ketersediaan data, serta waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan si miskin dari kemiskinan. Temuan ini menguatkan hasil-hasil penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2013 dan Muktasam dan Nurjannah pada tahun 2011.

Pola model *hybrid* yang merupakan model kombinasi dari pola program yang ada (eksisting) memiliki keunggulan pada seluruh kriteria, yakni waktu pengentasan

kemiskinan yang cepat, ketersediaan data, ketersediaan dana, kelengkapan program, biaya pengelolaan, kepuasan terhadap waktu penyerahan program, manajemen, ketepatan sasaran, serta kepuasan terhadap proses penerimaan program. Temuan tentang keunggulan pola model *hybrid* ini sesuai dengan pernyataan para peneliti terdahulu tentang model *hybrid* yang menjadi alternatif terbaik model kelembagaan tatkala berhadapan dengan banyak aktor yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan yang kompleks (German, 2010; Proff, 2015; Menard dan Shirley, 2014).

Gambar 7 selanjutnya memberikan gambaran opsi pola program dalam bidang tiga dimensi berdasarkan aksis kriteria. Seperti terlihat pada Gambar 7 tersebut, pola *hybrid* mempunyai keunggulan pada kriteria: kelengkapan program, waktu yang diperlukan dalam pengentasan kemiskinan, ketersediaan data, dan ketepatan sasaran, sedangkan pola program zakat yang berada dekat dengannya unggul pada kriteria kepuasan terhadap proses penerimaan program dan manajemen. Pola program zakat yang berada dalam kuadran



**Gambar 7**  
**Proyeksi Opsi Pengembangan Pola Program**  
**Pengentasan Kemiskinan dalam Aksis Atribut**

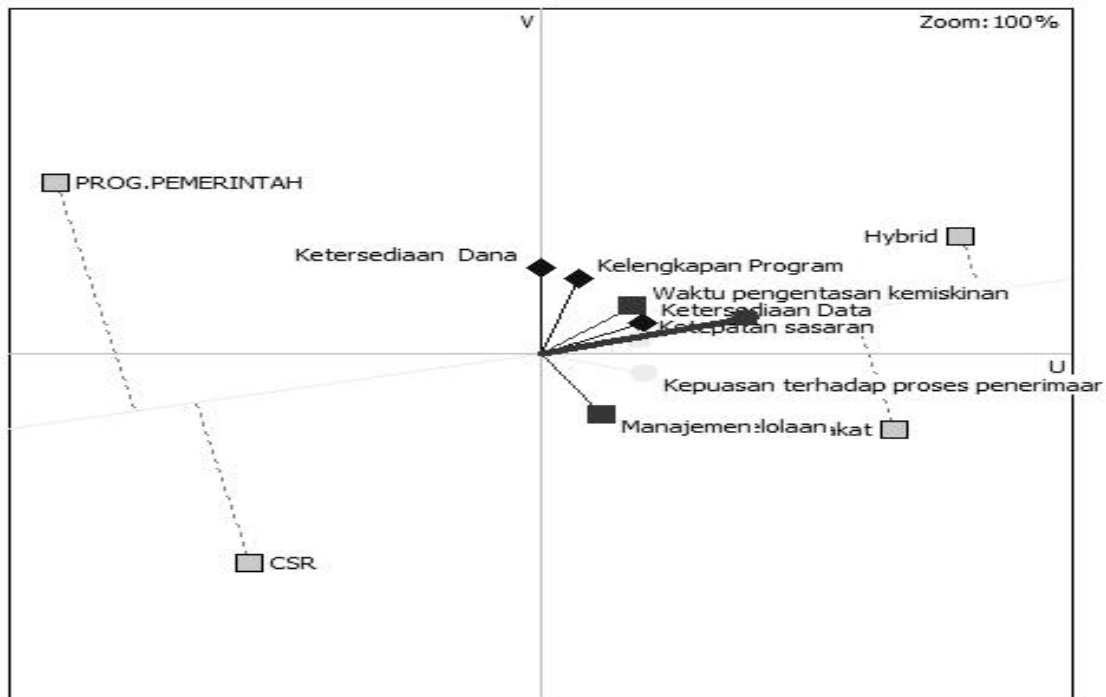
yang dekat dengan pola *hybrid* menunjukkan keduanya hampir memiliki karakter yang sama. Di sisi lain pola program pemerintah dan pola program CSR kurang berada dalam kluster yang sama. Pada kuadran dimana pola program pemerintah berada, terlihat kriteria ketersediaan dana menunjukkan sebagai sumber keunggulan, sementara pola program CSR pada analisa ini tidak mempunyai keunggulan. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi arah pengembangan model program pengentasan kemiskinan di masa yang akan datang.

Gambar 8 mempertegas posisi opsi terhadap proyeksi pengembangan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. Pada Gambar 8 terlihat pola *hybrid* lebih dekat pada proyeksi ketepatan sasaran dibandingkan jarak proyeksi yang jauh, sebagaimana pola program pemerintah maupun pola program CSR. Jarak proyeksi terdekat berikutnya adalah skema pola program zakat. Meskipun jarak pola program CSR relatif agak jauh dengan ke-

tepatan sasaran, namun dikarenakan pola manajemen yang baik, kesadaran yang semakin tinggi dari perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, serta wilayah operasi yang relatif terbatas memungkinkan skema program dengan pola CSR akan lebih mudah menyesuaikan dalam merancang program yang tepat sasaran. Sementara untuk pola program pemerintah berada pada posisi yang berjarak paling jauh dengan aksis ketepatan sasaran sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menuju ke pola model *hybrid* memerlukan upaya yang cukup keras dibandingkan dengan pola lainnya agar berhasil.

Analisis selanjutnya untuk menunjukkan keunggulan masing-masing pola program, dilakukan dengan menggunakan peta RADAR sebagaimana terlihat pada Gambar 9, pola model *hybrid* hampir unggul pada seluruh kriteria. Hal ini ditunjukkan oleh radar yang melebar ke luar. Pola program zakat unggul pada kriteria kelengkapan program, ketersediaan data, kepuasan ter-





**Gambar 8**  
**Proyeksi Opsi Program Pengentasan Kemiskinan**  
**terhadap Krteria Ketepatan Sasaran**

hadap waktu penyerahan program, waktu untuk pengentasan kemiskinan, ketepatan sasaran dan manajemen. Pola CSR unggul pada kriteria ketersediaan dana, manajemen dan kepuasan terhadap proses penerimaan program. Pola program pemerintah unggul pada kriteria ketersediaan dana, kelengkapan program, ketersediaan data dan ketepatan sasaran.

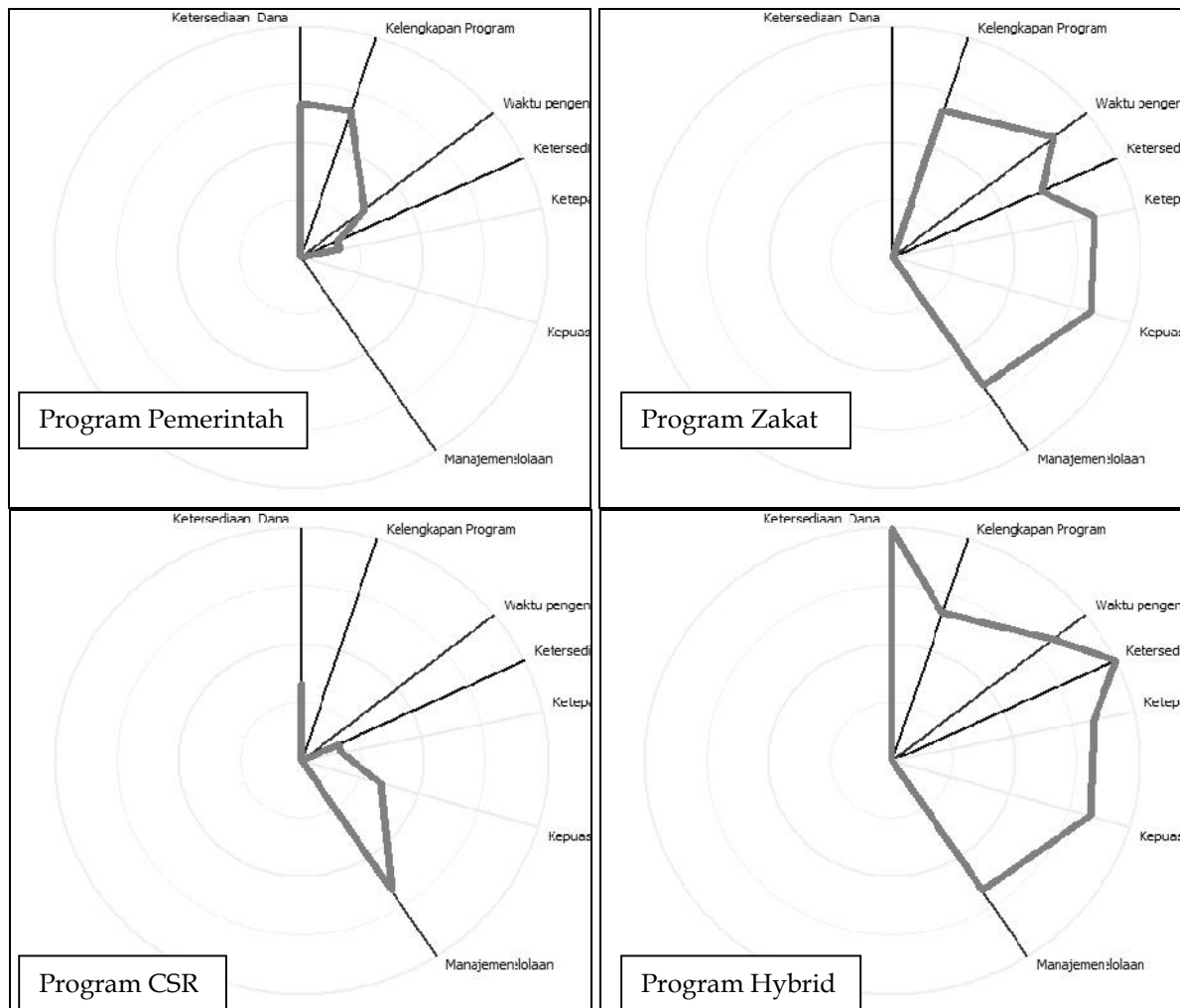
#### Analisis Sensitifitas

Bobot yang ditetapkan pada kriteria evaluasi mencerminkan prioritas pembuat keputusan. Mengingat tujuan yang berbeda, bobot pada satu kriteria dapat berbeda antara satu pembuat keputusan dengan pembuat keputusan yang lain. Metode PROMETHEE tidak memberikan pedoman khusus dalam penentuan bobot ini, namun adanya *bounded rationality* dan *incomplete information* pada pembuat keputusan dapat mengakibatkan hasil pemeringkatan menjadi kurang stabil. Dalam rangka menilai ketahanan hasil pemeringkatan yang diperoleh dari algoritma PROMETHEE perlu

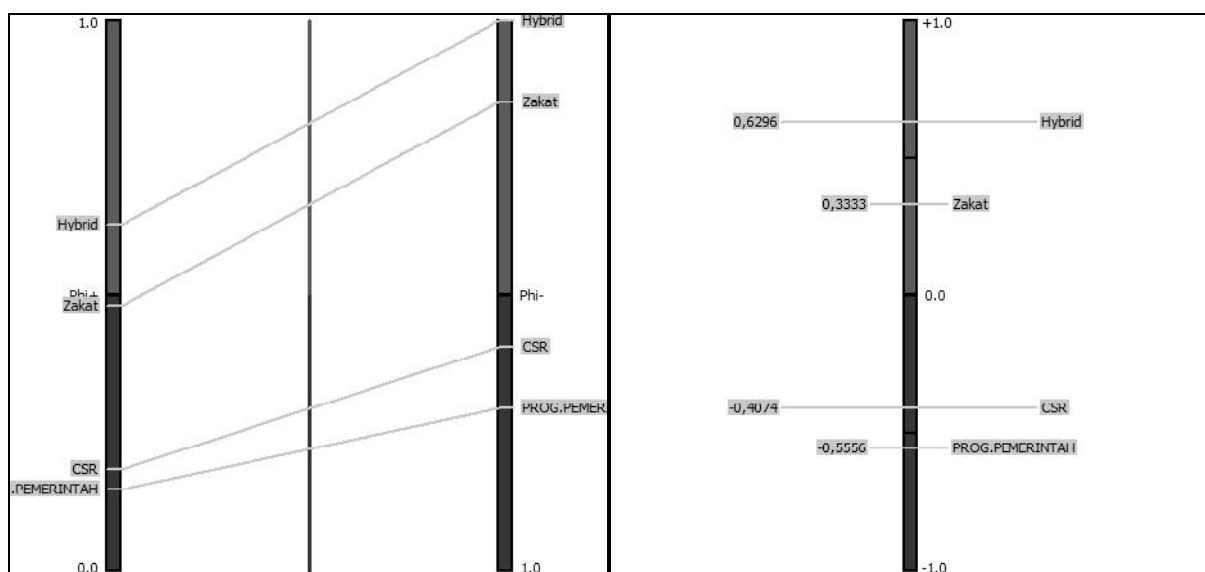
dilakukan uji sensitivitas (Schwartz dan Göthner, 2009 dalam Şehitoğlu, Y., Özdemir, O.C. 2013). Uji ini untuk mengetahui pengaruh variasi bobot kriteria pada hasil akhir pemeringkatan.

Hasil pemeringkatan dikatakan mempunyai ketahanan yang baik (*robust*) apabila variasi bobot tidak menyebabkan urutan peringkat mengalami perubahan.

Untuk menguji hasil pemeringkatan PROMETHEE II yang menggunakan bobot *walking weight (default)*, dilakukan manipulasi terhadap bobot kriteria dengan menggunakan bobot *equal*. Hasil pemeringkatan dengan perubahan bobot ini menunjukkan tidak adanya perubahan urutan hasil PROMETHEE II sebagaimana terlihat pada Gambar 10. Dengan demikian urutan peringkat pola program yang menetapkan pola *hybrid* pada urutan pertama, diikuti oleh pola zakat pada urutan kedua, pola CSR pada urutan ketiga dan pola program pemerintah yang berada pada urutan terakhir merupakan pemeringkatan yang *robust*.



**Gambar 9**  
Peta Radar Pola Program dalam Aksis Atribut



**Gambar 10**  
Perbandingan Hasil Urutan Pola Program dengan Bobot Kriteria Default dan Equal

## SIMPULAN dan SARAN

### Simpulan

Hasil pemeringkatan terhadap pola program pemerintah, pola zakat, pola CSR dan pola model *hybrid*, menempatkan pola *hybrid* berada pada peringkat pertama baik pada *partial ranking* maupun *complete ranking*. Temuan ini menunjukkan bahwa pola model *hybrid* yang merupakan model kombinasi dari berbagai pola program-program eksisting merupakan pola program pengentasan kemiskinan terbaik.

Pola model *hybrid* menunjukkan keunggulan pada seluruh aspek yang dianalisis. Dibandingkan dengan pola model *hybrid*, pola zakat lemah dalam aspek ketersediaan dana namun unggul pada seluruh aspek yang dianalisis. Pola program pemerintah hanya unggul pada kriteria ketersediaan dana dan kelengkapan program, sedangkan pola CSR unggul pada kriteria manajemen dan pencapaian target.

Hasil pemeringkatan ini memberi gambaran yang jelas bagi pengambil kebijakan bahwa pola pengentasan kemiskinan secara parsial yang dilaksanakan selama ini kurang menjamin efektivitas upaya pengentasan kemiskinan. Sebaliknya model *hybrid* yang merupakan perwujudan dari pola kombinasi dan partisipatif merupakan alternatif terbaik. Pola model *hybrid* akan menjamin terjadinya koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan yang selama ini lemah. Penerapan pola model *hybrid* akan mewujudkan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

### Saran

Berdasar pada simpulan penelitian, saran-saran sebagai implikasi dari penelitian ini terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Menanggapi kemiskinan yang multidimensional, maka kriteria keberhasilan program pengentasan kemiskinan harus komprehensif. Tidak hanya meliputi kecukupan dan penyerapan anggaran

atau berkurangnya jumlah orang miskin, namun kebijakan yang terkait dengan aspek data dan kualitas program pada sisi input, aspek waktu yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan, biaya pengelolaan serta manajemen pada sisi proses, serta aspek ketepatan sasaran, kepuasan terhadap waktu penerimaan program dan kepuasan terhadap proses penerimaan program menjadi variabel yang krusial untuk diaplikasikan. Dari sini, maka aspek hulu dari kebijakan menjadi penting sebagai indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana terlihat pada analisis metode Promethee, bentuk preferensi pengambilan keputusan akan berimplikasi pada perlunya semacam *threshold* atau ambang batas dalam penentuan kriteria evaluasi program pengentasan kemiskinan yang dapat ditoleransi baik oleh penyedia, pengguna maupun pengelola. Pola model *hybrid* sebagai pola terbaik memberikan implikasi terhadap pentingnya lembaga atau institusi alternatif yang dapat mensinergikan keunggulan-keunggulan dari pola program yang ada. Kebijakan yang mendorong pengembangan institusi ini harus diinisiasi oleh pemerintah pusat dengan *political will* dan politik anggaran yang kuat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, N., A. Fauzi., B. Juanda dan I. S. Beik. 2015. Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 6(2) :181-197.
- Ariyani, N., A. Fauzi., B. Juanda dan I. S. Beik. 2016. A Policy Scenario Modeling of Poverty Alleviation Program in Indonesia: An application of Promethee Method. *Issues in Business Management and Economics* 4(6): 54-62.
- Ali O. N. 2010. The Consequences of Zakat for Capital Accumulation. *Journal of Public Economic Theory* 12: 837- 856.
- Al'Rashdan, D., B. Al'Kloub., A. Dean dan T. Al'Shemmeri. 1999. Environmental Impact Assessment and Ranking the Environmental Projects in Jordan.

- European Journal of Operational Research* 118:30-45.
- Amponsah, S., F. Darkwah dan A.Inusah. 2012. Logistic Preference Function for Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE) Decision Analysis. *African Journal of Mathematics and Computer Science Research* 5(6): 112-119.
- Behzadian, M., R. B. Kazemzadeh., A. Albadvi dan M. Aghdas. 2010. PROMETHEE: A Comprehensive Literature Review on Methodologies and Applications. *European Journal of Operational Research* 200: 198-215.
- Beik, I.S. 2009. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan* II: 1-11.
- Bouyssou, D., dan P. Perny. 1992. Ranking Methods for Valued Preference Relations: A Characterization of a Method Based on Leaving and Entering Flows", *European Journal of Operational Research* 61: 186-194.
- BPS. 2015. Data Kemiskinan 2015. www.bps.go.id.
- Bradshaw, T. K. 2007. Theories of Poverty and Anti-Poverty Programs in Community Development. *Journal of the Community Development Society* 38(1): 7-25.
- Brans, J. P., P. Vincke. 1985. A Preference Ranking Organisation Method: (The PROMETHEE Method for Multiple Criteria Decision-Making). *Management Science Journal* 31(6): 647-656.
- Brans, J. P., P. Vincke dan B. Mareschal. 1986. "How to Select and to Rank Projects: The Promethee Method". *European Journal of Operational Research* (24): 228-238.
- Damilola, O. W., B. A. Nassir dan S. H. Baba. 2015. The Role of Zakat as A Poverty Alleviation Strategy and a Tool for Sustainable Development: Insight from The Perspectives of The Holly Prophet. *Arabian Journal of Business and Management Review* 5(3): 8-17.
- Dasgupta, P. 2007. Poverty Trap-Exploring the Complexity of Causation. 2020 Focus Brief on the World's Poor and Hungry People. <https://core.ac.uk/download/pdf/6345283.pdf>.
- Dobers, P. dan M. Halme. 2009. Corporate Social Responsibility and Developing Countries. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 16(5): 237-249.
- Dolles, V. 2010. Analisis Kelembagaan Dalam Pengembangan Program Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota (Studi Kasus Penanggulangan Kemiskinan di Kota Depok). *Skripsi*. Insititut Pertanian Bogor.
- Fauzi, A. 2012. "Model Pemberdayaan Masyarakat". Paper disampaikan pada Seminar Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan: Bandung 27 September 2012.
- Fauzi, A. 2015. Pengembangan Rencana Bisnis Jasa Lingkungan Di Lombok Nusa Tenggara Barat. Paper disampaikan pada Seminar WWF: Lombok: 27 Mei 2015.
- German, L. A. 2010. "Hybrid Institution": Applications of Common Property Theory Beyond Discrete Tenure Regimes. *International Journal of the Commons* 4(1): 571-596.
- Goumas, M. dan V. Lygerou. 2000. An Extension of the PROMETHEE Method for Decision Making in Fuzzy Environment: Ranking of Alternative Energy Exploitation Projects. *European Journal of Operational Research* 123: 606-613.
- Huylenbroeck, G. V. 1995. The Conflict Analysis Method: Bridging the Gap Between ELECTRE, PROMETHEE and ORESTE. *European Journal of Operational Research* 81: 500-511.
- Hassan, M. K. dan J. M. Khan. 2007. Zakat, External Debt and Poverty Reduction

- Strategy in Bangladesh. *Journal of Economic Cooperation* 28(4): 1-38
- Hersh, M. 2006. *Mathematical Modelling for Sustainable Development*. Springer, Germany.
- Khan, A. U., A. Saboor dan Hussain, A. 2014. Investigating Multidimensional Poverty across the Regions in the Sindh Province of Pakistan. *Social Indicators Research* 119(2):515-532.
- Keyser, W., D. K dan P. Peeters. 1996. A Note on the Use of PROMETHEE Multicriteria Methods. *European Journal of Operational Research* 89: 457-461.
- Korankye, A. A. 2014. Causes of Poverty in Africa: A Review of Literature. *American International Journal of Social Science* 3(7):147-153.
- List, A. J. 2011. The Market for Charitable Giving. *Journal of Economic Perspectives* 25(2): 157-180.
- Mc Kague, K., D. Wheeler dan Karnani, A. 2015. *An Integrated Approach to Poverty Alleviation: Roles of the Private Sector, Government and Civil Society*. Springer International Publishing Switzerland.
- Menard, C. dan M. M. Shirley. 2014. The Future of New Institutional Economics: From Early Institution to a New Paradigm. *Journal of Institutional Economics* 10(4): 541-565.
- Mubarok, A. dan B. Fanani. 2014. Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *Permana* V(2): 7-16.
- Muktasam, M. dan S. Nurjannah. 2011. Kajian Kritis Atas Fenomena Dan Program Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Sekitar Hutan Di Pulau Lombok. *Laporan Penelitian*. LIPI. Jakarta.
- Pache, A. C and F. Santos. 2013. Inside the Hybrid Organization: Selective Coupling as a Response to Competing Institutional Logics. *Academy of Management Journal* 56(4): 972-1001.
- Proff, S. 2015. The Microeconomics of Complex Economies: Evolutionary, Institutional, Neoclassical, and Complexity Perspectives, by Wolfram Elsner, Torsten Heinrich, and Henning Schwardt. Oxford, UK: Academic Press, 2014. *Journal of Economic Issues* 49(1): 297-299.
- Pusat Studi Sosial Asia Tenggara-UGM. 2014. Evaluasi Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Indonesia. *Press Release*.
- Russell, S. 2011. *The Hybrid Economy Topic Guide*. Centre For Aboriginal Economic Policy Research. The Australian National University (ANU). <http://www.caepr.anu.edu.au/>
- Sameti, M., R. D. Esfahani dan H. K. Haghghi. 2012. Theory of Poverty: A Comparison Analysis. *Journal of Business and Management Review* 1(6):45-56.
- Şehitoğlu, Y., O. C. Özdemir. 2013. The Impact of Business Incubation on Firm Performance During Post Graduation Period-Turkey Example. *British Journal of Arts and Social Sciences* 12(1): 171-190.
- Shaffer, P. 2008. New Thinking on Poverty: Implications for Globalisation and Poverty Reduction Strategies. *Real World Economics Review* 47(3):192-231.
- Sharma, A., R. Kiran. 2013. Corporate Social Responsibility: Driving Forces and Challenges. *International Journal of Business Research and Development* 2(1):18-27.
- The Economist. 2008. *Special Report Corporate Social Responsibility*. Jan 17th 2008. The Economist-Print Edition.
- Wimmler, C., G. Hejazi., D. O. Fernandes., C. Moreira and S. Connors. 2015. Multi-Criteria Decision Support Methods for Renewable Energy Systems on Islands. *Journal of Clean Energy Technologies* 3(3): 185-195.

## PENGARUH PERUBAHAN STATUS, *EMPLOYEE ENGAGEMENT*, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN

**Nani Yuheti Yuniatin**

*nyuniatinipb@gmail.com*

**Noer Azam Achsani**

**Hendro Sasongko**

**Magister Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB IPB) Bogor**

### ABSTRACT

*This study aimed to examine the effect of changes in status, employee engagement, and the utilization of information technology on the quality of financial reporting. Analysis of variance (ANOVA) was used to examine changes in the status of Bogor Agricultural University. Moreover we employ a multiple regression analysis to examine the effect of employee engagement and information technology in performance financial of report. In addition, Utrecht Work Engagement Scale (UWES) was used to examine the financial human resource mapping. The results of ANOVA test showed that there was no significant difference of the financial management of Bogor Agricultural University before and after the implementation of Public Service Board (BLU). Furthermore, multiple linear regression test results showed that the factors that affect the performance of financial reports are employee engagement and use of information technology. However, it is found that the factor that really affects the performance of financial reports is the use of information technology. Finally, the test results of the mapping showed that employee engagement of human resources staff of Bogor Agricultural University are in medium position indicating that it needs to be maintained and improved.*

*Key words: change of status, employee engagement, use of information technology, financial report punctuality.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan status, *employee engagement*, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan. *Analysis of variance* (ANOVA) digunakan untuk menguji perubahan status IPB. Adapun penerapan analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh *employee engagement* dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan. *Utrecht Work Engagement Scale* (UWES) digunakan untuk memetakan SDM keuangan. Hasil pengujian ANOVA menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan IPB tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah *employee engagement* dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, faktor yang benar-benar memengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Hasil pengujian dari pemetaan SDM keuangan membuktikan bahwa *employee engagement* SDM keuangan Institut Pertanian Bogor berada dalam posisi sedang, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Kata kunci: Perubahan status, *employee engagement*, pemanfaatan teknologi informasi, ketepatan waktu pelaporan keuangan.

### PENDAHULUAN

Isu penting pendidikan tinggi saat ini adalah persoalan tata kelola perguruan tinggi yang kerap dikaitkan dengan isu

komersialisasi dan privatisasi. Tata kelola perguruan tinggi yang baik atau *Good University Governance* (GUG) diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah

satu prinsip dari GUG adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin besar tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas, semakin besar kebutuhan akan transparansi keuangan. Hal ini juga berlaku bagi Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai salah satu institut yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi untuk menciptakan kredibilitas dari suatu laporan keuangan. Lismawati (2011) menyatakan pengguna laporan keuangan yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan publik, tidak akan ragu untuk berbagi kepentingan penggunaannya jika hal tersebut telah terpenuhi.

Status kelembagaan IPB berdasarkan PP Nomor 154 Tahun 2000 ditetapkan sebagai perguruan tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Kemudian Pemerintah menerbitkan PP Nomor 66 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan IPB dan 6 universitas lainnya menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Pemerintah memberlakukan beberapa organisasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai BLU ditujukan untuk mendorong PTN tersebut melakukan pembangunan sistem informasi akuntansi baru (Maharani *et al.* 2013). Status BLU diterapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Menurut Waluyo (2011), fleksibilitas yang dimiliki BLU dalam pengelolaannya yaitu pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang dan piutang, investasi, pengadaan barang dan jasa, dan akuntansi. Saat ini, IPB sedang dalam proses masa transisi menjadi PTN Badan Hukum (BH).

Permasalahan yang sangat penting dalam penyajian laporan keuangan adalah bagaimana menentukan kebijakan akun-

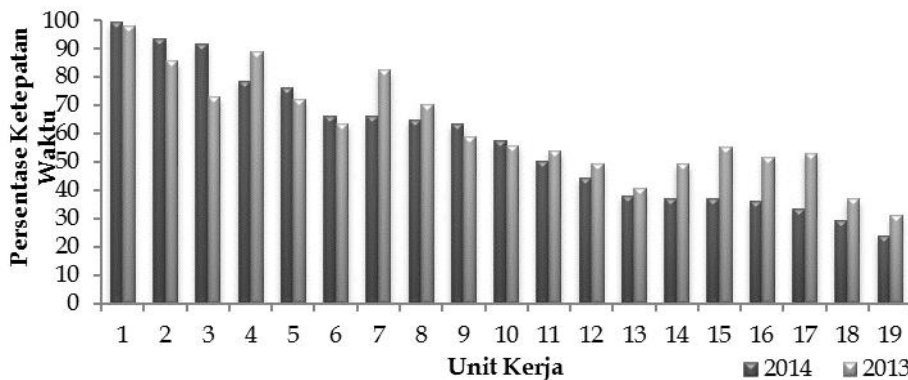
tansi, perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi, pilihan akuntansi, dan menganalisis sistem akuntansi yang ada (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 2006). Berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP), diketahui bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan pengelolaan keuangan IPB di antaranya: (1) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) keuangan yang berkompeten di bidang akuntansi yang terlibat dalam proses pembuatan laporan keuangan, dan (2) pemanfaatan teknologi informasi yang belum terintegrasi dalam suatu sistem yang mendukung proses pembuatan laporan keuangan. Kinerja SDM merupakan salah satu faktor yang perlu ditingkatkan untuk mensukseskan sebuah organisasi. Dengan melakukan pengelolaan SDM yang baik, maka akan menghasilkan *output* yang baik pula bagi perusahaan (Markos dan Sridevi 2010). Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, tanpa dukungan SDM yang handal, pelaksanaan kegiatan tidak akan terselesaikan dengan baik (Yunus 2012). Selain itu, berdasarkan hasil rekapitulasi data sistem aplikasi keuangan, dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa unit kerja di IPB yang belum melakukan input data transaksi keuangan ke dalam sistem aplikasi keuangan secara tepat waktu (Gambar 1 dan Gambar 2).

Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi untuk menciptakan kredibilitas dari suatu laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah harus memiliki karakteristik: relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*).

Penilaian laporan keuangan dapat dilakukan dengan menguji sebagian atau keseluruhan dari karakteristik tersebut. Karakteristik yang sering diuji adalah karakteristik dapat dibandingkan (*compara-*

bility) dan relevan (relevance). Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Sementara itu, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif (predictive value),

tepat waktu (timeliness), dan lengkap (complete). Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik dasar yang telah ditentukan, salah satunya adalah ketepatan waktu. Shulthoni (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan.

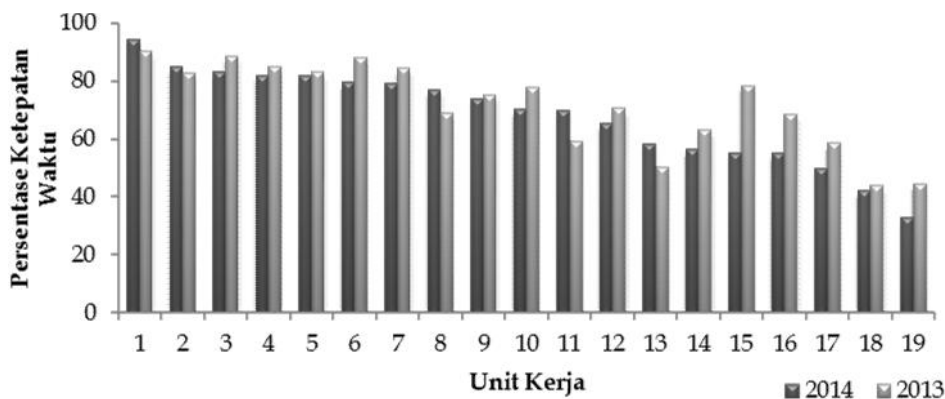


Keterangan: 1. Direktorat Sumber Daya Manusia, 2. Sekretariat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, 3. Direktorat Pengembangan Bisnis, 4. Direktorat Keuangan, 5. Kantor Hukum, Promosi, dan Humas, 6. Sekretariat Rektor, 7. Kantor Manajemen Mutu, 8. Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi, 9. Direktorat Sarana dan Prasarana, 10. Sekretariat Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis, 11. Direktorat Kemahasiswaan, 12. Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik, 13. Direktorat Pengembangan Karier dan Hubungan Alumni, 14. Kantor Audit Internal, 15. Sekretariat Institut, 16. Direktorat Kerjasama dan Program Internasional, 17. Direktorat Administrasi Pendidikan, 18. Direktorat Riset dan Kajian Strategis, 19. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan)

Sumber: SIMKEU IPB

Gambar 1

Grafik persentase ketepatan waktu beberapa Kandir IPB Tahun 2013-2014



(Keterangan: 1. Departemen Statistika, 2. Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), 3. Manajemen Bisnis, 4. Dekanat Fahutan, 5. Dekanat Sekolah Pascasarjana, 6. Departemen Matematika, 7. Dekanat FMIPA, 8. Departemen Geofisika dan Meteorologi, 9. Departemen Manajemen Hutan, 10. Departemen Biokimia, 11. Departemen Hasil Hutan, 12. Departemen Fisika, 13. Departemen Ilmu Komputer, 14. Diploma, 15. Departemen Silviculture, 16. Departemen Kimia, 17. Tingkat Persiapan Bersama (TPB), 18. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, 19. Departemen Biologi)

Sumber: SIMKEU IPB

Gambar 2

Grafik persentase ketepatan waktu beberapa Fakdep IPB Tahun 2013-2014



Adanya perubahan status kelembagaan IPB, diduga akan mengubah pola pengelolaan keuangan IPB. Kegiatan membandingkan pola pengelolaan keuangan IPB sebelum dan sesudah perubahan status dari BHMN menjadi BLU merupakan satu langkah pengujian karakteristik pelaporan keuangan, yakni dapat dibandingkan (*comparability*). Sementara itu, analisis ketepatan waktu yang dikaitkan dengan *employee engagement* dan teknologi informasi dilakukan sebagai gambaran karakteristik relevan (*relevance*). Ketidaksiplinan SDM keuangan dalam menginput data yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan keuangan menunjukkan bahwa *employee engagement* masih rendah. Guntari *et al.* (2014) menyatakan *employee engagement* merupakan salah satu komponen penting dalam perusahaan dan merupakan aset yang sangat berharga. *Employee engagement* merupakan salah satu pengelolaan manajemen SDM. Produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya *employee engagement* (Hanim *et al.* 2014), oleh karena itu, SDM keuangan IPB perlu melakukan pengukuran *employee engagement* untuk meningkatkan produktivitas kinerja SDM keuangan (Rachmawati 2010). Terkait dengan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis perbedaan pola pengelolaan keuangan IPB sebelum dan sesudah status BLU, pengaruh *employee engagement* dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan tingkat *employee engagement* SDM keuangan di IPB.

## TINJAUAN TEORETIS

### Laporan Keuangan

Menurut Harjito dan Martono (2012), laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik memegang peranan

penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Nordiawan (2008) menyatakan semakin besar tuntutan akan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik, maka kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik juga semakin besar. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik.

### Kualitas Laporan Keuangan

Menurut PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan dalam memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

Pertama, relevan (*relevance*). Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan, yaitu: a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu, b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan, d) Lengkap (*complete*). Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam

penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Kedua, andal (*Reliability*). Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu: a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan, b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh, c) Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Ketiga, dapat dibandingkan (*comparability*). Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Keempat, dapat dipahami (*understandability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas

pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### **Ketepatan Waktu (*Timeliness*) Pelaporan Keuangan**

Menurut Noviani (2007), ketepatan waktu didefinisikan sebagai suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atau kemampuannya untuk mengambil keputusan. Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (PP Nomor 24 Tahun 2005). Konstruk nilai informasi ketepatan waktu diukur dengan indikator: (1) *Timeliness* merupakan indikator yang menggambarkan bahwa informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta; (2) sistematis waktu merupakan indikator untuk menggambarkan bahwa laporan-laporan disediakan secara sistematis dan teratur (triwulan, semester, dan tahunan); dan (3) sistematis unsur merupakan indikator untuk menggambarkan bahwa laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur antara unsur-unsur laporan keuangan yang meliputi laporan aktivitas/operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

### **Analisis Rasio Laporan Keuangan**

Menurut Hery (2015), analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Menganalisis laporan keuangan berarti menilai kinerja perusahaan, baik

secara internal maupun untuk membandingkan dengan perusahaan lain yang berada dalam industri yang sama. Hal ini berguna bagi perkembangan perusahaan dengan mengetahui seberapa efektif operasi perusahaan telah berjalan. Analisis laporan keuangan sangat berguna tidak hanya bagi internal perusahaan saja, tetapi juga bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Analisis rasio laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari rasio aktivitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Menurut Hery (2015) rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, termasuk untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang.

### **Employee Engagement**

*Employee engagement* menjadi suatu hal yang hangat dibicarakan saat ini. Peran penting *employee engagement* sangat membantu suatu organisasi dalam mencapai keunggulan kompetitif. *Employee engagement* diyakini sebagai preditor kesuksesan pada level individu maupun organisasi. Beberapa penelitian menyebutkan karyawan yang *engage* lebih produktif dalam kinerjanya, memberikan layanan yang terbaik bagi *customer*-nya, lebih sedikit untuk jumlah ketidakhadirannya, dan lebih loyal kepada perusahaan dibandingkan dengan karyawan yang *disengaged* (Dewi 2012).

Menurut Kruse (2012) *employee engagement* adalah keadaan dimana seorang karyawan secara emosional berkomitmen terhadap organisasi dan tujuannya. Keterikatan karyawan muncul karena mereka peduli dan bukan hanya karena mereka harus melakukan atau untuk mendapatkan kompensasi ataupun untuk mendapatkan

promosi. Maarif dan Kartika (2014) mendeskripsikan *employee engagement* (keterikatan karyawan) merupakan sebuah kesatuan usaha, komitmen, tanggung jawab, pikiran, tenaga, dan hati untuk menghasilkan kontribusi optimal dengan sungguh-sungguh dan sadar sebagai wujud keinginan untuk tetap tinggal dalam organisasi secara berkelanjutan. Keterikatan memiliki dampak positif nyata terhadap jumlah hasil yang diinginkan yaitu retensi karyawan, kinerja, kualitas, kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta kinerja finansial. Menurut Wellins dan Concelman dalam Endres dan Smoak (2008), *employee engagement* adalah suatu kekuatan yang dapat memberikan motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *employee engagement* menurut Schaufeli dan Bakker (2003) dengan menekankan adanya *vigor*, *dedication*, dan *absorption* dalam pemahamannya mengenai *engagement*. Teori ini dipilih karena dianggap telah mencakup pengertian yang komprehensif dan mudah dipahami. Schaufeli dan Bakker (2003) menjelaskan tentang 3 aspek pembentuk *employee engagement*, yaitu: (1) *Vigor*, karakter ini ditandai dengan iklim kerja yang penuh dengan energi dan ketahanan mental serta kemauan untuk berupaya lebih dalam bekerja dan bertahan walaupun menghadapi banyak kesulitan, (2) *Dedication*, karakter ini ditandai dengan keterlibatan penuh dalam pekerjaannya serta merasakan kepentingan, antusiasme, inspirasi, kebanggaan dan tantangan dalam pekerjaannya, (3) *Absorption*, karakter ini ditandai dengan iklim yang penuh konsentrasi dan keasyikan dalam melaksanakan pekerjaan, waktu cepat berlalu, dan sulit untuk melepaskan pekerjaan tersebut.

Ketiga aspek ini merupakan konsep yang paling dikenal dan sering digunakan di beberapa penelitian untuk mengukur tingkat *engagement* karyawan. *Vigor* menggambarkan *level* energi dan mental relisiensi yang dimiliki seseorang ketika bekerja.

Selain itu, *vigor* juga menunjukkan adanya kesediaan karyawan untuk melakukan usaha yang besar dalam menyelesaikan pekerjaan, tidak mudah merasa lelah, dan tekun dalam melakukan pekerjaan. *Dedication* menggambarkan perasaan antusias karyawan di dalam bekerja, bangga dengan pekerjaan yang dilakukan, serta merasa terinspirasi dan tertantang dengan pekerjaan. *Absorption* menggambarkan keadaan karyawan terbenam secara total, merasa senang melakukan pekerjaannya, dan merasa sulit untuk melepaskan diri dengan pekerjaan.

*Employee engagement* dapat dikategorikan dengan memberikan skoring terhadap beberapa pertanyaan yang meliputi *vigor*, *dedication*, dan *absorption*. Pertanyaan-pertanyaan ini dirangkum dalam kuesioner UWES 17 oleh Schaufeli dan Bakker (2003). Hasil penskorangan dirata-ratakan dan dikelompokkan sesuai pada Tabel 1, tabel  $\alpha$  cronbach skor UWES 17.

Skor ini digunakan untuk menentukan tingkat *engagement* SDM keuangan terhadap pekerjaannya. Skor setiap aspek *employee engagement* ini diperoleh dari penghitungan rata-rata skor kuesioner.

### Teknologi Informasi

Menurut Rusdiana dan Irfan (2014), teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat

waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Selain itu, teknologi informasi merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain sesuai kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Menurut Widuri (2010), pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pengguna melalui sistem informasi berbasis komputer dalam rangka menyelesaikan berbagai tugas dan masalah yang dihadapi pengguna dalam menjalankan pekerjaannya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, baik secara individual, kelompok, maupun organisasional, dengan memfokuskan pada level individu, khususnya *end user computing*. Menurut Winindyaningrum dan Rahmawati (2010), pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, proses kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri. Sementara itu, Jurnal dan Supomo (2002) menyebutkan pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integritas teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Konstruksi pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator: (1) Perangkat, merupakan indikator untuk menggambarkan

**Tabel 1**  
 **$\alpha$  Cronbach skor UWES 17 dan pengkategorian dengan skala 1-6**

	<i>Vigor</i>	<i>Dedication</i>	<i>Absorption</i>	Skor total
Sangat rendah	$\leq 2,17$	$\leq 1,60$	$\leq 1,60$	$\leq 1,93$
Rendah	2,18-3,20	1,61-3,00	1,61-2,75	1,941-3,06
Sedang	3,21-4,80	3,01-4,90	2,76-4,40	3,07-4,66
Tinggi	4,81-5,60	4,91-5,79	4,41-5,35	4,67-5,53
Sangat tinggi	$\geq 5,61$	$\geq 5,80$	$\geq 5,36$	$\geq 5,54$

Sumber: Schaufeli dan Bakker (2003)

kan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi, meliputi perangkat lunak, keras, dan sistem jaringan, (2) Pengelolaan data keuangan, merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh, (3) Perawatan, merupakan indikator untuk menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan

### Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang perubahan kinerja keuangan dipengaruhi perubahan status telah dilakukan oleh Maharani *et al.* (2013) yang menghasilkan tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah Pola pengelolaan Badan Layanan Umum (PK-BLU), sedangkan hasil penelitian mengenai pengaruh *employee engagement* dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan menghasilkan bahwa hanya pemanfaatan teknologi informasi yang benar-benar mampu menjelaskan variabel ketepatan waktu. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Darwais (2009), Nurillah (2012), Hanafi (2013), dan Saleh (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Gambaran Obyek Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang didukung dengan survei. Populasi dalam penelitian ini adalah staf keuangan dan Bendahara Pembantu Pengeluaran di lingkungan IPB. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 114 orang dengan rincian 23 staf keuangan dan 91 Bendahara Pembantu Pengeluaran. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang dilakukan dengan cara:

Satu, studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan ide penelitian, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

Dua, penelitian lapangan. Data empiris yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik-teknik sebagai berikut: a) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari IPB terkait upaya dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, b) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dari pegawai di lingkungan IPB guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam Penulisan ini, c) Kuesioner, yaitu mengumpulkan informasi melalui jawaban responden atas pertanyaan yang telah disusun terkait *employee engagement*, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketepatan waktu. Kuesioner yang digunakan untuk pengumpulan data teknologi informasi dan ketepatan waktu merupakan replikasi dari Indriasari dan Narhartyo (2008), sementara kuesioner untuk *employee engagement* merupakan replikasi UWES-17 (Schaufelli dan Bakker 2003), d) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses serta tahapan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Biro Keuangan IPB sebagai unit pelaksana penyusunan laporan keuangan.

### Variabel Penelitian

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen (KW)

adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan IPB, sedangkan variabel independen yaitu: *employee engagement* (ee), dan pemanfaatan teknologi informasi (Pti).

### Definisi Operasional Penelitian

1) *Employee engagement* (ee) adalah suatu keadaan ketika karyawan terlibat secara psikologis dengan pekerjaannya, baik secara fisik, kognitif, maupun emosional, sehingga karyawan akan memberikan usaha terbaik mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya, serta merasa sulit untuk melepaskan diri dengan pekerjaan yang dikarakteristikan oleh *vigor*, *dedication*, dan *absorption*; 2) Pemanfaatan Teknologi Informasi (Pti) adalah mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi; 3) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (KW) adalah suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atau kemampuannya untuk mengambil keputusan

### Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini terdiri dari:

Pertama, *Analysis of Variance* (ANOVA). *Analysis of Variance* (ANOVA) ditunjukkan untuk mengetahui perbedaan pola pengelolaan laporan keuangan pada saat sebelum dan sesudah penerapan status BLU. Analisis dilakukan dengan menggunakan data rasio keuangan. Hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0$  : pengelolaan laporan keuangan IPB sebelum dan sesudah penerapan status BLU adalah sama

$H_1$  : pengelolaan laporan keuangan IPB sebelum dan sesudah penerapan status BLU adalah berbeda

Kedua, Regresi Linear Berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk melihat pengaruh dari *employee engagement* dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan ke-

uangan. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diuji dengan tingkat kepercayaan 95%. Hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0$  :  $B_1 = B_2 = 0$  (*Employee engagement* dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan IPB)

$H_1$  : Minimal satu  $B_i \neq 0$  (*Employee engagement* dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan IPB)

Apabila hasil analisis simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *employee engagement* dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, maka dilakukan uji parsial dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  :  $B_1 = 0$  (Tidak terdapat pengaruh *employee engagement* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan IPB)

$H_1$  :  $B_1 \neq 0$  (Terdapat pengaruh *employee engagement* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan IPB)

$H_0$  :  $B_2 = 0$  (Tidak terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan IPB)

$H_1$  :  $B_2 \neq 0$  (Terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan IPB)

Ketiga, Analisis *Employee Engagement*. *Employee engagement* SDM keuangan di IPB diukur dengan menggunakan kuesioner replikasi dari kuesioner yang sudah baku yang diciptakan oleh Schaufeli dan Bakker (2003) yang dikenal *Utrecht Work Engagement Scale* (UWES-17). *Employee engagement* diukur dari 3 dimensi *employee engagement* yaitu *vigor*, *dedication*, dan *absorption*. Total pertanyaan dalam kuesioner ini adalah 17 item pertanyaan, yakni dimensi *vigor* terdiri dari 6 pertanyaan, *dedication* terdiri dari 5 pertanyaan, dan *absorption* terdiri dari 6 pertanyaan sesuai pada Tabel 2.

UWES terdiri dari 17 pertanyaan persepsi karyawan mengenai kondisi dan

**Tabel 2**  
**Kuesioner UWES**

Dimensi	No	Item (English)	Item (bahasa)
Vigor	1	<i>At my work, I feel bursting with energy</i>	Saat bekerja, saya merasa sangat berenergi
	4	<i>At my job, I feel strong and vigorous</i>	Saat bekerja, saya merasa kuat dan bersemangat
	8	<i>When I get up in the morning, I feel like going to work</i>	Ketika saya bangun di pagi hari, saya merasa bersemangat ingin berangkat kerja
	12	<i>I can continue working for very long periods at a time</i>	Saya dapat terus bekerja dalam waktu yang lama
	15	<i>At my job, I am very resilient, mentally</i>	Saya memiliki ketahanan kerja yang sangat tinggi
	17	<i>At my work I always persevere, even when things do not go well</i>	Dalam bekerja, saya pantang menyerah, bahkan ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik
Dedication	2	<i>I find the work that I do full of meaning and purpose</i>	Saya merasa pekerjaan yang saya lakukan memiliki arti dan tujuan tersendiri bagi saya
	5	<i>I am enthusiastic about my job</i>	Saya merasa antusias dengan pekerjaan saya
	7	<i>My job inspires me</i>	Pekerjaan saya menginspirasi saya
	10	<i>I am proud on the work that I do</i>	Saya bangga dengan pekerjaan yang saya lakukan
	13	<i>To me, my job is challenging</i>	Bagi saya, pekerjaan saya menantang
Absorption	3	<i>Time flies when I'm working</i>	Waktu berlalu dengan cepat saat saya bekerja
	6	<i>When I am working, I forget everything else around me</i>	Saat bekerja, saya seakan lupa akan segala sesuatu di sekeliling saya
	9	<i>I feel happy when I am working intensely</i>	Saya merasa senang saat sibuk bekerja
	11	<i>I am immersed in my work</i>	Saya larut dalam pekerjaan saya
	14	<i>I get carried away when I'm working</i>	Saya terbawa suasana ketika bekerja
	16	<i>It is difficult to detach myself from my job</i>	Sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan saya

Sumber: Schaufeli dan Bakker (2003)

perasaannya dalam bekerja, mencakup pekerjaan itu sendiri maupun lingkungan kerjanya. Seluruh pertanyaan dalam UWES akan direspon dengan menggunakan skala frekuensi yaitu: selalu (6), sangat sering (5), sering (4), kadang-kadang (3), jarang (2), tidak pernah (1). Kategori *selalu* mengindikasikan setiap hari, *sangat sering* mengindikasikan beberapa hari dalam seminggu,

*sering* mengindikasikan satu kali dalam seminggu, *kadang-kadang* mengindikasikan 1-3 kali dalam sebulan, *jarang* mengindikasikan kurang dari satu kali dalam sebulan, dan *tidak pernah* mengindikasikan tidak ada sama sekali. Nilai skala *employee engagement* akan diukur dari nilai *mean* (rata-rata) dari keseluruhan responden.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Entitas

Visi IPB mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2005-2025 serta Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia Tahun 2005-2025, Kebijakan Umum Tahun 2025 – Majelis Wali Amanah (MWA) IPB, dan draf Rencana Pengembangan IPB 2025 – Senat Akademik IPB, dan tuntutan pengarusutamaan pertanian di Indonesia dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia sebagai Negara agraris dan bahari, serta pengalaman IPB sejak penetapan IPB berstatus BHMN sesuai PP No.154 Tahun 2000. Renstra IPB 2014-2018 yang merupakan bagian dari Rencana Pengembangan IPB 2025 memiliki visi IPB tahun 2014-2018 dengan penekanan pada peran IPB dalam pengarusutamaan pertanian sebagai berikut: “Menjadi Perguruan Tinggi Berbasis Riset, Bertaraf Internasional, dan Penggerak Prima Pengarusutamaan Pertanian”.

Strategi pengembangan IPB 2014-2018 terdiri dari 5 pilar, dan salah satu pilar strategi pengembangan IPB tersebut adalah penguatan dan dinamisasi sistem manajemen IPB. Salah satu fokus kebijakan penguatan dan dinamisasi sistem manajemen di antaranya adalah penguatan dan dinamisasi pengelolaan sumber daya dalam penguatan sistem dan pengelolaan pendanaan melalui peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Laporan keuangan IPB telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Semua informasi dalam laporan keuangan IPB telah dimuat secara lengkap dan benar. Melalui prinsip akuntabilitas IPB dapat menjelaskan kepada masyarakat (*stakeholders*) tentang penerimaan dan pengeluaran dana yang dimanfaatkan untuk membiayaan akademik, baik program maupun layanan akademik yang disajikan dalam laporan keuangan IPB. Laporan keuangan IPB dapat bermanfaat kepada: 1)

Manajemen IPB, laporan keuangan memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan *budgeting*, menjaga aset, dan kontrol internal. Jika informasi keuangan yang diberikan akurat, maka pengelola bisa mengambil keputusan dengan jernih berdasarkan data-data yang dimiliki, 2) *Stakeholders* dalam rangka akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan IPB sebagai perwujudan dari pelaksanaan *Good University Governance* (GUG).

Kualitas penyajian laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh infrastruktur sistem yang baik dan terintegrasi antara satu bagian dengan bagian lain yang seharusnya didukung oleh SDM yang berkompeten dan handal dalam bidangnya. SDM keuangan yang terdiri dari staf Biro Keuangan dan unit-unit kerja pengelola keuangan di lingkungan IPB (Bendahara Pembantu Pengeluaran) perlu meningkatkan ilmu terutama di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan sehingga dapat menghasilkan *output* yang cepat dan akurat.

Teknologi informasi yang sedang dikembangkan di keuangan IPB adalah Sistem Keuangan (SIMKEU) IPB. Manfaat dari dikembangkannya SIMKEU IPB adalah: 1) Mengumpulkan informasi keuangan yang dibutuhkan dengan lebih efisien dan akurat; 2) Berbagi informasi keuangan yang dibutuhkan lintas unit kerja lebih mudah dan cepat; 3) Pengelolaan terhadap informasi keuangan lebih fleksibel; 4) Mengambil keuntungan dari investasi teknologi informasi yang sudah dianggarkan

Fungsi dari SIMKEU IPB di antaranya mencatat semua transaksi keuangan, menghasilkan laporan keuangan, dan melakukan penelusuran transaksi keuangan apabila suatu saat dibutuhkan. Sistem keuangan yang diterapkan Biro Keuangan IPB bertujuan untuk membantu IPB dalam akuntabilitas keuangan, pengambilan keputusan, dan transparansi sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang handal dan tepat waktu.



### Perbedaan Pola Pengelolaan Keuangan pada Status BHMN dan BLU

Status IPB yang mengalami perubahan dari BHMN menjadi BLU diduga akan memengaruhi pola keuangan IPB. Data rasio keuangan digunakan untuk menguji pola pengelolaan keuangan IPB pada kedua status tersebut. Hasil rataan rasio keuangan untuk 9 parameter yang diamati dapat dilihat pada Tabel 3.

Pengujian perbedaan pola keuangan pada status BHMN dan BLU di IPB dianalisis menggunakan analisis ragam (Tabel 4). Hasil analisis menunjukkan bahwa pola pengelolaan keuangan IPB sebelum dan setelah diterapkannya BLU tidak berbeda ( $p\text{-value} > 0,05$ ). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maharani *et al.* (2013) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Meskipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pengelolaan keuangan IPB sebelum dan sesudah BLU, namun hasil rataan) dari 9 parameter yang diamati menunjukkan bahwa rasio keuangan IPB setelah menerapkan BLU lebih baik dibandingkan dengan sebelum menerapkan BLU dapat dilihat pada tabel 3. Hal ini dapat dilihat dari 9 parameter yang diamati, 7 parameter mengindikasikan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Sementara penurunan hanya terjadi pada rasio belanja modal dan rasio solvabilitas, namun penurunan tersebut masih dalam kondisi baik dan solvabel. Hasil tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar pengelolaan keuangan IPB semakin lebih baik. Hal ini sesuai dengan Wijayanti dan Sriyanto (2015) yang menyatakan bahwa dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLU diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan sehingga institusi mampu memberikan pelayanan yang optimal.

**Tabel 3**  
Hasil rataan item pola pengelolaan keuangan IPB pada status BHMN dan BLU

Pola Pengelolaan Keuangan	Status IPB	
	BHMN	BLU
1. Rasio pendapatan terhadap belanja	0,91±0,14	0,97±0,15
2. Rasio belanja modal	0,92±1,15	0,07±0,01
3. Perputaran aktiva	0,25±0,03	0,58±0,21
4. Rasio perputaran modal kerja	3,76±1,64	2,33±0,28
5. Rasio perputaran aktiva tetap	0,29±0,05	0,94±0,45
6. Rasio kas	2,50±0,69	3,79±0,46
7. Rasio cepat	3,29±0,84	4,40±0,27
8. Rasio lancar	3,29±0,84	4,42±0,27
9. Rasio solvabilitas	15,63±3,29	8,63±2,89

**Tabel 4**  
Hasil uji *analysis of variance* (ANOVA)

SK	JK	dB	KT	F	<i>P-value</i>	F tabel
Perlakuan	1,23	1	1,23	0,08	0,78	4,49
Sisa	241,80	16	15,11			
Total	243,03	17				

**Pengaruh Employee Engagement dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatan Waktu**

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang berkualitas dan dilaporkan dengan tepat waktu. Kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sumber daya manusia dan teknologi informasi yang digunakan. Kemampuan sumber daya manusia ini dapat digambarkan dengan *employee engagement*. Data *employee engagement*, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan diperoleh dari hasil jawaban kuesioner responden. Profil responden yang diteliti dapat dilihat pada Tabel 5.

Analisis pengaruh *employee engagement* dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan analisis

regresi berganda. Persamaan yang diperoleh adalah:

$$KW = 0,42 + 0,11 ee + 0,81 Pti + \epsilon$$

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan bahwa konstanta sebesar 0,42 menyatakan tanpa ada pengaruh dari dua variabel independen dan faktor lain, maka variabel ketepatan waktu laporan keuangan (KW) pada IPB adalah 0,42. Koefisien regresi variabel *employee engagement* 0,11 (positif). Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan *employee engagement* akan meningkatkan ketepatan waktu laporan keuangan sebesar 0,11 tanpa dipengaruhi faktor lainnya. Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi 0,81 (positif). Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan ketepatan waktu laporan keuangan sebesar 0,81 tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

**Tabel 5**  
**Profil responden**

Keterangan	Frekuensi	Presentase (%)
A. Jenis kelamin:		
1) Pria	49	42,98
2) Perempuan	65	57,02
Total	114	100,0
B. Usia:		
1) ≤ 30 tahun	17	14,91
2) 31-40 tahun	44	38,60
3) 41-50 tahun	43	37,72
4) ≥ 51 tahun	10	8,77
Total	114	100,0
C. Pendidikan terakhir:		
1) SLTA	34	29,82
2) Diploma	22	19,30
3) S1	47	41,23
4) S2	10	8,77
5) S3	1	0,88
Total	114	100,0
D. Lama bekerja:		
1) ≤ 10 tahun	95	83,33
2) 11-20 tahun	17	14,92
3) 21-30 tahun	2	1,75
Total	114	100,0

Sumber: diolah peneliti

Berdasarkan analisis regresi dari hasil kuesioner, diketahui bahwa *employee engagement* dan pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan (Tabel 6; *p-value* <0,05). Uji parsial (*t-test*) dilakukan untuk memastikan variabel yang benar-benar memengaruhi ketepatan waktu. Hasil uji ditampilkan pada Tabel 7 dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa hanya pemanfaatan teknologi informasi yang benar-benar mampu menjelaskan variabel ketepatan waktu (*p-value*<0,05). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Darwais (2009), Andriani (2010), Nurillah (2012), Hullah (2012), Hanafi (2013), Mahaputra (2014) dan Saleh (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa IPB perlu meningkatkan *employee engagement* SDM keuangan yang diperkuat dengan perbaikan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan ketepatan waktu laporan keuangan. Perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap bidang

akuntansi manajemen selaku bidang penghasil informasi dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen (Maharsi 2000).

#### **Employee Engagement SDM Keuangan Institut Pertanian Bogor**

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *employee engagement score* untuk SDM keuangan IPB secara umum adalah sebesar 4,32 (Tabel 8). Hal ini menunjukkan bahwa *employee engagement* SDM keuangan IPB masih dalam kategori sedang, sehingga masih perlu ditingkatkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Lubis (2012) yang menyatakan bahwa tingkat *employee engagement* di PT XYZ berada dalam posisi sedang dengan nilai *employee engagement* sebesar 4,41. Jika dilihat dari masing-masing dimensi, maka dimensi *dedication* lebih tinggi dibandingkan dimensi *vigor* dan *absorption* yaitu sebesar 4,42. Hal ini menunjukkan bahwa SDM keuangan IPB telah memiliki dedikasi cukup tinggi ditandai dengan keterlibatan penuh dalam pekerjaannya serta merasakan kepentingan, antu-

**Tabel 6**  
Hasil analisis uji simultan  
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28.441	2	14.221	54.379	.000(a)
	Residual	29.027	111	.262		
	Total	57.468	113			

a Predictors: (Constant), Teknologi\_Inform, Engaged\_Employment

b Dependent Variable: Ketepatan\_Waktu

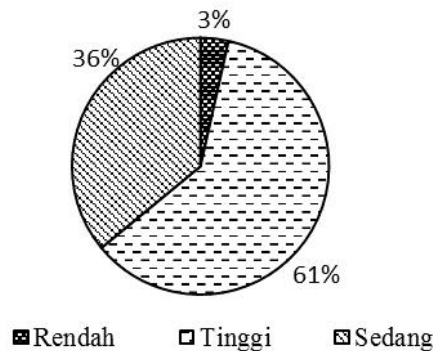
**Tabel 7**  
Hasil analisis uji parsial  
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Partial	Part	Tolerance	VIF	B
1 (Constant)	.424	.403		1.052	.295					
Engaged_Employ	.107	.068	.108	1.584	.116	.213	.149	.107	.976	1.024
Teknologi_Inform	.805	.081	.679	9.941	.000	.695	.686	.671	.976	1.024

a Dependent Variable: Ketepatan\_Waktu

**Tabel 8**  
*Employee engagement score*

<b>Dimensi/Variabel</b>	<b>N</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Employee engagement</i>	114	4,32	Sedang
<i>Vigor</i>	114	4,34	Sedang
<i>Dedication</i>	114	4,42	Sedang
<i>Absorption</i>	114	4,21	Sedang



**Gambar 3**  
*Penilaian employee engagement individu SDM keuangan IPB*

siasme, inspirasi, kebanggaan, dan tantangan dalam pekerjaannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yadnyawati (2012) yang menunjukkan bahwa dari ketiga dimensi employee engagement, dedication paling menonjol. Urutan berikutnya adalah vigor dan absorption.

Berdasarkan hasil pengujian employee engagement, engagement antara SDM keuangan dengan IPB sudah terbangun dengan baik walau masih dalam posisi sedang. Hal ini memberikan gambaran bahwa IPB berpeluang tinggi untuk meningkatkan engagement antara SDM keuangan dengan IPB. Hasil penelitian ini mendukung secara empiris studi yang dilakukan oleh Yuniati dan Arijanto (2012) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa para dosen dan pegawai non akademik belum mencapai tingkat engaged yang tinggi. Hal ini dikarenakan para dosen dan pegawai non akademik belum memiliki kesediaan yang sangat tinggi untuk berkontribusi secara positif di Institut. Institusi harus berusaha membentuk pola pikir dan membuat SDM selalu berkontribusi dengan baik (Utoro dan

Gustomo 2014). Meningkatnya engagement akan meningkatkan produktivitas kinerja dari SDM keuangan. Salah satu faktor penggerak utama employee engagement adalah adanya keselarasan antara kinerja karyawan dan kinerja perusahaan serta adanya pemahaman yang jelas oleh SDM mengenai perannya terhadap kinerja perusahaan (Siddhanta dan Roy 2010).

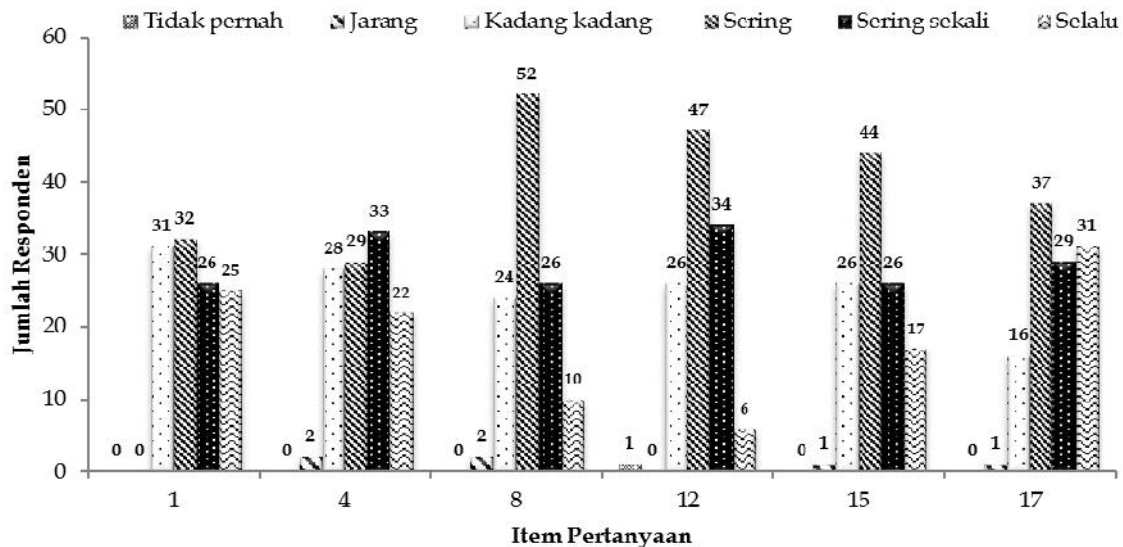
Jika ditinjau dari masing-masing individu SDM keuangan, diketahui bahwa 61% sudah memiliki employee engagement yang tinggi, meskipun 36% masih dalam kategori sedang dan 3% masih dalam kategori rendah dapat dilihat pada Gambar 3. Hasil pengujian ditinjau dari masing-masing individu SDM keuangan, diketahui bahwa 61% sudah memiliki employee engagement yang tinggi, hal tersebut akan meningkatkan kinerja SDM keuangan IPB. Tingginya engagement dapat meningkatkan bakat karyawan, kesetiaan pelanggan, dan kinerja perusahaan (Swarnalatha dan Prasanna 2013). Dampak dari SDM keuangan IPB memiliki rasa keterikatan yang tinggi adalah SDM keuangan akan memberikan

masuk-masukan yang bagus untuk kemajuan IPB dan rekan kerjanya, tetap bekerja di IPB walaupun ada peluang untuk bekerja ditempat lain, dan memberikan lebih banyak waktu untuk berkontribusi demi kesuksesan IPB. Peran strategis SDM

harus diberikan perhatian serius untuk memastikan tingkat keterikatan antar karyawan (Johari *et al.* 2013).

Berikut merupakan uraian jawaban responden per dimensi *employee engagement*:

### Dimensi Vigor



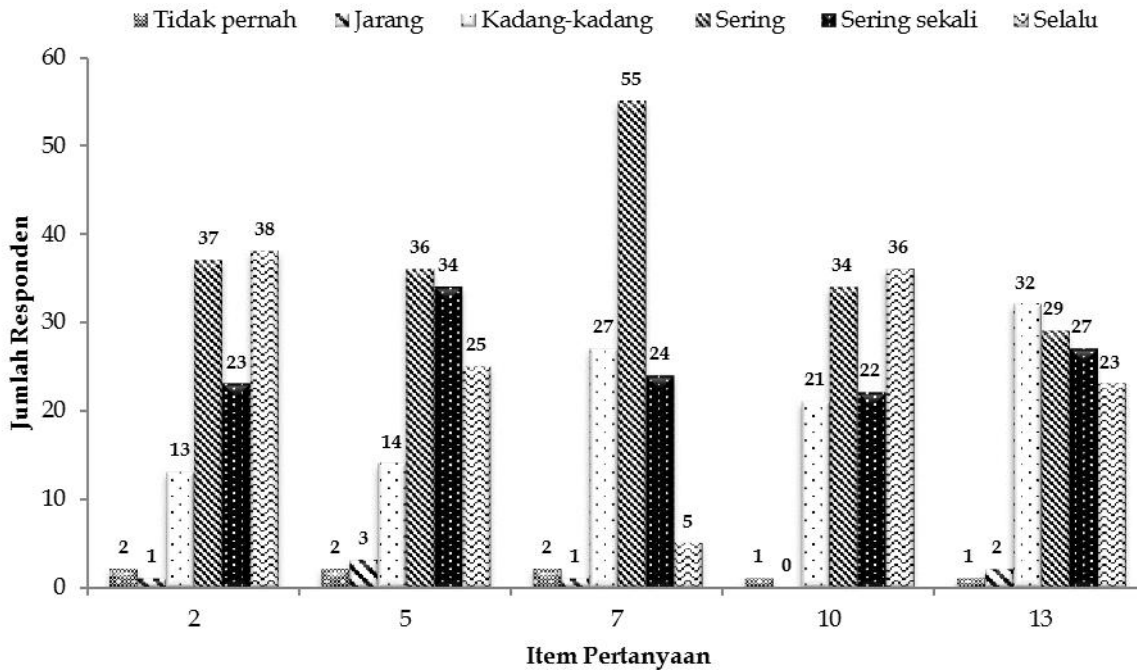
**Gambar 4**  
Jumlah responden yang menjawab pertanyaan dimensi *vigor*

Dimensi *vigor* pada item pertanyaan kuesioner UWES terdiri dari 6 pertanyaan (Tabel 2), yaitu pertanyaan Nomor 1, 4, 8, 12, 15, dan 17. Secara umum jawaban dari responden paling banyak adalah sering dan jawaban tertinggi terdapat pada pertanyaan Nomor 8 (ketika saya bangun di pagi hari, saya merasa bersemangat ingin berangkat kerja). Jawaban tersebut terdiri dari 8 orang staf keuangan dan 44 orang BPP. Hal ini menunjukkan bahwa SDM keuangan hanya bersemangat 1 kali dalam seminggu. Satu di antara responden menjawab tidak pernah pada pertanyaan nomor 12 (saya dapat terus bekerja dalam waktu yang lama) yaitu staf keuangan, hal ini menunjukkan bahwa SDM keuangan tersebut tidak bersemangat untuk bekerja yang disebabkan oleh pekerjaan yang monoton dan berulang-ulang sehingga mengakibatkan kejenuhan dan berkurangnya motivasi dalam bekerja. SDM keuangan tersebut menginginkan peruba-

han karena telah bekerja dalam jangka waktu yang lama, sehingga merasa sudah tidak ada tantangan dalam pekerjaannya. Jika dilihat dari jawaban *scoring* tertinggi yaitu selalu, jawaban tertinggi terdapat pada pertanyaan Nomor 17 (dalam bekerja, saya pantang menyerah, bahkan ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik). Jawaban tersebut terdiri dari 7 orang staf keuangan dan 24 orang BPP. Hal ini menunjukkan bahwa SDM keuangan IPB bekerja dengan penuh keyakinan, semangat, pantang menyerah, dan ulet. Dengan merasa pantang menyerah dalam bekerja maka akan membangkitkan dorongan dalam diri SDM keuangan yang akan membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku berdasarkan lingkungan kerja yang kemudian diimplementasikan kepada orang lain untuk memberikan pelayanan yang baik.

Item pertanyaan pada kuesioner UWES untuk dimensi *dedication* terdiri dari 5

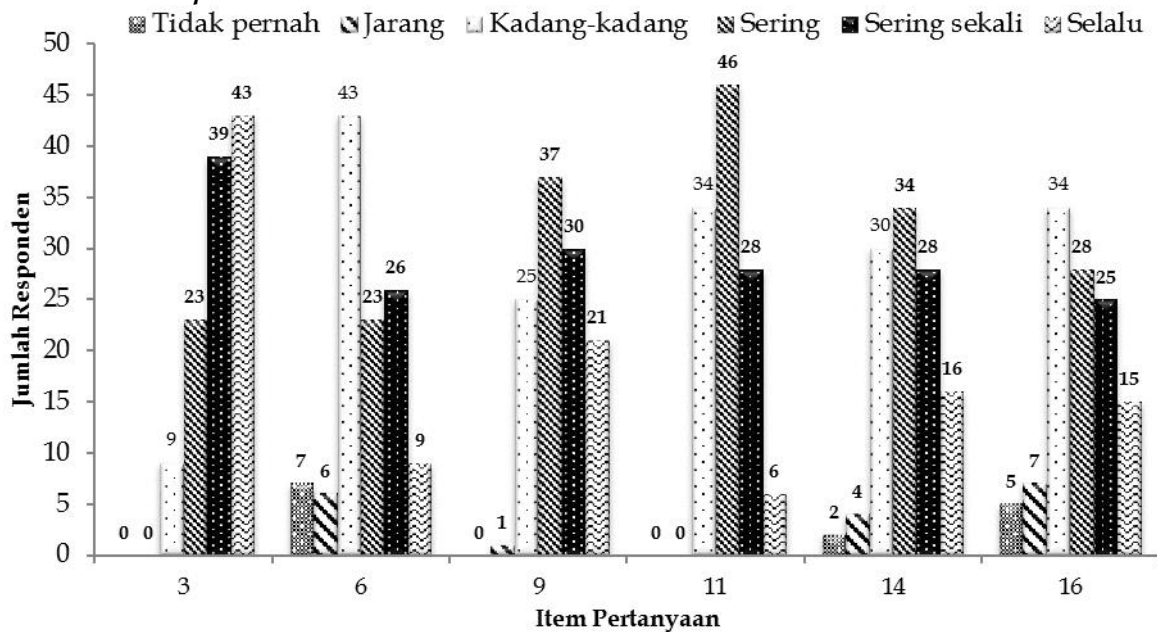
**Dimensi Dedication**



**Gambar 5**  
**Jumlah responden yang menjawab pertanyaan dimensi dedication**

pertanyaan (Tabel 2) yaitu pertanyaan Nomor 2, 5, 7, 10, dan 13. Secara umum jawaban responden paling banyak adalah sering dan tertinggi terdapat pada pertanyaan Nomor 7 (pekerjaan saya menginspirasi saya) terdiri dari 9 orang staf keuangan dan 46 orang BPP, hal ini menunjukkan bahwa SDM keuangan hanya memiliki inspirasi dalam bekerja 1 kali dalam seminggu. Ada 8 SDM keuangan yang menjawab tidak pernah, pada semua pertanyaan dimensi *dedication* (pekerjaan yang memiliki arti dan tujuan, merasa antusias, pekerjaan yang menginspirasi, bangga dengan pekerjaannya, dan pekerjaan yang menantang). Jawaban tersebut terdiri dari 1 orang staf keuangan dan 7 orang BPP. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang monoton mengakibatkan kejenuhan dan turunnya motivasi SDM keuangan sehingga tidak memiliki ide-ide kreatif dalam bekerja sehingga menyebabkan SDM keuangan sulit untuk bersaing. SDM keuangan tersebut tidak memiliki arti dan tujuan dalam mengubah sikap dan perilaku yang dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam menghadapi

tantangan. Disamping itu mengindikasikan SDM keuangan tersebut tidak mengerti peran dan fungsinya dalam bekerja. Mereka hanya memberikan upaya minimum dalam bekerja sehingga sulit ikut berperan serta secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Dilihat dari *scoring* tertinggi yakni selalu, jawaban tertinggi terdapat pada pertanyaan Nomor 2 (saya merasa pekerjaan yang saya lakukan memiliki arti dan tujuan tersendiri bagi saya) terdiri dari 8 orang staf keuangan dan 30 orang BPP. Hal ini menunjukkan SDM keuangan tersebut memiliki alasan tertentu yang menyakinkan SDM keuangan untuk bertahan dalam menjalankan pekerjaannya. SDM keuangan IPB tersebut memiliki ide-ide kreatif dalam bekerja dan terus mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga akan menghasilkan motivasi dan kebahagiaan dalam melakukan pekerjaannya. Inspirasi akan memberikan tambahan ide dalam suatu keadaan yang penting dan akan memberikan cara untuk melalui masalah-masalah yang terjadi dalam pekerjaannya.

**Dimensi Absorption**

**Gambar 6**  
Jumlah responden yang menjawab pertanyaan dimensi *absorption*

Item pertanyaan pada kuesioner UWES untuk dimensi *absorption* terdiri dari 6 pertanyaan (Tabel 2) yaitu pertanyaan Nomor 3, 6, 9, 11, 14, dan 16. Secara umum jawaban responden paling banyak adalah sering dan tertinggi terdapat pada pertanyaan Nomor 11 (saya larut dalam pekerjaan saya) terdiri dari 8 orang staf keuangan dan 38 orang BPP, hal ini menunjukkan bahwa SDM keuangan hanya larut dalam bekerja 1 kali dalam seminggu. Ada 14 SDM keuangan yang menjawab tidak pernah, pada pertanyaan Nomor 6 terdiri dari 3 orang staf keuangan dan 4 orang BPP, Nomor 14 terdiri dari 2 orang staf keuangan, dan Nomor 16 terdiri dari 1 orang staf keuangan dan 4 orang BPP (keasyikan, terbawa suasana, dan sulit melepaskan diri). Hal ini mengindikasikan SDM keuangan tersebut merasa bosan dengan pekerjaan dan lingkungan yang monoton serta kurangnya fasilitas kerja sehingga tidak memiliki motivasi dalam bekerja. SDM keuangan tersebut merasakan waktu yang lama dalam bekerja dan merasakan lingkungan yang tidak nyaman. Mereka bekerja hanya untuk me-

nyelesaikan tugas. Dilihat dari *scoring* tertinggi yakni selalu, jawaban tertinggi terdapat pada pertanyaan Nomor 3 (waktu berlalu dengan cepat saat saya bekerja). Hal ini menunjukkan beberapa SDM keuangan tersebut merasakan suasana hati yang baik saat bekerja, sehingga menjadikan lebih kreatif dan dapat menghasilkan banyak ide serta cenderung mengidentifikasi lebih banyak kreatif terhadap masalah. SDM keuangan tersebut sangat menikmati pekerjaannya. Perasaan senang akan mengalami perubahan dalam berpikirnya, tindakan yang dilakukan, dan perasaan yang dirasakannya. Bekerja dengan perasaan senang akan mampu menghasilkan tujuan yang diinginkan dan mencapai kesuksesan.

**SIMPULAN DAN SARAN****Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya maka simpulan yang Penulis sampaikan sebagai berikut: (1) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pengelolaan keuangan IPB sebelum dan sesudah diterapkannya PPK-BLU (*p-value* >

0,05); (2) Faktor yang memengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan adalah *employee engagement* dan pemanfaatan teknologi informasi ( $p\text{-value} < 0,05$ ) dan faktor yang benar-benar memengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi; (3) Nilai *employee engagement* SDM keuangan IPB masuk dalam kategori sedang dengan skor 4,32. Skor untuk masing-masing dimensi adalah *vigor* (4,34), *dedication* (4,42), dan *absorption* (4,21).

### Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: (1). Peningkatan teknologi informasi agar laporan keuangan yang dihasilkan IPB tepat waktu dan memenuhi aspek-aspek kepatuhan yang telah ditetapkan pemerintah, (2). Peningkatan kualitas SDM keuangan yang dimiliki baik di level unit kerja maupun kantor pusat dengan pelatihan-pelatihan baik untuk peningkatan keahlian pengelolaan keuangan, keahlian pengoperasian komputer, serta peningkatan kualitas pribadi personil keuangan, (3). Penerapan evaluasi sistem keuangan (SIM-KEU) yang selama ini dikembangkan, sehingga dapat mencerminkan tujuan dari dibuatnya suatu aplikasi yaitu laporan yang cepat, akurat, dapat diandalkan, dan menghasilkan *output* laporan keuangan yang berkualitas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 5(1): 69-80.
- Darwais dan D. D. Mahyani. 2009. Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* 2(2): 133-151.
- Dewi, D. I. 2012. Pengaruh kompensasi dan penilaian kinerja terhadap employee engagement. *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Dikutra, R. S. dan Y. D. Anna. 2013. Pengaruh Ketepatan Pelaporan Laporan Keuangan, Opini Audit, Pergantian Kantor Akuntan Publik, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Reaksi Investor. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah* 18(2): 39-59.
- Endres, G. M. dan L. M. Smoak. 2008. The Human Resource Craze: Human Performance Improvement and Employee Engagement. *Organization Development Journal* 26(1): 69-77.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintah: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE. Yogyakarta.
- Guntari, R., Y. Yuniati., dan S. Arijanto. 2014. Usulan peningkatan employee engagement pada karyawan administrasi Itenas. *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional* 1(2): 278-288.
- Hanafy, R. 2013. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8(16): 85-105.
- Hanim, M., Y. Yuniati., dan S. Arijanto. 2014. Peningkatan Employee Engagement untuk Teknisi dan Karyawan Non Administrasi Itenas. *Jurnal Online ITN* 1(2): 217-227.
- Harjito, A. dan Martono. 2012. *Manajemen Keuangan*. Ed ke-2. Ekonisia. Yogyakarta.
- Hery. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Ed ke-1. Center for Academic Publishing Service. Jakarta.
- Hullah, A. R., Pangemanan, S., Tangkuman, S., dan Budiarmo, A. 2012. Pengaruh SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 3(2): 9-21.



- Indriasari, D. dan E. Narhartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI*. 23-24 Juli 2008. Pontianak.
- Johari, J., Z. Adnan., T. F. Yean., K. K. Yahya., dan S. N. Isa. 2013. Fostering Employee Engagement Through Human Resource Practices: A Case of Manufacturing Firm in Malaysia. *Jurnal Pengurusan* 38(1): 15-26.
- Jurnali, T. dan B Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi Dan Pemanfaatan TI Terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 5(2): 214-228.
- Kruse, K. 2012. *Employee Engagement 2.0: How to Motivate Your Team For High Performance (A Real-World Guide For Busy Managers)*. The Kruse Group. Pennsylvania.
- Lismawati. 2011. Pengaruh kemampuan SDM terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 6(1): 23-31.
- Lubis, A. A. 2012. Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Employee Engagement di PT XYZ. *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Maarif, S. M. dan L. Kartika. 2014. *Manajemen Pelatihan Upaya Mewujudkan Kinerja Unggul dan Pemahaman Employee Engagement*. Ed ke-1. IPB Press. Bogor.
- Mahaputra, I. P. U. R. dan I. W. Putra. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8(2): 230-244.
- Maharani, A. dan W.A. Muhtar. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Jurnal Penelitian UNS* 1(3): 1-10.
- Maharsi, S. 2000. Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Bidang Akuntansi Manajemen. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2(2): 127-237.
- Markos, S. dan M. S. Sridevi. 2010. Employee Engagement: The Key To Improving Performance. *International Journal of Business and Management* 5(12): 89-96.
- Nordiawan, D. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Ed ke-5. Salemba Empat. Jakarta.
- Noviandi, B. S. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nurillah, A. S. dan D. Muid. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting* 1(1): 2-13.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagai Badan Hukum Milik Negara*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Menteri Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Menteri Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- [IPB] Institut Pertanian Bogor. 2014. *Rencana Strategis Institut Pertanian Bogor Tahun 2014-2018*. IPB. Bogor.
- Rachmawati, M. 2010. Employee Engagement sebagai Kunci Meningkatkan Kinerja Karyawan. *International Journal Rewiew* 5(12): 52-65.

- Rusdiana, H. A. dan Irfan. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Ed ke-1. Pustaka Setia. Bandung.
- Saleh, M., D. P. E Saerang., dan V. Ilat. 2014. Pengaruh kualitas sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 4(1): 77-87.
- Schaufeli, W. B. dan A. Bakker. 2003. *Utrecht Work Engagement Scale: Preliminary Manual*. Occupational Health Psychology Unit. Utrecht University.
- Siddhanta, A. dan D. Roy. 2010. Employee engagement engaging the 21<sup>st</sup> century workforce. *Asian Journal of Management Research* ISSN 2229-3795.
- Shulthoni, M. 2012. Determinan Audit Delay dan Pengaruhnya terhadap Reaksi Investor. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis* 1(1): 9-18.
- Swarnalatha, C. dan T. S. Prasanna. 2013. Employee Engagement: a Theoretical View. *International Journal of Scientific Research* 2(8): 259-262.
- Utoro, D. T. dan A. Gustomo. 2014. Analysis of Employee Engagement in PT Kaltim Prima Coal. *Journal of Business and Management* 3(2): 475-482.
- Waluyo, I. 2011. Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 2(9): 1-15.
- Winindyaningrum, C. dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Dan Ketepatan waktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto*.
- Widuri, R. 2010. Ketidakpastian Tugas Sebagai Variabel Moderator Terhadap Hubungan Antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kepuasan Pengguna Ada End User Computing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 12(1): 41-52.
- Wijayanti, H. T. dan Sriyanto. 2015. Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Kinerja Keuangan RSUD Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 1(1): 28-38.
- Yadnyawati, N. W. 2012. Analisis Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Employee Engagement. *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Yuniati, Y. dan S Arijanto. 2012. Peningkatan Employee Engagement Pegawai perguruan tinggi X. *Jurnal Itenas* 18(1): 23-31.
- Yunus, S. 2012. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 16(3): 368-387.

## UPAYA PENERAPAN AKRUAL DAN PEROLEHAN OPINI WTP DI KOTA PEKALONGAN DARI KACAMATA KURT LEWIN

**Riza Muttaqin**

*riezhamuttaqin@gmail.com*

**Ali Djamhuri**

**Yeney Widya Prihatiningtias**

**Program Magister Akuntansi, Pascasarjana FEB, Universitas Brawijaya**

### ABSTRACT

*The aim of this research is to reveal and describe the organizational change occurred on Pekalongan City Government in implementing public sector accrual accounting and attaining unqualified audit opinion as perceived from the aspects of readiness and strategy implementation by the government based on movement stages following to Lewin's Organizational Change Theory (1951). The results showed that the change from cash to accrual accounting as well as strategy to achieve unqualified audit opinion is a form of pressure and a process that is deliberately done in order to increase the accountability of the financial statements to be usable for decision-making. The government officials have shown resistance and negative impressions to implement of accrual accounting and strategy to achieve unqualified audit opinion. Preparations to implement accrual accounting and strategy to achieve unqualified audit opinion are expected to minimize the attitude of resistance so that the organizational changes can be successful. Preparations to implement of accrual accounting and the strategy to achieve unqualified audit opinion are conducted by issuing Perwal. No. 34 and No. 35 2014, establishing SIMDA and SIMBADA, managing asset, defining a target in its RPJM, following up the BPK's recommendation, and maintaining common commitment as public sector institution.*

*Key words: public sector accrual accounting, unqualified audit opinion, organizational change theory, Kurt Lewin.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perubahan organisasi yang terjadi pada pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka penerapan SAP akrual dan perolehan opini WTP dilihat dari aspek persiapan serta strategi yang dilakukan berdasarkan tahapan *movement* menurut Lewin (1951). Hasil penelitian ini antara lain: perubahan dari SAP kas menuju akrual ke SAP akrual dan strategi perolehan opini WTP menuju WTP merupakan bentuk tekanan dan juga merupakan proses yang sengaja dilakukan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan agar laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sikap resisten ditunjukkan dengan pernyataan negatif dari para pengelola dan penyusun laporan keuangan. Persiapan dalam rangka penerapan SAP akrual dan strategi perolehan opini WTP diharapkan dapat meminimalisasi sikap resisten sehingga perubahan organisasi dapat berhasil sesuai dengan tujuannya. Persiapan dalam rangka penerapan SAP akrual dan strategi perolehan opini WTP antara lain menetapkan Perwal No. 34 tahun 2014 dan perwal No. 35 tahun 2014, membangun aplikasi SIMDA dan SIMBADA, melakukan penataan aset, menargetkan opini WTP pada RPJMD nya, menindaklanjuti temuan BPK, serta meningkatkan dan menjaga komitmen bersama.

Kata kunci: SAP akrual, opini WTP, teori perubahan organisasi, Kurt Lewin

### PENDAHULUAN

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka refor-

masi di bidang keuangan negara. Salah satu bentuknya antara lain penerapan sistem akuntansi pemerintah dengan basis akrual

seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL pada Pemerintah Daerah. Penerapan SAP berbasis akruaL pada pemerintah daerah tersebut paling lambat harus sudah dimulai pada tahun anggaran 2015. Tujuan penerapan SAP berbasis akruaL adalah untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas pemerintah dan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar memperhatikan kas (Damayanti, 2013).

Menurut John dan Setiawan (2009) pelaporan keuangan pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban keuangan negara dikatakan baik apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan oleh para pemakainya dan diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pelaporan keuangannya dari BPK.

Oleh karena Opini WTP merupakan salah satu cerminan akuntabilitas sehingga idealnya dengan berlakunya SAP berbasis akruaL akan lebih memudahkan entitas untuk mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat kekhawatiran atas kemungkinan penurunan opini atas Laporan keuangan pemerintah pada tahap-tahap awal implementasi akuntansi berbasis akruaL karena konsep akuntansi akruaL bagi pemerintah daerah merupakan hal yang baru. Untuk itu perlu adanya persiapan, strategi, dan upaya yang serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar laporan keuangannya dapat mendapatkan opini WTP dari BPK.

Persiapan, strategi dan upaya dalam rangka penerapan SAP akruaL dan perolehan opini WTP dapat dirumuskan dalam

kebijakan-kebijakan. Pembuatan kebijakan-kebijakan tersebut memaksa organisasi pemerintahan untuk melakukan perubahan organisasi. Lewin (1951) berpendapat perubahan organisasi adalah pergerakan organisasi yang disengaja dari satu tahap yang sudah tetap ke tahapan yang lain, dan hal ini terjadi karena adanya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok.

Dengan berlakunya PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 merupakan bentuk tekanan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menerapkan SAP akruaL dan perubahan SAP kas menuju akruaL ke SAP akruaL merupakan perubahan yang sengaja diciptakan. Kebijakan yang dibuat suatu pemerintah daerah dalam rangka perolehan opini WTP merupakan tekanan dari pimpinan daerah kepada satuan-satuan kerja di bawahnya. Hal inilah yang memaksa pemerintah daerah untuk melakukan perubahan.

Pemerintah Kota Pekalongan selama beberapa tahun terakhir (tahun anggaran 2008-2014) selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP ini diperoleh karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali pengendalian pencatatan aset tetap yang tidak tertib dan kurang memadai serta pengendalian pencatatan piutang yang kurang memadai. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Pekalongan semakin kompleks tidak hanya mempersiapkan implementasi SAP dengan basis akruaL tetapi juga merencanakan strategi agar memperoleh peningkatan opini dari WDP menjadi WTP.

Penelitian tentang implementasi perubahan organisasi sektor publik pernah dilakukan oleh Cunningham dan Kempling (2009). Dalam penelitiannya, Cunningham dan Kempling (2009) menawarkan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam

mengimplementasikan perubahan organisasi agar dapat berhasil. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) membentuk tim perubahan organisasi dengan aktor kunci yang dapat mengelola perubahan, (2) mengenali dan merespon resistensi dari anggota organisasi, (3) menetapkan kebutuhan untuk perubahan, (4) menentukan hasil yang akan dicapai, (5) menetapkan proses untuk rencana implementasi, (6) berfokus pada perbaikan secara terus-menerus, (7) mengembangkan rencana komitmen, (8) mengubah struktur organisasi dan sistem sumberdaya manusia.

Selain Cunningham dan Kempling (2009), Hossan (2015) melakukan penelitian pada pemerintah daerah di Australia untuk melihat bagaimana perubahan organisasi yang terjadi setelah diterapkannya beberapa teknik manajemen sektor swasta seperti *Total Quality Manajemen (TQM)*, *Business Process Reengineering (BPR)* dan *Benchmarking*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa teori perubahan organisasi Kurt Lewin dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan organisasi di Australia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perubahan organisasi yang terjadi pada pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka upaya penerapan SAP akrual dan perolehan opini WTP berdasarkan teori perubahan organisasi (Lewin, 1951)?”. Terdapat tiga tahapan perubahan organisasi menurut Lewin (1951) yaitu *unfreezing*, *movement* dan *refreezing*. Untuk dapat mengkaji apa yang dilakukan pemerintah Kota Pekalongan pada tahapan *movement*, pertanyaan penelitian tersebut dikembangkan menjadi sub pertanyaan penelitian. Sub pertanyaan dalam penelitian ini antara lain: Pertama, bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual?. Kedua, strategi-strategi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)?

Mengacu pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perubahan organisasi yang terjadi pada pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka penerapan SAP akrual dan perolehan opini WTP dilihat dari aspek persiapan serta strategi yang dilakukan pada tahapan *movement* menurut Lewin (1951).

## TINJAUAN TEORETIS

### Perubahan Organisasi

Perubahan organisasi adalah sebuah proses yang disengaja dan berorientasi pada tujuan tertentu yang disebabkan karena adanya tuntutan atau tekanan seperti tuntutan dari tenaga kerja, perkembangan teknologi, krisis ekonomi, kompetisi, kecenderungan sosial dan politik dunia (Robin dan Judge, 2015). Dari definisi tersebut terdapat dua kata kunci yaitu “disengaja” dan “tekanan”, hal ini sesuai dengan teori perubahan organisasi yang disampaikan oleh Kurt Lewin. Lewin (1951) menyebutkan organisasi bergerak dari satu tahap yang sudah tetap ke tahapan yang lain, melalui serangkaian tahapan yang telah ditentukan dan Bergeraknya organisasi dari tahap yang sudah tetap ke tahapan lainnya terjadi karena adanya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok.

Masih menurut Lewin (1951), perubahan organisasi harus dilakukan berdasarkan beberapa hal antara lain; (1) Perubahan hanya boleh dilaksanakan untuk alasan yang baik; (2) Perubahan harus secara bertahap; (3) Semua perubahan harus direncanakan dan tidak secara drastis atau mendadak; (4) Semua individu yang terkena perubahan harus dilibatkan dalam perencanaan perubahan.

Darto (2013) menyimpulkan bahwa Kurt Lewin memfokuskan pada pernyataan “mengapa”, yaitu mengapa individu-individu, kelompok, atau organisasi berubah. Dari pertanyaan tersebut Kurt Lewin mencari tahu bagaimana perubahan dapat dikelola dan menghasilkan sesuatu. Pada akhirnya Kurt Lewin menyimpulkan bahwa

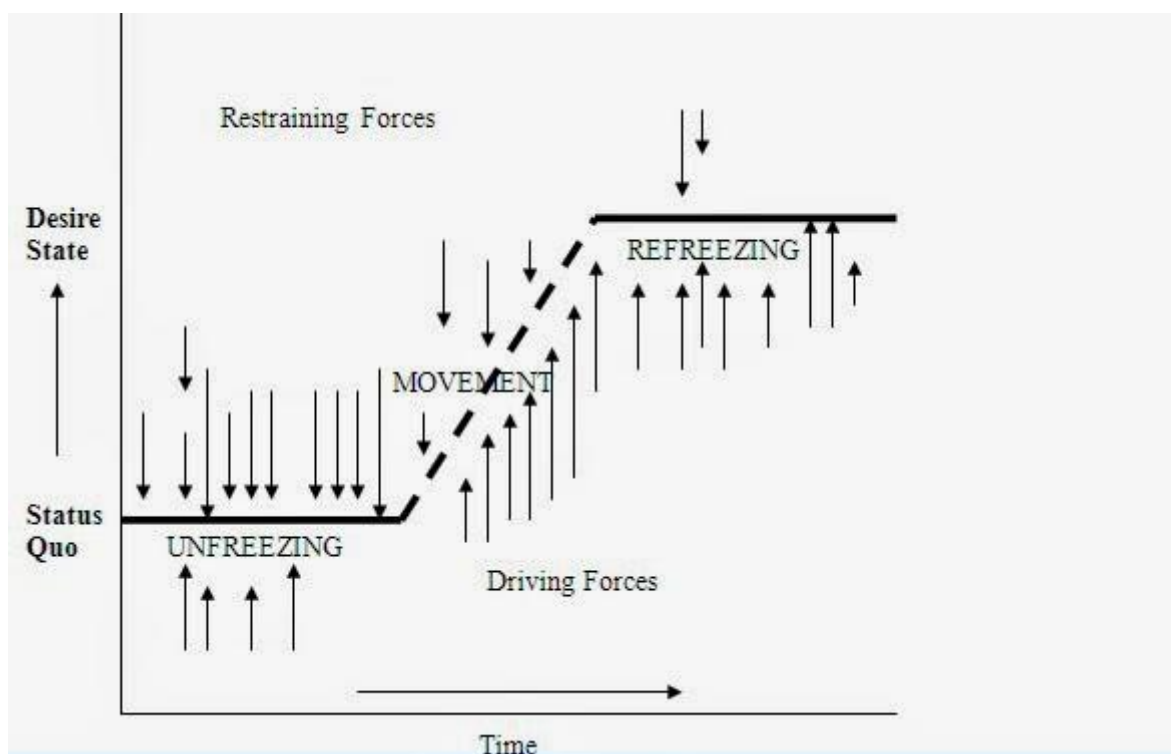
dalam perubahan organisasi terdapat kekuatan pendorong (*driving forces*) akan berhadapan dengan keengganan (*resistances*) untuk berubah. Perubahan organisasi dapat terjadi apabila kekuatan pendorong (*driving forces*) dimaksimalkan atau dengan meminimalisasi keengganan (*resistances*).

Lewin (1951) mengidentifikasi dua persyaratan agar perubahan organisasi dapat sukses yaitu; Pertama, dengan menganalisis dan memahami bagaimana kelompok sosial yang terbentuk, termotivasi dan dipelihara. Untuk melakukan hal ini, Kurt Lewin mengembangkan *The Force Field Analysis Model*. Kedua, untuk mengubah perilaku kelompok sosial, Kurt Lewin mengembangkan penelitian tindakan dan model tiga tahapan perubahan organisasi.

Model tiga tahapan dalam perubahan yang dicetuskan oleh Lewin (1951) terlihat seperti pada Gambar 1. Tahapan perubahan organisasi menurut Lewin (1951) terdiri dari tahapan awal perubahan (*unfreezing*), tahap-

an proses transisi (*movement*), dan tahapan keberlanjutan (*refreezing*). Tahapan awal perubahan (*unfreezing*) merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Pada tahapan yang pertama ini Kurt Lewin mendasarkan pada teori perilaku manusia dan perilaku organisasi, yang terbagi dalam tiga sub proses yang berhubungan dengan kesiapan perubahan, yaitu: perubahan diperlukan karena adanya gap yang besar antara tujuan dan kenyataan, adanya kecemasan dan mempelajari sikap *defensiveness* dan *resistance* yang ada dalam organisasi.

Tahapan proses transisi (*movement*) merupakan langkah yang berupa tindakan dengan memperkuat *driving forces* maupun memperlemah *resistances*. Langkah yang diambil dapat juga dengan menganalisa gap antara *desire status* dengan *status quo* dan kemudian mencermati program-program perubahan yang sesuai untuk dilakukan



Sumber: Lewin (1951)

Gambar 1  
Tiga Tahapan Perubahan Organisasi Menurut Lewin (1951)

agar dapat memberi solusi yang optimal untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Terakhir adalah tahapan keberlanjutan (*refreezing*) adalah upaya membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru dengan mengembangkan *new self concept dan identity* dan *new interpersonal relationships* agar perilaku yang baru tetap berjalan. (Gunawan *et al.*, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori perubahan organisasi yang dikembangkan oleh Kurt Lewin karena fokus utama dari teori perubahan organisasinya Kurt Lewin adalah “proses” dari perubahan organisasi, yaitu tindakan yang dilakukan selama terjadinya perubahan organisasi yang dimaksud. Penelitian ini mengkaji bagaimana “proses” dari perubahan organisasi pada pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka penerapan SAP akrual dan perolehan opini WTP dilihat dari aspek persiapan serta strategi yang dilakukan pada tahapan *movement* menurut Lewin (1951).

### **Pengalaman Persiapan Penerapan Basis Akrual pada Pemerintah Daerah**

Menurut Athukoral and Reid (2003) dalam makalah yang berjudul *“Accrual Budgeting and Accounting in Government and its Relevance for Developing Member Countries”* memberikan rekomendasi bagi negara berkembang dalam menerapkan basis akrual, yaitu kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrual. Dalam penerapan SAP berbasis akrual terdapat dua strategi pendekatan yaitu model *big bang* dan model bertahap. Pendekatan model *big bang* adalah penerapan basis akrual dilakukan untuk seluruh unit pemerintahan secara bersamaan dan dengan jangka waktu yang singkat. Contohnya yang dilakukan oleh Pemerintah Selandia Baru. Keuntungan pendekatan ini adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat menghindari risiko kepentingan. Kelemahannya adalah beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin tim-

bul, dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah. Kesuksesan penerapan di Selandia Baru karena tiga faktor yang mendukung yakni adanya krisis fiskal, dukungan dari para politisi dan adanya reformasi birokrasi yang memberikan fleksibilitas kepada sumber daya manusia.

Pendekatan penerapan basis akrual yang kedua adalah dilakukan secara bertahap. Contohnya yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Keuntungan pendekatan ini adalah dapat diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara paralel untuk mengurangi resiko kegagalan. Kelemahannya adalah akan membutuhkan banyak sumber daya manusia karena menerapkan dua basis secara paralel, perubahan budaya organisasi tidak terjadi, dan hilangnya momentum penerapan basis akrual.

Selain kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan akrual, rekomendasi selanjutnya bagi negara berkembang dalam penerapan SAP akrual menurut Athukoral and Reid (2003) antara lain: pertama, komitmen politik dalam penerapan basis akrual bagi negara berkembang menjadi sangat penting karena komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan. Kedua mengkomunikasikan tujuan, hasil dan manfaat yang ingin dicapai dari penerapan basis akrual secara intens kepada pihak-pihak yang terkait. Ketiga, perlunya tenaga akuntan yang profesional. Tenaga akuntan sangat dibutuhkan dalam penerapan SAP berbasis akrual karena kekurangan tenaga akuntan dapat menyebabkan penundaan penerapan SAP berbasis akrual. Untuk mendapatkan tenaga akuntan dan auditor yang profesional dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas seperti pelatihan dan rekrutmen;

Keempat, sistem informasi akuntansi harus memadai. Kunci utama dari penerapan SAP berbasis akrual adalah informasi akuntansi berbasis kas. Oleh karena itu

apabila suatu negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat diandalkan, maka negara tersebut terlebih dahulu berkonsentrasi pada peningkatan sistem dan proses yang telah ada yaitu basis kas, sebelum mempertimbangkan perpindahan ke akuntansi akrual.

Rekomendasi berikutnya adalah badan audit tertinggi harus memiliki sumberdaya yang tepat karena badan audit tertinggi dalam hal ini BPK, memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual sehingga dibutuhkan tenaga auditor yang profesional. Dan yang terakhir, penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh, sedangkan menurut Widjajarro (2008), faktor kunci keberhasilan penerapan basis akuntansi akrual antara lain independensi dari sebuah proses penyusunan standar akuntansi, komunikasi yang efektif, keberhasilan menangani isu-isu terkait, dan kemampuan mengembangkan

perubahan akuntansi selain dari faktor pendukung dari politisi dan lembaga audit.

### **Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah**

Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan pemerintah. Menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2004, bahwa pemeriksaan laporan keuangan pemerintah adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah di Indonesia dilakukan oleh pihak internal pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pihak eksternal pemerintah yaitu BPK. Perbedaan pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal menurut Suwanda (2013) terlihat seperti dalam Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Perbedaan Pemeriksaan Internal dan Pemeriksaan Eksternal**

No	Perbedaan	Pemeriksaan Internal	Pemeriksaan Eksternal
1	Keberadaan Pemeriksa	Berada dalam organisasi yang diperiksa	Berada di luar organisasi yang diperiksa
2	Tugas	Membantu manajemen menyusunpertanggungjawaban keuangannya dengan baik	Melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban laporan keuangan dan selanjutnya memberikan opini
3	Tujuan	Untuk melakukan perbaikan	Untuk memberikan penilaian/opini
4	Hasil Pemeriksaannya	Tidak sepenuhnya objektif dan tidak untuk publik	Lebih objektif dan layak untuk publik
5	Waktu	Dalam periode tahun berjalan	Setelah tahun berjalan

Sumber: Suwanda (2013)



Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu BPK adalah opini. Menurut undang-undang No 15 Tahun 2004, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi laporan keuangan yang disajikan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) efektifitas desain dan implementasi sistem pengendalian internal, (2) kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku (3) kesesuaian dengan SAP dan (4) kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada catatan atas laporan keuangan.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan BPK yaitu opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar dan pernyataan menolak memberikan opini. Pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah tersebut akan menambah nilai kualitas atas informasi laporan keuangan yang dilaporkan tersebut sehingga berguna bagi penggunanya. Dengan kata lain, inti dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk menyimpulkan bahwa kondisi laporan keuangan dari entitas pelaporan yang diperiksa adalah wajar (John dan Setiawan, 2009).

Di samping memberikan nilai tambah atas kualitas informasi laporan keuangan pemerintah sehingga berguna bagi penggunanya, Suwanda (2013) memaparkan maksud dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK antara lain: (1) Kinerja aparatur pemerintah semakin meningkat, aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab akan terwujud, (2) menghilangkan praktek penyalahgunaan wewenang dan KKN, (3) menegakkan peraturan yang berlaku dan (4) mengamankan keuangan negara.

### **Ruang Lingkup Pemeriksaan BPK Atas Pengelolaan Keuangan Daerah**

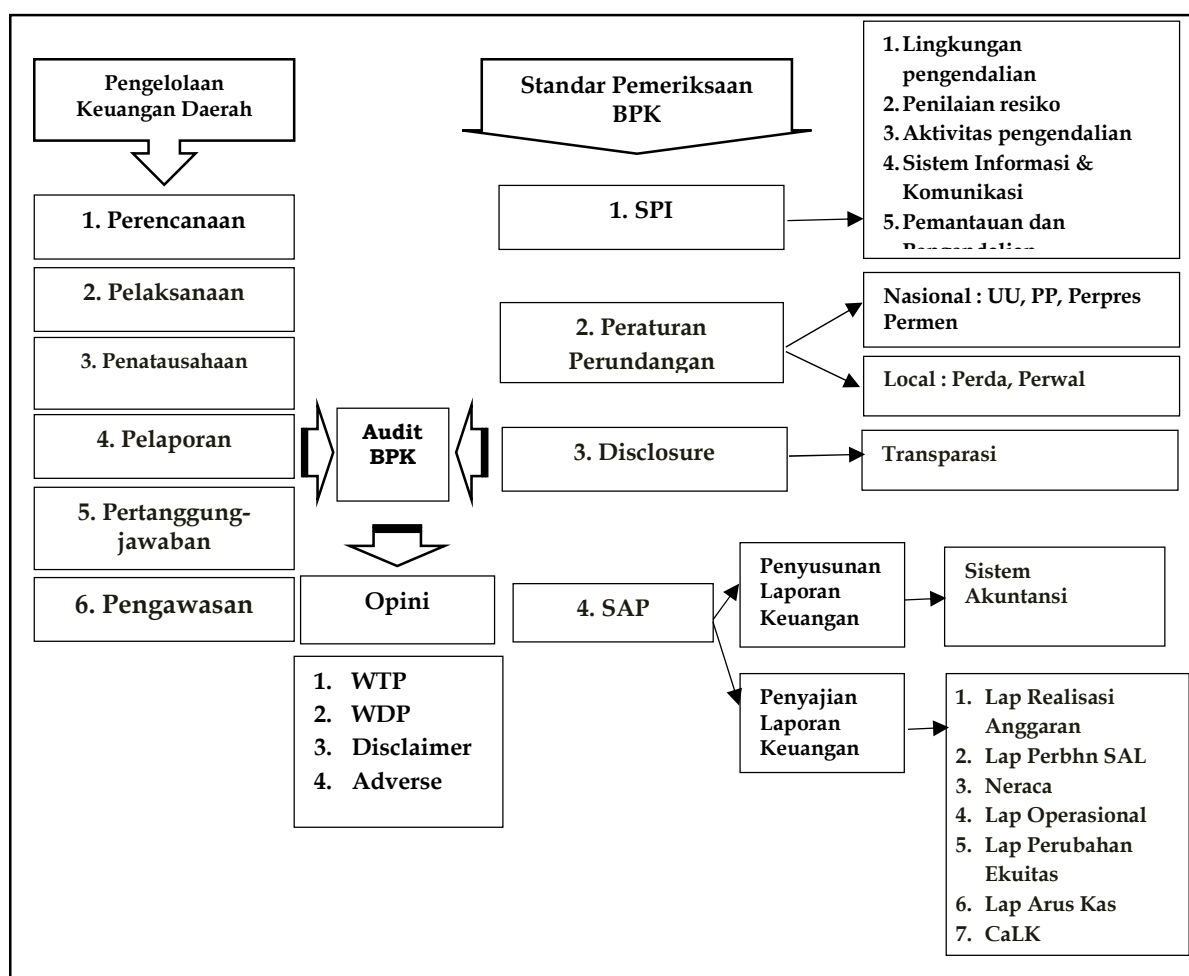
Ruang lingkup hasil pemeriksaan BPK meliputi seluruh pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksana-

an, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hingga pengawasan. Pengawasan yang dilakukan BPK harus mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Gambar 2 menunjukkan ruang lingkup atas pemeriksaan Keuangan Daerah.

### **Strategi Perolehan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Ichsan (2013) berpendapat bahwa perolehan opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu indikator keberhasilan dari penerapan SAP akrual. Untuk dapat memperoleh opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan daerah perlu adanya strategi. Strategi tersebut dapat diformulasikan dengan cara mengidentifikasi kondisi yang saat ini dan mengidentifikasi regulasi yang menjadi tujuan yang akan dicapai. Apabila terdapat gap antara kondisi dengan regulasi yang ada maka strategi dapat diformulasikan untuk menuntun langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya (John dan Setiawan, 2009).

Terdapat 10 (sepuluh) strategi yang dikemukakan oleh Suwanda (2013) untuk memperoleh opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu: pertama, adalah komitmen pimpinan. Puncak pimpinan dalam pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD yang merupakan pembuat kebijakan, keputusan dan peraturan daerah. Oleh karena itu komitmen dari pemimpin menjadi sangat penting dalam strategi perolehan opini WTP. Contoh langkah nyata sebagai wujud komitmen pemimpin terhadap strategi perolehan opini WTP yaitu kepala daerah bersama DPRD merancang dan menetapkan peraturan daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang berpedoman dengan SAP akrual. Langkah selanjutnya menginstruksikan kepada kepala SKPD untuk membuat



Sumber: Suwanda (2013)

**Gambar 2**  
**Ruang Lingkup Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah**

pakta integritas tentang komitmen dan dukungannya terhadap perolehan opini WTP.

Setelah komitmen pimpinan, strategi berikutnya adalah membentuk tim. Pembentukan tim terdiri dari tim supervisi dan tim monitoring pelaksanaan rencana aksi untuk tingkat pemerintah daerah. Pada masing-masing SKPD juga perlu dibentuk tim penyelenggaraan akuntansi, tim pengelola Barang Milik Daerah (BMD), tim tindak lanjut temuan BPK di SKPD.

Ketiga, membuat rencana aksi. Tujuan dibuat rencana aksi adalah agar seluruh jajaran dalam pemerintah daerah dapat mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh opini WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Rencana aksi adalah pernyataan tentang langkah-langkah nyata untuk menuju perbaikan tata kelola pemerintah daerah, yang disusun dengan mengidentifikasi langkah yang harus dilakukan, pihak yang melaksanakan, waktu pelaksanaannya, input yang akan digunakan dan output yang akan dihasilkan. Rencana aksi berisikan langkah-langkah penyelesaian temuan BPK dan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya temuan yang sama untuk tahun yang akan datang serta langkah-langkah perbaikan kebijakan, sistem dan prosedur.

Keempat, menyiapkan anggaran. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggarannya untuk melaksanakan rencana aksi perolehan opini WTP. Setelah menyiapkan anggaran strategi berikutnya adalah

rancang Sistem Pengendalian Intern (SPI). Rancang SPI adalah kegiatan membuat rancangan SPI terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mengendalikan proses pengelolaan laporan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah seperti pengendalian kas, pengendalian persediaan, pengendalian piutang, pengendalian aktiva tetap, pengendalian belanja dan pengendalian lainnya.

Keenam, perbaikan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Perbaikan SAK, SIMDA dan SIMBADA harus mengacu pada SAP. SAK, SIMDA dan SIMBADA sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Ketujuh, peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK salah satu penyebabnya adalah karena permasalahan sumber daya aparatur. Permasalahan sumber daya aparatur meliputi permasalahan kuantitas dan kualitas/kapasitas. Untuk mengantisipasi permasalahan masih rendahnya kualitas dan kapasitas, pemerintah daerah perlu mengambil solusi seperti mengadakan atau mengirim aparaturnya untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, seminar yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Strategi berikutnya adalah dukungan Teknologi Informasi (TI) yang memadai. Pada era teknologi informasi yang berkembang sangat cepat seperti yang terjadi sekarang ini, penggunaan sistem teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk memperoleh opini pemerintah daerah perlu segera menggunakan dan meningkatkan perangkat teknologinya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerahnya.

Kesembilan, optimalisasi peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pada pemerintah daerah yang dimaksud APIP adalah Inspektorat. Dalam rangka peroleh-

an opini WTP peran inspektorat perlu dioptimalkan karena sebelum laporan keuangan pemerintah daerah diserahkan kepada BPK, laporan keuangan tersebut akan direview terlebih dahulu oleh inspektorat. Di samping itu Inspektorat juga dapat berperan sebagai pendamping pada saat BPK melakukan pemeriksaan di daerahnya.

Terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Faktor penting dalam rangka perolehan opini WTP adalah melaksanakan rencana aksi yang telah disusun secara konsisten, konsekuen dan kontinu. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk menyakinkan bahwa langkah/kegiatan/strategi yang telah dilakukan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.

Berbeda dari Suwanda (2013), menurut Nasution (2008) terdapat 6 (enam) langkah yang perlu diperhatikan agar laporan keuangan pemerintah memperoleh opini WTP yaitu: (1) sistem pembukuan dan perencanaan anggaran, (2) sistem aplikasi teknologi komputer, (3) inventarisasi aset dan utang, (4) ketepatan waktu dalam pembuatan laporan keuangan dan audit serta pertanggungjawaban anggaran, (5) Inspektorat melakukan *quality assurance*, (6) sumber daya manusia.

Sementara itu John dan Setiawan (2009) mengelompokkan strategi perolehan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek input, aspek proses dan aspek output. Strategi pada aspek input yaitu: personil pengelolaan keuangan, organisasi keuangan dan sistem pengelolaan keuangan. Untuk aspek proses, strateginya antara lain: komitmen pimpinan, proses akuntansi, prosedur dan *data base* keuangan, pengawasan pengelolaan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, sedangkan strategi untuk aspek output yaitu: kelengkapan laporan keuangan, ketepatan waktu pelaporan keuangan, perolehan opini atas laporan keuangan, implementasi upaya perbaikan laporan keuangan dan penghargaan pengelolaan keuangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian studi kasus di bawah paradigma *post-positivism*. Model studi kasus dipilih karena peneliti ingin mendapatkan deskripsi yang jelas, dan mendalam tentang bagaimana proses dari perubahan organisasi pada pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka penerapan SAP akrual dan perolehan opini WTP dilihat dari aspek persiapan serta strategi yang dilakukan pada tahapan *movement* menurut Lewin.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Setioko (2011) bahwa pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan apabila tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan deskripsi yang jelas dan mendalam tentang suatu peristiwa yang nuansanya terikat sangat kental dengan tempat dan waktu. Dengan melihat aspek filosofi yang dimilikinya, maka peneliti memilih menggunakan paradigma *post-positivism* karena seperti yang disampaikan oleh Guba (1990), Denzin dan Lincoln (1994) bahwa paradigma *post-positivism* lebih mampu mengantarkan pada tingkat pemahaman yang lebih mendalam atas realita sosial yang majemuk dan kompleks dibanding dengan paradigma *positivism*. Alasan lainnya karena paradigma *post-positivism* lebih memberikan jaminan objektivitas, dimana hubungan antara peneliti dengan yang diteliti bersifat interaksi dan netral.

### Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain dengan observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang terlihat pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi persiapan apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka penerapan SAP akrual, strategi apa saja yang digunakan untuk memperoleh Opini

WTP serta bagaimana perubahan organisasi yang terjadi pada pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka penerapan SAP akrual dan perolehan opini WTP.

Teknik pengumpulan data yang kedua pada penelitian ini adalah wawancara mendalam berupa wawancara semi terstruktur. Narasumber/informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan tentang implementasi SAP akrual dan strategi perolehan opini WTP yaitu Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Kepala DPPKAD Kota Pekalongan, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Inspektur Kota Pekalongan, Kabid. Perbendaharaan dan Akuntansi pada DPPKAD Kota Pekalongan.

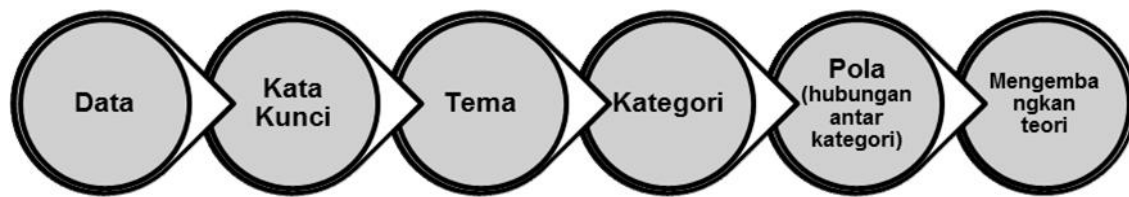
Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumen-dokumen yang digunakan antara lain: peraturan perundangan seperti PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan-peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah, kebijakan strategi perolehan opini WTP, dokumen RPDMD pemerintah Kota Pekalongan tahun 2010-2015, dan peraturan daerah lainnya.

### Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis tematik. Menurut Poerwandari (2013) analisis tematik adalah proses mengkode informasi yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema atau indikator kompleks sehingga peneliti dapat menemukan pola yang pihak lain tidak dapat melihatnya secara jelas. Tahapan-tahapan analisis data pada penelitian ini yaitu:

Pertama, mengorganisasi data dengan memilih kasus atau permasalahan yang terkait dengan penerapan SAP akrual dan strategi perolehan opini WTP pada pemerintah Kota Pekalongan, membuat pertanyaan penelitian, dan menentukan cara pengumpulan data.

Kedua, setelah data mentah diperoleh dari lapangan, tahapan berikutnya adalah analisis awal data dengan melakukan pemadatan faktual dan menemukan tema-tema.



Sumber: Poerwandari (2013)

**Gambar 3**  
**Pengembangan Konsep pada Tahapan Analisis Awal Data**

Pengembangan konsep pada tahapan kedua ini menurut Poerwandari (2013), seperti terlihat dalam Gambar 3.

Ketiga, analisis data menurut teori. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah koding. Menurut Poerwandari (2013) yang mendasarkan pada pemikiran Strauss dan Corbin (1990) koding terbagi menjadi 3 langkah yaitu koding terbuka (mengidentifikasi kategori-kategori), koding aksial (mengorganisasi data dengan cara baru yaitu mengembangkan hubungan antar kategori atau hubungan kategori dengan sub kategori di bawahnya) dan koding selektif (menyeleksi kategori yang paling mendasar untuk kemudian menghubungkannya dengan kategori-kategori yang secara sistematis dan memvalidasi hubungan tersebut). Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori perubahan organisasi. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah fungsi *explanation*, yang mana teori digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan organisasi yang terjadi pada pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka penerapan SAP Akruar dan Perolehan Opini WTP, bagaimana agar perubahan organisasi dapat berhasil, bagaimana taktik yang digunakan untuk menghadapi perlawanan dari anggota organisasi yang menolak adanya perubahan organisasi.

Keempat, pengujian terhadap dugaan/kesimpulan sementara dapat dilakukan dengan cara mempertajam tema dan pola yang muncul, serta mencari data yang dapat memberikan gambaran berbeda dari pola-pola yang muncul tersebut.

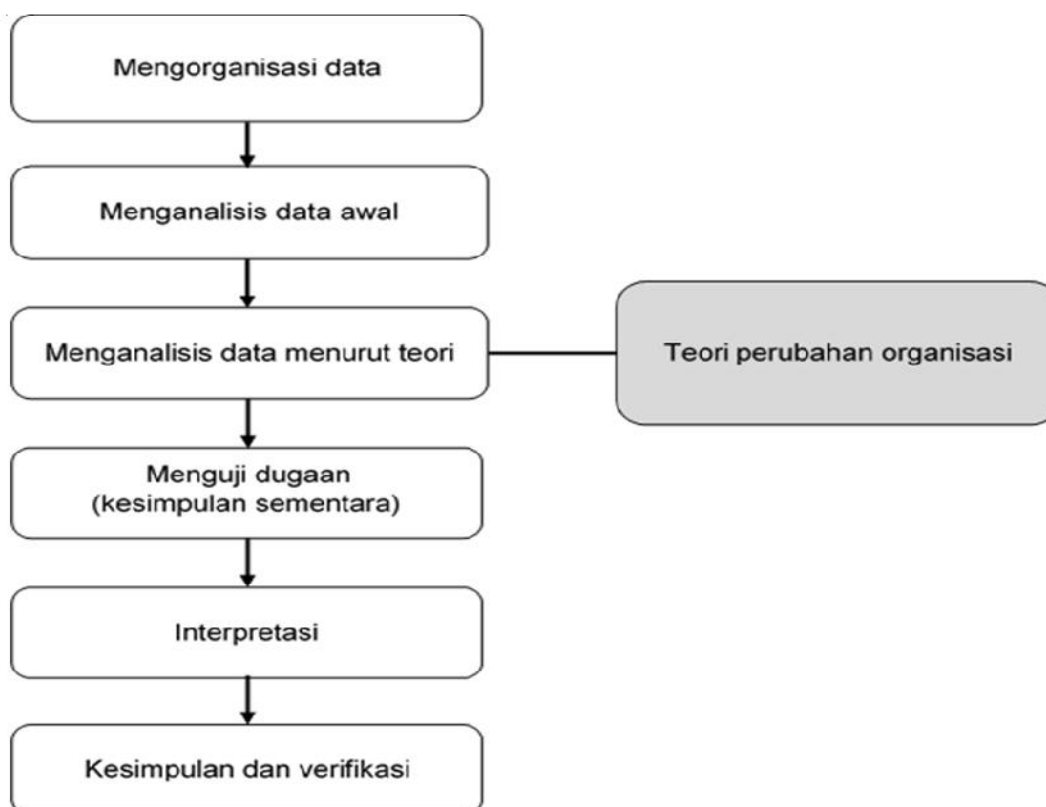
Kelima, tahapan interpretasi yaitu memahami data secara lebih ekstensif dan

mendalam. Keenam, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan akhir akan diperoleh bukan hanya sampai pada akhir pengumpulan data, melainkan dibutuhkan suatu verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan melihat kembali *field note* (data mentah) agar kesimpulan yang diambil lebih kuat dan bisa dipertanggung jawabkan.

Secara ringkas tahapan-tahapan analisis data pada penelitian ini seperti terlihat pada gambar 4.

#### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan pemerintah Kota Pekalongan tahun anggaran 2014 masih menggunakan SAP dengan basis kas menuju akruar. Dengan ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 maka pada tahun anggaran 2015 pemerintah Kota Pekalongan sudah harus menerapkan SAP Akruar. Oleh karena SAP akruar merupakan hal yang baru bagi pemerintah daerah termasuk juga pemerintah Kota Pekalongan maka dalam penerapannya menemukan berbagai macam kendala. Kendala-kendala tersebut diantaranya dengan adanya kewajiban pemakaian dan pemanfaatan perangkat lunak legal dan FOSS di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan sehingga harus membangun aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMBADA dengan basis FOSS. Kendala berikutnya keterbatasan dan tidak meratanya pengetahuan para pengelola keuangan/penyusun laporan keuangan tentang SAP akruar, masih belum selesainya inventarisasi aset yang dilakukan pemerintah Kota Pekalongan. Dalam rangka penerapan SAP akruar maka berbagai macam kendala tersebut



**Gambar 4**  
**Tahapan Analisis Data pada Penelitian ini**

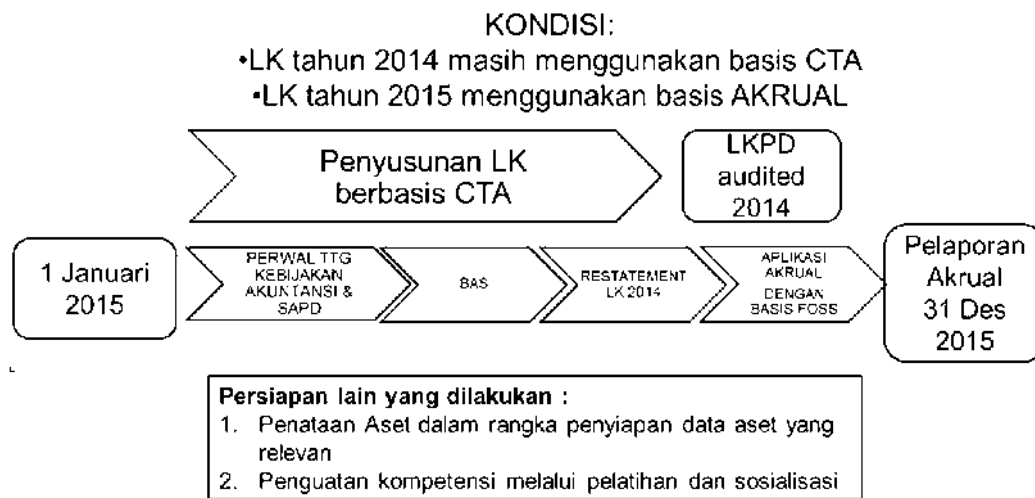
harus segera diselesaikan.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Pekalongan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut diantaranya: dengan menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, pembangunan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah berbasis FOSS, pelatihan bagi para pengelola keuangan, para penyusun laporan keuangan dan auditor. Langkah berikutnya dalam persiapan penerapan SAP akrual adalah *restatement* laporan keuangan dan penataan aset. Gambar 5 berikut ini menggambarkan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka penerapan SAP akrual.

### Strategi Perolehan Opini WTP

Salah satu tujuan dari penerapan SAP akrual adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara, sedangkan opini WTP merupakan salah satu cerminan akuntabilitas, oleh karena itu idealnya dengan diterapkannya SAP berbasis akrual akan lebih memudahkan pemerintah daerah mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya. Akan tetapi banyak pemerintah daerah termasuk juga pemerintah Kota Pekalongan mengkhawatirkan adanya kemungkinan penurunan opini atas Laporan keuangan pemerintah pada tahap-tahap awal implementasi akuntansi berbasis akrual.

Untuk itu perlu adanya persiapan, strategi, dan upaya yang serius dari Pemerintah Daerah agar laporan keuangannya bisa mendapatkan opini WTP dari BPK.



**Gambar 5**

**Persiapan Penerapan SAP Akrual yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan**

Berikut ini beberapa strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan untuk memperoleh opini WTP dari BPK. Dalam memperoleh opini WTP dari BPK antara lain (1) menargetkan perolehan opini WTP di tahun 2013 dalam dokumen RPJMD tahun 2010-2015; (2) Menetapkan beberapa kebijakan tentang penerapan SAP akrual yang juga sekaligus merupakan kebijakan yang dibuat dalam rangka memperoleh Opini WTP dari BPK; (3) Melaksanakan rekomendasi BPK dengan melakukan penataan aset dengan inventarisasi aset-aset yang pencatatannya masih belum terperinci, meningkatkan pengelolaan dan manajemen aset daerah, dan meningkatkan pengendalian intern; (4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan serta penyusun laporan keuangan dengan rekrutmen tenaga kegiatan, penataan PNS dengan latar belakang pendidikan akuntansi, dan pelatihan; (5) meningkatkan dan menjaga komitmen bersama pihak-pihak yang terkait seperti pimpinan daerah, para kepala SKPD dan semua pengelola keuangan untuk melaksanakan tata kelola keuangan dan barang daerah yang baik dalam rangka perolehan opini WTP.

Dengan menetapkan beberapa kebijakan tentang penerapan SAP akrual yang juga sekaligus merupakan kebijakan yang

dibuat dalam rangka memperoleh opini WTP dari BPK. Walaupun demikian pemerintah Kota Pekalongan tetap harus menetapkan kebijakan khusus/teknis tentang strategi perolehan opini WTP yang berupa rencana aksi dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini karena kriteria pemberian opini WTP tidak saja kesesuaian dengan SAP saja, masih ada 3 kriteria lainnya yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan kecukupan pengungkapan.

**Penerapan SAP Akrual dan Strategi Perolehan Opini Menuju WTP Terjadi Karena Disengaja dan Adanya Tekanan**

Lewin (1951) berpendapat perubahan organisasi adalah pergerakan organisasi yang disengaja dari satu tahap yang sudah tetap ke tahapan yang lain, dan hal ini terjadi karena adanya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Perubahan dari SAP kas menuju akrual ke SAP akrual merupakan proses yang sengaja dilakukan karena ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2014. Dengan kata lain, Pemerintah Pusat melalui kedua peraturan tersebut, memaksa atau menekan pemerintah daerah untuk menerapkan SAP akrual. Pemerintah Kota Pekalongan dalam melaksanakan penerapan SAP akrual ini juga memandang-

nya sebagai sebuah kewajiban untuk tunduk terhadap peraturan perundangan yang berlaku, hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada DPPKAD Kota Pekalongan (Ibu Niluh) seperti berikut ini:

*“Penerapan SAP akrual pada pemerintah Kota Pekalongan merupakan kewajiban untuk tunduk terhadap PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2014”*

Senada dengan Ibu Niluh, Inspektur Kota Pekalongan (Ibu Erli) berpendapat seperti berikut:

*“Awalnya regulasi mengatur seperti itu, ya otomatis daerah wajib melaksanakannya tapi karena ini sesuatu yang baru sehingga perlu waktu saja. Hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman para bendahara (pengelola keuangan/ penyusun laporan keuangan) tidak sama sehingga akan menjadi salah satu kendala”*

Oleh karena sudah ditetapkan maka mau tidak mau pemerintah Kota Pekalongan wajib menerapkan SAP akrual. Hal ini sama dengan hasil penelitian Faradillah (2013) pada pemerintah Kota Makassar menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Karena hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

SAP akrual merupakan sesuatu yang baru sehingga pemerintah Kota Pekalongan perlu waktu dalam menerapkannya dan perlu strategi untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin akan timbul. Usaha yang dilakukan pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka menerapkan SAP akrual sudah dijabarkan pada awal bagian hasil dan pembahasan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015, di mana pemerintah Kota Pekalongan telah menargetkan perolehan opini WTP di tahun 2013 maka semua pihak di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan harus berupaya mewujudkan target perolehan opini WTP tersebut. Oleh sebab itu perubahan perolehan opini WDP menuju WTP merupakan proses yang disengaja dilakukan pemerintah daerah dan merupakan tekanan bagi semua SKPD yang berada di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Salah satu bentuk tekanan yang dilakukan oleh pimpinan pemerintah Kota Pekalongan terhadap semua pihak yang berada dibawahnya adalah dengan membuat pakta integritas untuk melaksanakan tata kelola keuangan dan barang daerah yang baik dalam rangka perolehan opini WTP. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bapeda Kota Pekalongan (Ibu Ning):

*“Beberapa tahun yang lalu sudah pernah ada semacam pakta integritas tentang komitmen untuk mendukung diperolehnya opini WTP Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan. Pakta integritas tersebut ditandatangani Walikota dan semua kepala SKPD. Dan pakta integritas ini dikawal DPP-KAD, untuk memastikan bahwa semua kepala SKPD bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mendukung diperolehnya opini WTP Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan”.*

Opini terakhir untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan tahun anggaran 2014 adalah masih WDP. Walaupun dalam dokumen RPJMD 2010-2015 pemerintah Kota Pekalongan telah menargetkan perolehan opini di tahun 2013 tetapi sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Pekalongan belum menetapkan kebijakan khusus atau kebijakan teknis tentang upaya strategi perolehan opini WTP yang merupakan kebijakan turunan dari



RPJMD. Padahal apabila pemerintah Kota Pekalongan sudah menyusun kebijakan teknis tentang upaya strategi perolehan opini WTP memudahkan bagi agen perubahan (pimpinan) melakukan tekanan kepada semua pihak khusus para kepala SKPD dan para penyusun laporan keuangan untuk berupaya agar laporan keuangan daerah Kota Pekalongan memperoleh opini WTP. Hossan (2015) berpendapat, agen perubahan memainkan peran penting dalam menentukan sifat strategi manajemen perubahan. Perubahan SAP kas menuju akrual ke SAP akrual merupakan proses yang disengaja dan merupakan bentuk tekanan dalam rangka melaksanakan upaya perubahan perolehan opini WTD menuju WTP, karena menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 konsekuensinya apabila pemerintah Kota Pekalongan tidak menerapkan SAP akrual maka tidak mungkin memperoleh opini WTP dari BPK.

### **Tujuan Penerapan SAP Akrual dan Perolehan Opini WTP Merupakan Tujuan yang Baik**

Perubahan dari SAP kas menuju akrual ke SAP akrual dan strategi perolehan opini WDP menuju WTP merupakan bentuk tekanan dan juga merupakan proses yang sengaja dilakukan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan agar laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa alasan untuk melakukan perubahan dari SAP kas menuju akrual dan perubahan dari opini WTD menuju WTP merupakan tujuan yang baik. Seperti yang disampaikan Lewin (1951), perubahan organisasi dilakukan harus berdasarkan beberapa hal diantaranya, perubahan hanya boleh dilaksanakan untuk tujuan yang baik.

Untuk mengetahui tujuan penerapan SAP akrual dan perolehan opini WTP bagi pemerintah Kota Pekalongan, peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan tentang makna dan tujuan dari opini WTP, berikut petikan jawaban dari

Kepala DPPKAD Kota Pekalongan (Bapak Bambang):

*“Opini WTP kan hanya pengakuan saja bahwa pengelolaan keuangan kita sesuai dengan ketentuan dan kinerja kita sudah baik, dengan diperolehnya opini WTP yang jelas akan menambah semangat, atau singkatnya WTP ya berartikan semacam ada pendapat bahwa di dalam penatausahaan keuangan kita sudah dilakukan sesuai dengan koridor yang ada itu gitu”.*

Kemudian Inspektur Kota Pekalongan (Ibu Erli) menambahkan:

*“Opini WTP diberikan banyak manfaatnya antara lain: sebagai evaluasi buat diri kita, yang kedua masyarakat akan memberikan apresiasi karena apapun penuh makna. Dengan diperolehnya opini WTP masyarakat akan memandang kita lebih positif. Seharusnya ada atau tidaknya penilaian (pemeriksaan) sudah seharusnya harus dikelola sesuai dengan peraturan perundangan. WTP menjadi penyemangat bagi kita semua. Misal: Inspektorat daerah kabupaten atau kota lain menanyakan kita memperoleh opini apa. Apabila kita masih WDP padahal daerah lain sudah WTP akan menjadi motivasi kita untuk memperoleh WTP. Mereka yang kabupaten dengan luas wilayah yang jauh lebih luas saja bisa memperoleh WTP masa kita yang kota dengan luas wilayah kecil masih WDP. Dan perolehan opini WTP merupakan kebanggaan bagi daerah. Pengalaman dari kabupaten boyolali bahwa dengan diperolehnya opini WTP memudahkan mereka melakukan koordinasi dengan pusat untuk memperoleh stimulasi dana. Kabupaten boyolali mendapat semacam reward berupa penambahan alokasi dana karena diyakini pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sudah tertib dan sudah sesuai peraturan perundangan dan SAP. Opini WTP menjadi barang jualan kepala daerah kemana-mana “kami sudah WTP” hal ini mencerminkan pengelolaan keuangan kita sudah*

*bagus, sudah tertib. Untuk tujuannya kurang lebihnya sama dengan yang tadi saya sampaikan bahwa perolehan opini WTP yaitu untuk memberikan satu penilaian baik di internalnya pemerintah bagi para aparatnya sebagai evaluasi diri dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan dan aset sudah baik."*

Dari penjelasan yang disampaikan kedua informan diatas terungkap bahwa peolehan opini WTP bertujuan antara lain: sebagai penyemangat baik bagi pemerintah Kota Pekalongan sendiri ataupun bagi pemerintah daerah lainnya, sebagai alat evaluasi diri, diperolehnya penilaian positif dari masyarakat karena dengan diperolehnya opini WTP masyarakat melihat bahwa pengelolaan keuangan dan aset sudah baik, kebanggaan bagi pemerintah daerah dan dapat dijadikan sebagai "barang jualan" nya kepala daerah. Terakhir dengan diperolehnya opini WTP akan memudahkan dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh stimulasi dana.

Selain perubahan hanya boleh dilaksanakan untuk alasan yang baik, Lewin (1951) juga berpendapat perubahan organisasi dilakukan harus secara bertahap dan semua perubahan harus direncanakan dan tidak secara drastis atau mendadak. Target perolehan opini dalam RPJMD 2010-2015 adalah ditahun 2013, tidak mendadak langsung di tahun 2010. Proses penerapan akrual pun dimulai dengan SAP berbasis kas kemudian SAP berbasis kas menuju akrual sampai yang terakhir SAP akrual full.

### **Resistensi dari Para Pengelola Laporan Keuangan dan Penyusun Laporan Keuangan**

Menurut Lewin (1951) dalam perubahan orgnisasi terdapat kekuatan pendorong (*driving forces*) akan berhadapan dengan keengganan (*resistances*) untuk berubah. Perubahan organisasi dapat terjadi apabila kekuatan pendorong (*driving forces*) di-

maksimalikan atau dengan meminimalisasi keengganan (*resistences*). Di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan sikap resisten terhadap penerapan SAP akrual dan perolehan opini WTP ditunjukkan dengan pernyataan negatif dari para pengelola keuangan dan para penyusun laporan keuangan.

Tidak terdapat pertentangan yang di tunjukkan dengan tindakan ekstrim. Berikut penjelasan dari Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada DPPKAD Kota Pekalongan (Ibu Niluh);

*"Pasti ada sikap resistensi dari para pengelola keuangan dan para penyusun laporan keuangan tetapi sampai dengan saat ini sikap resistensi tersebut hanya sebatas pernyataan saja tidak dalam tindakan yang ekstrem. Contohnya pernyataan seperti: "buat apa seh akrual?" "WDP ato WTP sama saja"*

Berbeda dengan Ibu Niluh, Inspektur Kota Pekalongan (Ibu Erli) menyampaikan seperti berikut:

*"Terkait opini WTP sepertinya tidak ada penolakan, tetapi terkait penerapan SAP akrual karena hal baru maka masih terkesan bagi kita semua hal yang sulit. Misal potensi pendapatan harus dihitung yang membuat terkesan rumit dan ngapain kok repot seperti itu seh. Seperti kita tahu bahwa dalam pengakuan dalam SAP akrual relatif rumit dan apalagi mereka harus keluar dari zona nyaman mereka. Mereka sudah nyaman pada SAP kas menuju akrual. Mereka harus belajar lagi. Tetapi berjalannya waktu apalagi dibantu dengan adanya aplikasi SIM menjadikan terbiasa akhirnya bisa. Penolakannya hanya dalam bentuk pernyataan negatif saja".*

Menurut Ichsan (2013), sikap keengganan muncul karena tidak ada kesiapan dan ketidakmauan menerima perubahan. SAP berbasis akrual akan merubah banyak hal dalam sistem dan prosedur organisasi yang selama ini sudah dijalankan sehingga kesiapan dan kemauan menerima perubahan merupakan hal yang sangat penting. Ber-

beda dengan Ichsan (2013), Faradillah (2013) berpendapat kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi SAP berbasis akrual. Untuk memaksimalkan kekuatan pendorong (*driving forces*) dan mengurangi keengganan (*resistences*), pemerintah Kota Pekalongan melakukan beberapa upaya di antaranya dengan mempersiapkan SDM dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi. Berikut keterangan dari Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada DPP-KAD Kota Pekalongan (Ibu Niluh);

*“Untuk menghadapi sikap resistensi tersebut, pemerintah Kota Pekalongan sejak tahun 2013 sudah mempersiapkan SDM untuk menerapkan SAP akrual, bentuk kegiatannya antara lain: dilakukan bintek dan sosialisasi bahkan dilakukan branch-marking ke kota tanggerang yang sudah melaksanakan SAP akrual”.*

Dengan upaya peningkatan SDM dan berbagai upaya yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya diharapkan dapat mengurangi sikap resisten dari semua pihak di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan sehingga perubahan organisasi dalam rangka penerapan SAP akrual dan perolehan opini WTP dapat berhasil sesuai dengan tujuannya.

#### ***Unfreezing, Movement dan Refreezing: Langkah-langkah untuk Mengelola Perubahan Organisasi yang Terjadi.***

Model tiga tahapan dalam perubahan yang dicetuskan oleh Lewin (1951) antara lain tahapan awal perubahan (*unfreezing*), tahapan proses transisi (*movement*), dan tahapan keberlanjutan (*refreezing*). Tahapan awal perubahan (*unfreezing*) merupakan suatu proses kesadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Pada tahapan pemerintah Kota Pekalongan sejak tahun 2013 telah melakukan berbagai macam sosialisasi, pelatihan untuk mengkomunikasikan maksud dan tujuan diterapkannya SAP akrual. Dengan pelatihan

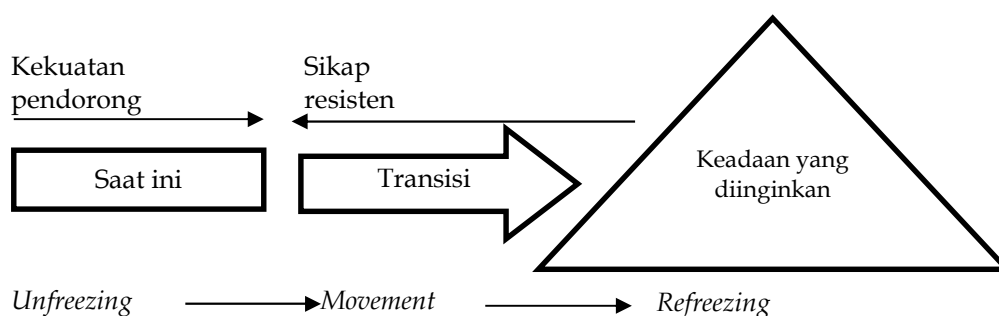
dan sosialisasi ini diharapkan para pengelola keuangan dan penyusun laporan keuangan pada pemerintah Kota Pekalongan sadar bahwa perubahan dari SAP kas menuju akrual ke SAP akrual dan perubahan perolehan opini WTD menuju WTP merupakan sebuah kebutuhan dan perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan. Disamping itu juga dalam tahapan ini pemerintah Kota Pekalongan mengamati dan mempelajari bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh para pengelola keuangan dan para penyusun laporan keuangan, apakah ada kecemasan? Atau apakah terlihat sikap kekuatan pendorong (*driving forces*) atau sikap keengganan (*resistances*)?

Tahapan proses transisi (*movement*) merupakan langkah yang berupa tindakan dengan memperkuat *driving forces* maupun memperlemah *resistances*. Dalam tahapan ini langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Pekalongan antara lain; (1) Menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur akuntansi yang merupakan kebijakan teknis penerapan SAP akrual pada Pemerintah Kota Pekalongan. Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, maka terdapat acuan yang digunakan para pengelola keuangan dan penyusun laporan keuangan dalam menerapkan SAP akrual di pemerintah Kota Pekalongan; (2) Membangun Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) berbasis FOSS. SIMDA Keuangan dan SIMBADA merupakan alat bantu untuk memudahkan bagi para penyusun laporan keuangan dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah; (3) Pelatihan bagi para pengelola keuangan di semua SKPD, penyusun laporan keuangan dan para auditor. Tingkat

pemahaman dan pengetahuan tentang SAP akrual yang dimiliki oleh para pengelola keuangan atau penyusun laporan keuangan tidaklah sama sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan secara berkelanjutan. Dengan upaya-upaya tersebut dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan.

Terakhir adalah tahapan keberlanjutan (*refreezing*) yaitu upaya membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan diantaranya adalah dengan meningkatkan dan menjaga komitmen bersama pihak-pihak yang terkait seperti pimpinan daerah, parakepala SKPD dan se-

mua pengelola keuangan untuk melaksanakan tata kelola keuangan dan barang daerah yang baik dalam rangka penerapan SAP akrual dan perolehan opini WTP. Untuk lebih memudahkan dalam memahami bagaimana perubahan organisasi yang terjadi pada pemerintah Kota Pekalongan sebagai upaya penerapan SAP akrual dan perolehan opini WTP peneliti mengembangkan model tiga tahapan perubahan organisasi dari Hossan (2015) yang ditunjukkan pada Gambar 6 sedangkan Gambar 7 menunjukkan perubahan organisasi pada pemerintah Kota Pekalongan berdasarkan Teori Perubahan Organisasi Kurt Lewin (1951) dengan model yang dikembangkan Hossan (2015).



Sumber: Lewin (1951) yang kemudian dikembangkan oleh Hossan (2015)

**Gambar 6**  
Tiga tahapan perubahan organisasi menurut Kurt Lewin (1951)

**Tabel 2**  
Perubahan Organisasi pada Pemerintah Kota Pekalongan berdasarkan Teori Perubahan Organisasi Kurt Lewin

No	Teori Perubahan Organisasi Kurt Lewin	Kasus Pemerintah Kota Pekalongan
1	Perubahan organisasi sengaja diciptakan karena adanya tekanan	Penerapan SAP Akrual dan Strategi Perolehan Opini Menuju WTP terjadi karena disengaja dan adanya tekanan
2	Perubahan organisasi hanya boleh dilaksanakan untuk alasan yang baik	Tujuan penerapan SAP akrual dan Perolehan Opini WTP merupakan tujuan yang baik
3	Perubahan organisasi akan memunculkan kekuatan pendorong ( <i>driving forces</i> ) akan berhadapan dengan keengganan ( <i>resistances</i> ) untuk berubah. Perubahan organisasi dapat terjadi apabila <i>driving forces</i> dimaksimalkan atau dengan meminimalisasi <i>resistances</i>	Adanya resistensi dari Para Pengelola Laporan Keuangan dan Penyusun Laporan Keuangan. Upaya peningkatan SDM dan berbagai upaya lainnya diharapkan dapat meminimalisasi sikap resisten dari semua pihak di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan

Tabel 2 lanjutan

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | Tahapan awal perubahan ( <i>unfreezing</i> ) merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah                       | Mengadakan sosialisasi, pelatihan untuk mengkomunikasikan maksud, tujuan diterapkannya SAP aktual dan perolehan opini WTP   |
| 5 | Tahapan transisi ( <i>movement</i> ) merupakan langkah yang berupa tindakan dengan memperkuat <i>driving forces</i> maupun memperlemah <i>resistances</i> | Melakukan persiapan penerapan SAP aktual, menyusun dan melaksanakan strategi perolehan opini WTP untuk memperkuat <i>driving forces</i> maupun memperlemah <i>resistances</i> |
| 6 | Tahapan berlanjut ( <i>refreezing</i> ) upaya membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru agar perilaku yang baru tetap berjalan             | Meningkatkan dan menjaga komitmen bersama pihak-pihak yang terkait  |

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

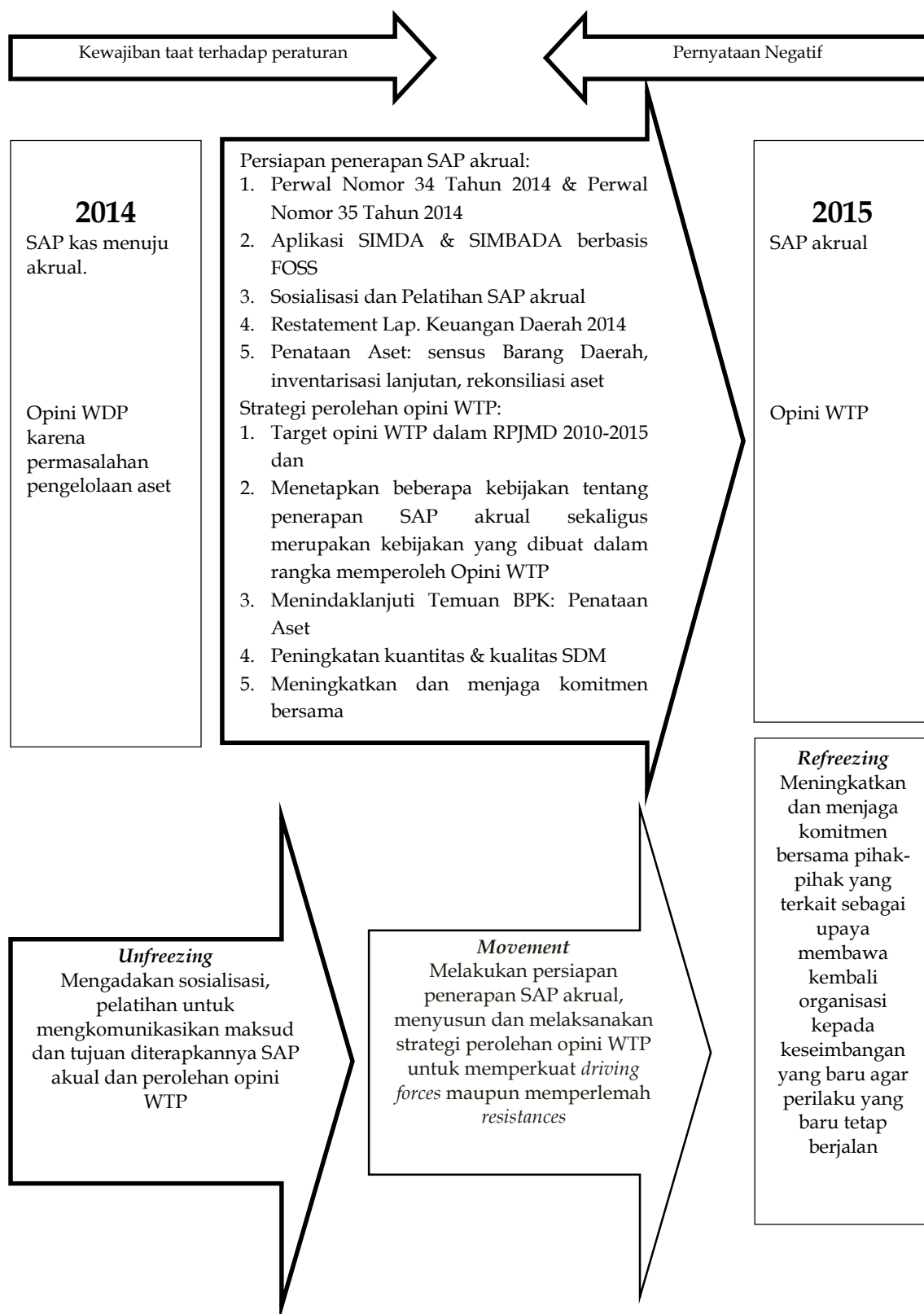
Pada tahun anggaran 2015 pemerintah Kota Pekalongan sudah menerapkan SAP akrual dari yang sebelumnya menggunakan SAP kas menuju akrual. Dalam rangka penerapan SAP akrual pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai persiapan seperti: menetapkan Perwal No. 34 tahun 2014 dan perwal No. 35 tahun 2014, membangun aplikasi SIMDA dan SIMBADA berbasis FOSS, mengadakan sosialisasi dan pelatihan, melakukan restatement laporan keuangan 2014 serta melakukan penataan aset. Sampai dengan pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2014, opini yang diperoleh pemerintah Kota Pekalongan adalah WDP. Untuk dapat memperoleh opini WTP, pemerintah Kota Pekalongan melakukan strategi-strategi antara lain: menargetkan opini WTP pada RPJMDnya, menetapkan beberapa kebijakan tentang penerapan SAP akrual sekaligus merupakan kebijakan yang dibuat dalam rangka memperoleh Opini WTP, menindaklanjuti temuan BPK, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, serta meningkatkan dan menjaga komitmen bersama.

Perubahan dari SAP kas menuju akrual ke SAP akrual dan strategi perolehan opini WDP menuju WTP merupakan bentuk teknanan dan juga merupakan proses yang

sengaja dilakukan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan agar laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sikap resisten terhadap penerapan SAP akrual dan perolehan opini WTP ditunjukkan dengan pernyataan negatif dari para pengelola keuangan dan para penyusun laporan keuangan. Persiapan dalam rangka penerapan SAP akrual dan strategi untuk memperoleh opini WTP yang dilakukan pemerintah Kota Pekalongan diharapkan dapat mengurangi sikap resisten dari semua pihak sehingga perubahan organisasi dalam rangka penerapan SAP akrual dan perolehan opini WTP dapat berhasil sesuai dengan tujuannya. Tabel 2 menunjukkan perbandingan perubahan organisasi menurut Kurt Lewin dan perubahan organisasi pada pemerintah Kota Pekalongan.

### Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah target wawancara yang tidak terpenuhi. Hal ini terjadi karena ada informan kunci yang tidak dapat memberikan informasi penting yang peneliti harapkan. Peneliti memperoleh informasi tersebut dari informan lain. Beberapa informasi penting hanya diperoleh dari satu orang informan saja sehingga tidak dapat dilakukan konfirmasi ulang terhadap informan lain.



**Gambar 7**  
**Perubahan Organisasi pada Pemerintah Kota Pekalongan berdasarkan Teori Perubahan Organisasi Lewin (1951) dengan model yang dikembangkan Hossan (2015)**

Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya lebih mempertimbangan penambahan informan kunci lain sebagai alternatif apabila terjadi kasus seperti dalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Athukorala, S. L. and B. Reid. 2003. *Accrual Budgeting and Accounting in Government and its Relevance for Developing Member Countries*. Asian Development Bank. Manila
- Cunningham, J. B dan J. S. Kempling. 2009. Implementing Change in Public Sector Organizations. *Management Decision* 47 (2): 330-344.
- Damayanti, R. A. 2013. Akuntansi Akrua dan Penerapannya di Sektor Publik: Sebuah Agenda Pembaharuan. Dalam *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Konsep, Pemikiran, dan Implementasi Di Indonesia*. BPKP. Jakarta. Desember 2013: 1-17
- Darto, M. 2013. Kepemimpinan Transformasional dalam Konteks Perubahan Organisasi di Lembaga Administrasi Negara. *Jurnal Borneo Administrator* 9(1): 239-264.
- Denzin, N. K. dan Y. S. Lincoln. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Sage. London.
- Faradillah, A. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Universitas Hassanudin Makassar. Makassar. [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5646/Skripsi\\_i](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5646/Skripsi_i), 20. 11 Mei 2015 (20:47)
- Guba, E. 1990. *The Paradigm Dialog*. Sage London.
- Gunawan, R. D, R. R. Suryono, dan I. Purwanto 2010. Anilasa Perubahan Manajemen Dalam Implementasi SI/TI pada Perguruan Tinggi ABC. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2010. Juni 19:A1-A6
- Hossan, C. 2015. Applicability of Lewin's Change Management Theory in Australian Local Government. *International Journal of Business and Management* 10(6): 53-65.
- Ichsan, M. 2013. Kajian Variabel-Variabel Kesuksesan Penerapan Basis Akrua Dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan. Dalam *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Konsep, Pemikiran, dan Implementasi Di Indonesia*. BPKP. Jakarta. Desember 2013: 44-64.
- John, Y. M. dan D. Setiawan. 2009. *Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Edisi Pertama. Gramedia. Jakarta
- Lewin, K. 1951. *Field Theory in Social Science*. Harper and Row: New York
- Nasution, A. 2008. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Era Reformasi. Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jakarta
- Poerwandari, E. K. 2013. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Edisi ketiga. LPSP3 UI. Depok
- Robbins, S. P dan T. Judge. 2015. *Organizational Behavior*. Pearson. New Jersey. Terjemahan Ratna Saraswati dan Febriella Sirait. *Perilaku Organisasi*. Edisi keenambelas. Salemba Empat. Jakarta
- Setioko, B. 2011. Penggunaan Metoda Grounded Theory Dibawah Payung Paradigma Post-Positivistik pada Penelitian Tentang Fenomena Sosial Perkotaan. *Modul* 11(1): 1-6
- Strauss, A. dan J. Corbin. 1990. *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*. Sage Publication. London
- Suwanda, D. 2013. *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. Edisi kedua. PPM Manajemen. Jakarta
- Widjajarso, B. 2008. Penerapan Basis Akrua pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan. *Kajian Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua*. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

## RANTAI NILAI PERDAGANGAN PRODUK ORGANIK DAN DETERMINAN KEPUTUSAN KONSUMEN UNTUK MEMBELI

Yanuarita Hendrani

*rita@unpar.ac.id*

Sandra Sunanto

PC Suroso

Anna Farina Poerbonegoro

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan

### ABSTRACT

*The shift in consumption patterns from non-organic to organic products has hit many developed countries in the last two decades. This is supported by the increase in people's income, urbanization, awareness of environmental and health issues and changes in the demographic structure. For a developing country like Indonesia, shifting eating pattern such as that experienced by the developed countries actually has occurred especially among the middle to upper- income level. This study aims to analyze the value chain of production and distribution of organic products and their determinants of purchase. The results show that the distribution channels of organic products vary. Some farmers sell their products directly to consumers or supermarket, while others use agents to collect the products and sell them to the consumers, supermarkets or to other agents. The highest added value creation occurs in the upstream. From the ordered logit model applied, it can be concluded that there is a positive effect of income on the probability of buying organic products more frequently but there is no significant effect of education. The probability to buy organic products more frequently is also higher for younger ages, but the reason to consume related with the environment and a high price do not affect the probability to buy organic products.*

*Key wards: value chain, organic, ordered logit model, added value*

### ABSTRAK

Pergeseran pola konsumsi masyarakat dari produk non organik ke produk organik telah melanda banyak negara maju dalam dua dekade terakhir. Hal ini didukung oleh peningkatan pendapatan masyarakat, urbanisasi, kesadaran akan masalah lingkungan dan kesehatan serta perubahan struktur demografi. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pergeseran pola makan seperti yang dialami oleh negara-negara maju sebenarnya juga telah terjadi terutama di kalangan masyarakat menengah ke atas. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis value chain produksi dan distribusi produk organik dan mencari determinan pembelian produk organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur distribusi produk organik bervariasi. Dari kebun ada yang langsung ke konsumen atau supermarket dan ada yang melalui rantai agen baru ke konsumen akhir, dengan penciptaan nilai tambah tertinggi di hulu. Dari model ordered logit yang diaplikasikan dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap probabilitas konsumen membeli produk organik lebih sering tetapi pendidikan tidak; probabilitas untuk membeli produk organik lebih sering juga lebih tinggi untuk usia lebih muda, tetapi alasan lingkungan hidup dan harga yang mahal tidak berpengaruh terhadap probabilitas untuk membeli produk organik lebih sering.

Key words: value chain, organik, ordered logit model, nilai tambah

### PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir telah terjadi pergeseran dalam pola perdagangan dan konsumsi makanan di dunia. Pergeseran ini

terutama terjadi dalam komposisi bahan makanan organik dan non organik. Di Amerika Serikat, misalnya, perdagangan produk organik meningkat sekitar 20 %/tahun sejak



1990 (Dimitri and Green, 2002). Dalam kondisi perekonomian yang belum normal sejak krisis keuangan global, di tahun 2015 menurut *The World of Organic Agriculture* (2015), permintaan produk organik di Amerika Serikat meningkat 11,5% dari tahun sebelumnya. Hal ini juga diikuti oleh negara-negara maju lain terutama di kawasan Eropa.

Regmi (2001) mengemukakan bahwa urbanisasi, peningkatan pendapatan, perubahan struktur demografi, perbaikan sistem transportasi dan persepsi konsumen tentang kualitas, keamanan dan dampak terhadap kesehatan menjadi penyebab pergeseran pola konsumsi masyarakat. Regmi lebih lanjut menjelaskan, karena adanya perbedaan pendapatan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, perubahan pola perdagangan dan konsumsi pun berbeda. Peningkatan pendapatan di negara-negara berkembang membawa peningkatan konsumsi dan perdagangan daging, sebagai peralihan dari yang semula mayoritas karbohidrat ke arah protein hewani. Hal ini sering kali diikuti dengan peningkatan impor daging dan pakan ternak. Berlipat gandanya penduduk urban di negara-negara berkembang juga menyebabkan peningkatan konsumsi dan perdagangan *processed food* kemasan yang praktis bagi konsumen perkotaan yang sibuk. Di negara-negara maju sebaliknya konsumsi daging menurun dalam 30 tahun, dari 79% budget untuk makanan di tahun 1970 menjadi 62% di tahun 2000. Sebaliknya anggaran untuk sayuran dan buah-buahan mengalami peningkatan sebesar 25% dalam kurun waktu yang sama. Dalam penelitiannya Regmi *et al.* (2004) juga menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat Amerika Serikat membuat pola konsumsi mereka lebih mengarah ke pola diet ala *Mediterranean* yang lebih banyak menyajikan pasta, sayuran dan buah-buahan segar dan ikan.

Hasil penelitian yang lebih kini dari Leenes *et al.* (2010) mengenai pola konsumsi berdasarkan pertumbuhan ekonomi, juga menunjukkan peningkatan *animal-protein*

*intake* ketika perekonomian meningkat pendapatan per kapitanya, tapi kemudian menurun ketika pendapatan per kapitanya makin tinggi. Perubahan pola konsumsi di negara-negara maju tersebut disebabkan karena peningkatan kesadaran akan kesehatan dan persepsi akan kualitas nutrisi, keamanan makanan dan lingkungan hidup serta peningkatan kesadaran akan *animal welfare*.

Produk organik adalah produk yang dihasilkan melalui pengelolaan produksi secara organis tanpa menggunakan pupuk dan pestisida kimia serta mengikuti pola tanam organis (untuk sayuran dan buah-buahan). Scialabba (2013) mengemukakan bahwa pengelolaan pertanian organik berdampak positif pada lahan dan air. Cara bertani organik meningkatkan kesuburan lahan dan struktur tanah menjadi lebih kaya sehingga produktivitas tanah meningkat. Air yang dibutuhkan untuk irigasipun berkurang dan tidak terjadi peresapan nitrat dari pupuk kimia ke dalam air tanah. Dengan demikian cara bertani ini dapat menurunkan *environmental stress*. Stockdale dan Watson (2009) mengatakan bahwa pertanian organik memperbaiki *biodiversity* tanah karena terkumpulnya material organis di dalamnya. Oquist *et al.* (2007) dalam penelitiannya di Minnesota, Amerika Serikat mendapati bahwa pertanian organik memperbaiki kualitas air di sana dan sebaliknya untuk pertanian konvensional. Tata cara produksi secara organis ini di satu sisi menurunkan biaya pupuk, pestisida dan air untuk irigasi, tetapi di lain pihak meningkatkan biaya tenaga kerja. Masih diperdebatkan apakah biaya produksi pertanian organik ini lebih murah atau lebih mahal dibanding dengan produksi pertanian konvensional, namun, persepsi masyarakat akan unsur kesehatan, kualitas nutrisi dan keamanan serta idealisme terkait dengan lingkungan hidup membuat sebagian konsumen bersedia membayar premi (membayar harga lebih mahal) untuk produk organik sehingga hal ini menjadi pendorong perdagangan dan produksi komoditi organik.

Dari pengamatan, adalah benar bahwa secara umum ketika pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia meningkat, pertama-tama yang ingin ditingkatkan oleh masyarakat adalah konsumsi protein hewani, namun, selama distribusi pendapatan tidak merata, menurut teori Linder seperti dikemukakan dalam Rauh (2010), akan selalu ada *overlapping segments* pendapatan yang membuat adanya kesamaan permintaan akan barang/konsumsi antara negara-negara yang pendapatannya per kapitanya berbeda. Peningkatan besarnya kelompok pendapatan menengah ke atas di negara-negara berkembang seperti Indonesia akan mendekatkan pola konsumsi kedua kelompok negara, dan ini merupakan prospek perdagangan dan produksi yang bagus untuk pertanian dan perdagangan produk organik.

Di Indonesia belum ada data resmi mengenai porsi perdagangan produk organik dibandingkan dengan hasil pertanian konvensional. Namun dari pengamatan, walaupun segmen pasarnya masih relatif kecil, terjadi peningkatan baik produksi maupun perdagangan produk organik terutama di kota-kota besar. Dalam perdagangan selalu ada dua sisi yang berinteraksi yaitu produsen dan konsumen dengan hasil interaksi berupa volume perdagangan dan harga produk. Dari sisi produsen, harga yang ditawarkan merupakan akumulasi nilai tambah dari berbagai tahapan produksi sampai ke rantai pemasaran akhir. Dari sisi konsumen, kesediaan membeli selain dibatasi oleh pendapatan juga ditentukan oleh persepsi konsumen akan nilai komoditi dan karakteristik konsumen yang bersangkutan. Fokus penelitian ini dengan model yang digunakan adalah menentukan determinan keputusan konsumen untuk membeli produk organik, namun, mengingat sedikitnya informasi mengenai bagaimana rantai nilai sehingga terbentuk harga penawaran yang tinggi untuk komoditi organik, maka studi ini akan diawali dengan pembentukan rantai nilai (*value chain*) dalam perdagangan produk organik.

Beberapa penelitian yang relatif baru mengenai keputusan konsumen untuk membeli produk organik antara lain dilakukan di Amerika Serikat oleh Dimitri dan Dettmann (2012) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan, pendapatan, status pernikahan dan akses terhadap produk organik menentukan kemungkinan membeli produk organik. Di Malaysia, Khan *et al.* (2015) dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa yang menjadi motif utama untuk membeli produk organik adalah aspek keamanan dan kesehatan. Sementara itu Kahl *et al.* (2012) dari hasil penelitian mereka di Eropa menyimpulkan bahwa konsumen membeli produk organik atas dasar sikap emosional dan sifat natural dari produk organik sedangkan pembeli produk non organik lebih bersifat rasional.

Penelitian mengenai keputusan membeli produk organik di Indonesia sendiri masih langka. Moslehpour *et al.* (2014) membandingkan keputusan membeli beras organik konsumen Taiwan dan Indonesia dan mendapati bahwa konsumen wanita di Indonesia lebih berpengetahuan mengenai produk organik daripada konsumen Taiwan, tetapi konsumen wanita Indonesia membeli lebih sedikit beras organik karena harganya masih terlalu mahal; namun sikap positif terhadap lingkungan hidup mempengaruhi keputusan membeli beras organik di kedua negara. Walaupun objeknya berbeda, yaitu mengenai buah sayur segar, penelitian lain mengenai keputusan konsumen Indonesia untuk membeli seperti yang dilakukan oleh Arsil *et al.* (2014) menunjukkan bahwa aspek harga dan kesehatan menentukan keputusan konsumen untuk memilih produk lokal.

Masih langkanya penelitian mengenai produk organik di Indonesia terutama dalam kaitannya dengan keputusan konsumen untuk membeli, memberi celah kontribusi bagi penelitian ini. Aspek lingkungan hidup, pendidikan konsumen, harga produk dan pendapatan yang menjadi perhatian peneliti-peneliti di negara lain juga menjadi aspek yang ditinjau perannya dalam me-

mentukan keputusan konsumen untuk membeli dalam penelitian ini.

**TINJAUAN TEORETIS**

**Rantai Nilai Tambah (*Value chain*)**

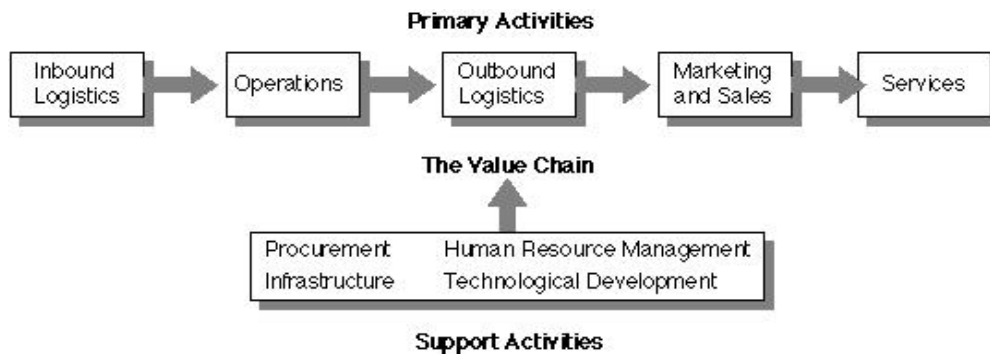
Dari Weber dan Labaste (2010), *Value chain* dapat dimaknai sebagai tahapan aktivitas produksi dari awal konsepsi sampai ke tangan konsumen akhir dengan penciptaan nilai yang menyertainya pada setiap tahap. Tahapan-tahapan tersebut dapat meliputi design, produksi, marketing, distribusi sampai ketangan konsumen dan setelahnya bila produk tersebut di recycle. Dengan mengamati rantai penciptaan nilai ini perusahaan mengetahui pada tahap mana efisiensi perlu dilakukan. Konsep Value chains pertama kali dikemukakan oleh Porter (1985) yang digambarkan pada Gambar 1.

Dari Gambar 1, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikategorikan dalam aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Aktivitas primer meliputi: (a) *Inbound logistic* yaitu aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mendapatkan input dari *supplier*; (b) *Operation* yaitu proses mengubah input menjadi output; (c) *Outbound logistic* yaitu aktivitas pengumpulan dan pendistribusian output; (d) *marketing and sales* yang meliputi kegiatan menawarkan dan memfasilitasi pembelian dan (e) *services* yaitu aktivitas pelayanan kepada pembeli sesudah barang terjual. Aktivitas primer ini selayaknya

didukung oleh *Human resource management* dan *technological development*.

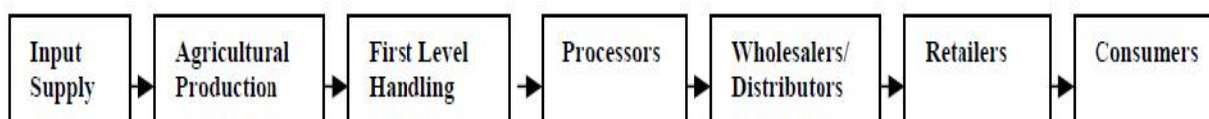
Analisa *value chain* di atas biasanya diterapkan pada aktivitas di sebuah perusahaan. Di sektor pertanian, rantai penciptaan nilai bisa terjadi antar usaha yang terkait secara vertikal. Seperti dikemukakan oleh Weber dan Labaste (2007, 2010) tehnik analisis ini sering digunakan untuk mencari tahu pada tahapan mana intervensi harus dilakukan oleh pemerintah atau lembaga donor di bidang pertanian dan agribisnis. Perhatian ini diberikan karena banyak pelaku di bidang ini merupakan kelompok yang kurang mampu tapi produknya mempunyai peran signifikan dalam perekonomian. Minat akan analisis *value chain* ini juga muncul karena makin kompleksnya rantai produksi dan perdagangan produk agro dan kesadaran konsumen akan kualitas produk yang mengharuskan adanya kolaborasi yang baik antar pelaku di setiap tahapan rantai nilai (Donovan *et al.*, 2015). Habib (2011), misalnya memberi panduan bagaimana mengembangkan *value chain* yang pro rakyat miskin. Ricketts *et al.* (2013) dalam penelitiannya di Ghana antara lain menemukan bahwa masuknya petani kakao dalam *value chain* produksi dan perdagangan kakao dapat menekan risiko fluktuasi harga dan meredistribusi risiko yang lainnya.

Untuk sektor pertanian, bagian aktivitas primer dari bagan *value chain* di atas dapat digambarkan pada Gambar 2.



**Gambar 1**  
**Bagan Value chain dari Porter**

Sumber: IfM Cambridge University website <http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/dstools/value-chain/>



**Gambar 2**  
Konsep *value Chain* di sektor pertanian

Sumber: (Gloy, 2005)

Dalam praktek bisa saja satu atau lebih tahapan dilewati. Misalnya, untuk sayuran organik, processors tidak ada karena sayuran segar tidak diproses lebih lanjut dan kemungkinan tidak melewati *wholeseller* atau pedagang pengumpul tergantung pada saluran pemasaran yang digunakan.

Wiswall (2009) mengemukakan bahwa dalam kasus produk organik saluran pemasaran yang bisa ditempuh antara lain melalui: (1) Supermarket sebagai retailer, (2) *Wholeseller*/distributor (pedagang pengumpul), (3) *Farmers' markets*, (4) Koperasi komunitas, (5) Penjualan langsung ke pengguna (restoran, catering, home delivery), (6) Penjualan online

Nilai tambah adalah nilai penjualan dikurangi biaya-biaya yang ditanggung di luarbiaya tenaga kerja. Semakin besar nilai tambah berarti porsi yang diterima oleh kelompok pekerja dan owner berupa profit bertambah besar. Besarnya nilai tambah tergantung pada harga produk dan biaya-biaya yang ditanggung di tahapan rantai nilai tersebut.

### Determinan untuk membeli produk

Standard textbook dalam teori ekonomi mikro mengatakan bahwa permintaan akan suatu produk biasa dijelaskan sebagai fungsi dari harga barang itu sendiri ( $P_x$ ), harga produk yang terkait baik substitusi atau komplemen ( $P_y$ ), pendapatan konsumen (Inc.), ekspektasi harga ( $Exp$ ), populasi (Pop), taste ( $T$ ) dan Others ( $O$ ) seperti pendidikan, Gender dan lain-lain. Jika dituliskan dalam fungsi:

$$Q_x^D = F(P_x, P_y, Inc., Exp, Pop, T, O)$$

Selera/preferensi (Taste) tidak dibahas teralalu dalam di teori ekonomi, tetapi menjadi ranah ilmu psikologi dan ilmu perilaku

konsumen dalam bidang marketing. Lima aspek diluar Selera dalam fungsi permintaan di atas lebih terkait langsung dengan sisi keuangan, sedangkan Taste (preferensi) banyak terkait dengan nilai-nilai dasar (values) seseorang dan persepsi terhadap objek dalam memenuhi nilai-nilai yang bersangkutan. Watson (1922) seperti dikutip dalam Diclemente dan Hantula (2003) mengatakan: "To get hold of your consumer, or better, to make your consumer react, it is only necessary to confront him with either fundamental or conditioned emotional stimuli." Banyak perusahaan menggunakan iklan untuk menciptakan *emotional stimuli* para konsumennya, namun *emotional stimuli* juga bisa muncul dari asosiasi antara apa yang diyakini oleh konsumen dengan karakteristik produk tanpa harus melalui iklan. Ada teori yang sering disebut bila objek pembahasannya terkait dengan gerakan lingkungan hidup, hak asasi manusia dan semacamnya yang menyangkut belief system seseorang, yaitu Value-Belief Norm theory (VBN) dari Stern *et al.* (1999). Mereka mengatakan: "Individuals who accept a movement's basic values, believe that valued objects are threatened, and believe their actions can help restore those values experience an obligation (personal norm) for pro-movement action that creates a predisposition to provide support; the particular type of support that results is dependent on the individual's capabilities and constraints."

Teori di atas mengatakan bahwa individu yang menerima nilai-nilai dasar dari suatu gerakan dan merasa bahwa objek yang terkait dengan nilai-nilai tersebut terancam dan percaya bahwa tindakan mereka dapat mengembalikan kondisi objek tersebut, akan merasa terpanggil untuk melakukan tindakan yang memberi dukungan untuk mem-

perbaikinya. Mengingat adanya keterkaitan antara produk organik dengan gerakan penyelamatan lingkungan hidup, diperkirakan konsumen yang mendukung/pro lingkungan hidup akan mendukungnya melalui pembelian/konsumsi produk organik yang lebih besar. Seperti halnya produk lain yang mempunyai kualitas lebih tinggi, produk organik mempunyai *niche market* yang lebih sempit dari pada *conventional non organic products*. Apa yang dikatakan oleh teori VBN mungkin akan mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk memilih produk organik/non organik diluar variabel harga, pendapatan dan kondisi socio demografik konsumen (usia, gender, pendidikan).

Dampak dari masing-masing variabel tidak selalu mudah untuk dipastikan. Variabel harga biasanya berhubungan negatif dengan kemungkinan seseorang membeli produk. Variabel usia dapat berpengaruh negatif karena biasanya aktivis lingkungan hidup adalah kelompok yang lebih muda; tetapi karena produk organik juga terkait dengan kesehatan, bisa jadi hubungannya akan positif. Pendapatan diharapkan mempunyai pengaruh positif, tetapi idealisme akan lingkungan hidup bisa memperlemah pengaruh tersebut. Pendidikan diharapkan mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan untuk membeli produk organik.

#### METODE PENELITIAN

Analisa rantai nilai tambah (*value chain*) dilakukan melalui pendekatan deskriptif dari hasil wawancara dengan para pelaku dimasing-masing tahapan rantai nilai dan pengamatan langsung melalui kunjungan lapangan. Belum ada data yang akurat mengenai jumlah pengusaha tani organik saat survei dilakukan (bulan Januari–September 2014). Informasi dari retailer (supermarket) menunjukkan ada 14-16 usaha tani organik yang menjadi pemasok supermarket di kota Bandung. Dari jumlah tersebut 8 diantaranya bersedia untuk kami kunjungi. Semuanya berlokasi di Jawa Barat dan hampir semua produknya adalah sayuran; hanya 1 pertanian padi.

Determinan keputusan konsumen untuk membeli produk organik dicari dengan menggunakan model ordered logit. Model ordered logit digunakan bila *dependent variable* merupakan variabel yang sifatnya ordinal, seperti dalam survei opini, survei tingkat kepuasan, *Bond rating* dan sebagainya. Model ekonometrika dengan variabel terikat yang berskala ordinal ini pertama kali dikemukakan oleh Zaviona dan McKelvey (1975). Variabel ordinal ini merupakan angka kuantitatif yang memiliki gradasi didasarkan pada suatu besaran (variabel) yang bersifat kualitatif, continuous dan tak dapat diobservasi secara langsung atau bersifat *latent*. Dalam banyak kasus, variabel *latent* ini terkait dengan intensitas rasa atau sentimen. Bila intensitas rasa/sentimen ini sampai pada tingkat tertentu maka akan muncul suatu pilihan yang bisa diobservasi. Bila intensitas rasa/sentimen ini lebih tinggi lagi, pilihan yang dilakukan akan lebih tinggi pula bila hubungannya positif. Mengikuti Zaviona dan McKelvey (1975) dan Green (2008), model logit untuk keputusan membeli dapat dituliskan sebagai berikut:

$Y^*$  adalah variabel latent yang nilainya menentukan variabel ordinal  $Y$  yang bisa diobservasi. Misalnya  $Y = 0$  bila frekwensi pembelian  $< 1$  per minggu (jarang)

$Y = 1$  bila frekwensi pembelian 1 kali per minggu

$Y = 2$  bila frekwensi pembelian antara 2-3 kali per minggu

$Y = 3$  bila frekwensi pembelian  $> 3$  kali per minggu

$Y^*$  memiliki *thresholds* (batas) sebagai berikut:

$Y_i = 0$  bila  $Y_i^* \leq K_0$

$Y_i = 1$  bila  $K_0 \leq Y_i^* \leq K_1$

$Y_i = 2$  bila  $K_1 \leq Y_i^* \leq K_2$

$Y_i = 3$  bila  $Y_i^* \geq K_2$

$K_0$ ,  $K_1$  dan  $K_2$  adalah *thresholds*. Dalam pengerjaan empiri dengan software LIMDEP,  $K_0$  ditetapkan = 0, sehingga hanya ada 2 *thresholds* walaupun ada 4 kategori.

Diasumsikan rasa/sentimen seseorang terhadap suatu hal ( $Y^*$ ) dipengaruhi oleh se-

jumlah faktor yang direpresentasikan dalam vektor X sehingga dapat dituliskan:

$$Y^*_i = \sum_{k=1}^K \beta_k X_{ki} + \varepsilon_i = Z_i + \varepsilon_i$$

$$Z_i = \sum_{k=1}^K \beta_k X_{ki} = E(Y^*_i)$$

Bila diasumsikan error *termnya* terdistribusi logistic, maka dapat diperoleh:

$$P(Y = 0) = \frac{1}{1 + \exp(Z_i - K_0)}$$

$$P(Y = 1) = \frac{1}{1 + \exp(Z_i - K_1)} - \frac{1}{1 + \exp(Z_i - K_0)}$$

$$P(Y = 2) = \frac{1}{1 + \exp(Z_i - K_2)} - \frac{1}{1 + \exp(Z_i - K_1)}$$

$$P(Y = 3) = \frac{1}{1 + \exp(Z_i - K_2)}$$

Likelihood functionnya dapat ditulis sbb.:

$$L = \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (\Lambda(X\beta - K_j) - \Lambda(X\beta - K_{j-1}))^{S_{ij}}$$

dimana

X adalah vektor yang terdiri atas variabel sosio demografis dan variabel yang terkait dengan nilai-nilai konsumen

$i = 1, 2, 3, \dots, n$

$J = 0, 1, 2, 3$  (dalam kasus di atas)

Estimasi parameter model akan dilakukan dengan metoda Maximum Likelihood (ML) dalam penelitian ini,

Y = 0 bila frekuensi membeli produk organik Jarang (sesekali saja)

Y = 1 bila frekuensi membeli produk organik 1 kali per minggu

Y = 2 bila frekuensi membeli produk organik 2 - 3 kali per minggu

Y = 3 bila frekuensi membeli produk organik lebih dari 3 kali per minggu.

Yang masuk dalam vektor X adalah:

Pertama, usia (dalam tahun)

Kedua, kelompok pendapatan:

DPendpt1 = 1 bila pendapatan < Rp 5 juta  
= 0 untuk yang lain

DPendpt2 = 1 bila pendapatan antara 5 - 10 juta rupiah

= 0 untuk yang lain

DPendpt3 = 1 bila pendapatan antara 10 - 20 juta rupiah

= 0 untuk yang lain

DPendpt4 = 1 bila pendapatan > 20 juta rupiah

= 0 untuk yang lain

Ketiga, pendidikan

D<SMA = 1 bila pendidikan < lebih kecil atau sama dengan SMA,

= 0 untuk yang lain

DD1D3 = 1 bila pendidikan D1 atau D3,

= 0 untuk yang lain

DS1 = 1 bila S1,

= 0 untuk yang lain

DS1 = 1 bila S2,

= 0 untuk yang lain

DS2 = 1 bila S2,

= 0 untuk yang lain

DS3 = 1 bila S3,

= 0 untuk yang lain

Keempat, Dlingk = 1 bila memilih alasan membeli terkait lingkungan hidup = 0 untuk yang lain

Kelima, DOPI = 1 bila merasa harga terlalu mahal, = 0 untuk yang lain

Model Ordered logit telah banyak digunakan dalam penelitian di berbagai bidang. Beberapa diantaranya adalah: Monirul (2014) mengaplikasikannya pada kerentanan dalam frekwensi konsumsi makanan kelompok marginal akibat bencana alam; Lopez dan Garate (2007) menggunakannya untuk meneliti tentang keputusan berpartisipasi dalam sport; Park *et al.* (2012) menerapkannya pada penelitian tentang tingkat keparahan akibat tabrakan di jalan toll dan Min (2013) menggunakannya untuk meneliti tentang *self-rated health*.

Populasi konsumen produk organik sulit untuk diketahui jumlahnya karena berkembangnya perdagangan produk organik sendiri belum terlalu lama di Indonesia. Tidak hanya jumlah yang sulit diukur, tapi juga kelompok konsumennya tidak mudah ditemukan, oleh karena itu tehnik pengumpulan respondennya menggunakan *chain-referral sampling* atau lebih dikenal dengan *snowball sampling technique*. Pada

awalnya kami meminta referensi dari agen yang menjual langsung ke konsumen, kemudian kami menanyakan kepada konsumen-konsumen tersebut nama teman atau kerabat yang mereka ketahui menggunakan produk organik atau setidaknya pernah membeli produk organik. Akhirnya didapatkan 125 responden, tapi hanya 122 yang datanya bisa diolah.

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Salah satu definisi pertanian organik mengatakan: *“organic agriculture is an ecological production management system that promotes and enhances biodiversity, biological cycles, and soil biological activity. It is based on minimal use of off-farm inputs and on management practices that restore, maintain, or enhance ecological harmony. The primary goal of organic agriculture is to optimize the health and productivity of interdependent communities of soil life, plants, animals, and people.”* (NOSB, 2003)

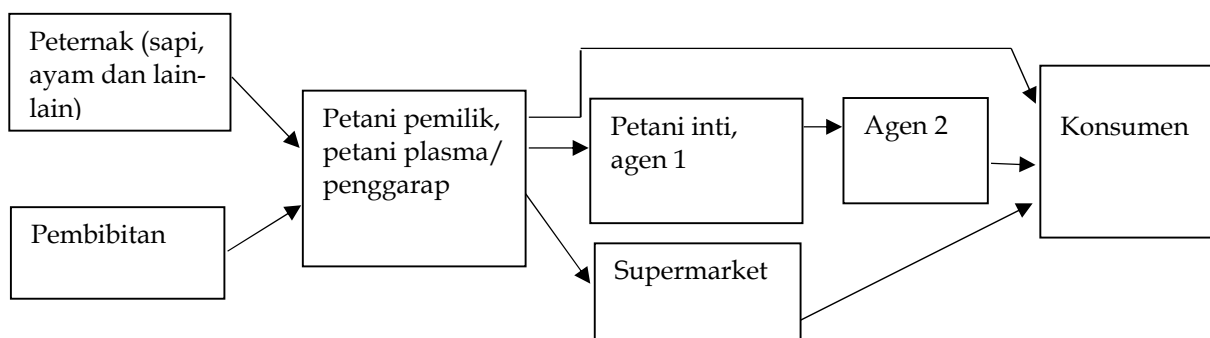
Dalam konsep di atas antara lain terkandung pengertian bahwa: sistem pertanian organik dibangun berdasarkan pada pemahaman/pengetahuan tentang sifat-sifat alam dimana tanah diperlakukan sebagai entitas yang hidup yang terdiri atas organisme dan mikroba yang menentukan kesuburannya yang harus selalu dipelihara dan dilindungi dalam proses penggarapannya untuk memperoleh hasil pertanian; tidak memerlukan input non organik (sintetis) dan tidak menggunakan air berlebihan;

mengandalkan *green and animal manures* dan mineral alam seperti material dari batubatuan untuk memelihara kesuburan tanah; memperhatikan dampak pengelolaan pertanian terhadap lingkungan hidup dan konservasi habitat. Dengan perkataan lain, pertanian organik mengandung idealisme mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, kesejahteraan manusia dan hewan, namun untuk membuat proses ini berkelanjutan (*sustainable*), proses ini juga secara ekonomis harus *viable*. Artinya pada setiap tahapan proses produksi sampai ke tangan konsumen harus terjadi tambahan nilai yang menghidupi mereka yang terlibat dalam tiap tahapan tersebut.

### Value Chain dalam Pertanian Organik

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan kami terhadap responden petani dan agen distributor yang terkait, *value chain* dalam pertanian dan perdagangan produk organik dapat digambarkan pada Gambar 3.

Idealnya, seperti tersirat dalam definisi pertanian organik di atas, petani setidaknya mempunyai beberapa ternak (sapi, kambing, bebek, ayam) yang kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Demikian juga, petani dapat menyisakan sebagian tanamannya untuk pembibitan sehingga seluruh input tidak perlu dibeli dari luar dan hasil dari ternak menjadi tambahan penghasilan atau setidaknya dapat menjadi tambahan konsumsi bagi petani.

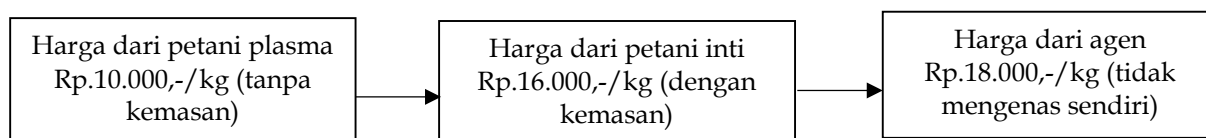


Gambar 3  
Value Chain Dalam Pertanian dan Perdagangan Produk Organik

Dari 8 responden petani/kelompok tani kami, hanya 2 yang melakukan hal tersebut. Hal ini antara lain karena kurangnya lahan atau karena petani tidak ingin direpotkan dengan pekerjaan lain selain bertani. Bila kegiatan beternak dan pembibitan dilakukan sendiri oleh petani pemilik/penggarap, maka tiga box dalam box besar di gambar 3 merupakan satu entitas.

Tidak diproduksinya sendiri pupuk kandang dan bibit menciptakan rantai nilai tambah dalam keseluruhan bisnis produk organik. Kotoran ternak bernilai Rp 200,- - Rp 1000,- per kg tergantung kesiapannya dipakai sebagai pupuk. Harga bibit sangat bervariasi, tergantung pada jenis dan asalnya. Bibit impor bisa berharga di atas Rp 20 000,- per paket kecil. Harga produk sayuran dari petani juga cukup bervariasi. Petani yang menekankan pada idealisme pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat memberi harga lebih rendah daripada petani yang murni mempunyai tujuan komersial. Variasi ini juga tergantung pada jenis sayuran dan standar kualitas yang diterapkan

apabila petani yang bersangkutan merupakan petani plasma. Variasi harga sayur di tingkat petani berdasarkan jenisnya berkisar antara Rp. 5000,- - Rp. 32 000,- per kg. Nilai ini dikurangi dengan biaya pupuk dan bibit bila harus dibeli dan biaya kemasan bila ada, menjadi milik para petani. Pembelian dari petani oleh agen atau petani inti bersifat putus dengan harga tetap; yang berarti petani tidak menanggung resiko fluktuasi harga, tetapi masih menanggung resiko gagal panen. Pembelian oleh supermarket dapat bersifat putus atau konsinyasi. Bila berdasarkan konsinyasi, barang dikembalikan pada penjual bila tidak laku. Dalam hal ini resiko ditanggung oleh penjual. Petani plasma tidak menjual langsung ke konsumen. Agen dan petani inti setelah memberi kemasan dapat menjual langsung ke konsumen, ke supermarket atau ke agen lainnya baru barang sampai ke tangan konsumen. Berikut ini adalah contoh petani responden yang menggunakan sistim plasma dan yang langsung menjual produknya ke supermarket tanpa perantara untuk produk sayuran:



**Gambar 4a**  
**Pertambahan nilai Petani Plasma-Petani Inti - Agen**



**Gambar 4b**  
**Pertambahan nilai Petani - Supermarket**

Dari bagan pertama, bila dalam 1 minggu petani bisa memproduksi 200 kg sayuran, maka per minggu mereka menerima Rp 2 juta yang memberi penghasilan kepada para petani penggarap dan supplier pupuk dan bibit bila petani mendapatkannya dari luar kebun. Petani inti yang menampung produk

sayuran langsung dari petani plasma menciptakan tambahan nilai sebesar 60% nya yang terdistribusi pada pegawai, pemilik usaha dan usaha kemasan. Hasil dari petani inti ada yang dijual langsung ke konsumen, ada yang ditampung lagi oleh agen yang menambahkan nilai sebesar 12.5% untuk



kemudian dijual langsung ke konsumen. Petani/perkebunan yang menjual langsung ke supermarket mendapat nilai tambah yang jauh lebih tinggi, tapi seleksi kualitas sayuran dilakukan lebih baik. Pihak supermarket menciptakan nilai tambah sebesar kurang lebih 25% per kg sayuran. Sebagian besar responden memilih melakukan cara yang kedua. Khusus untuk petani padi di kabupaten Tasikmalaya, produk dari petani ditampung oleh investor yang kemudian mengekspornya ke berbagai negara. Investor ini juga membantu proses sertifikasi organik para petani dan menanggung ongkos sertifikasi.

### Deskripsi responden konsumen produk organik

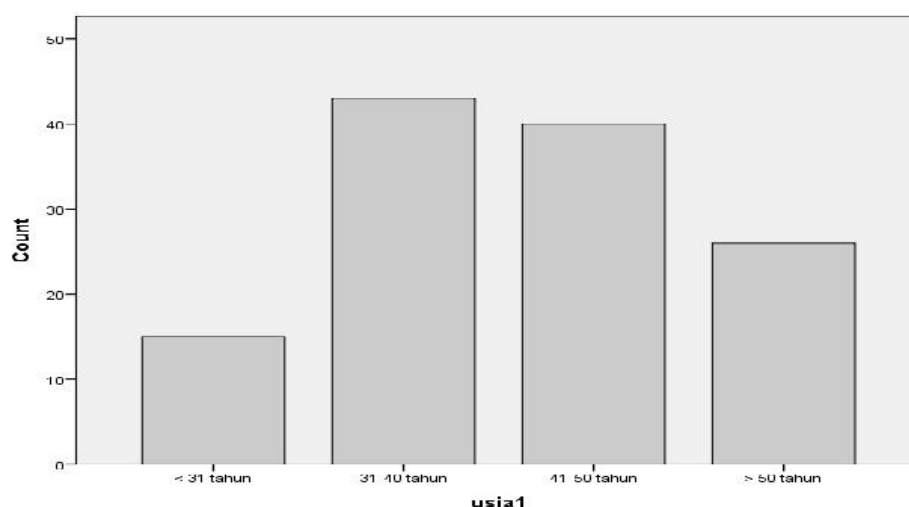
Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini antara lain menanyakan frekwensi membeli, frekwensi mengkonsumsi dan nilai pembelian per bulan. Diantara ketiganya, jawaban mengenai nilai pembelian tidak dapat diolah karena akurasi jawaban yang diragukan dan sebagian responden tidak mengisinya. Jawaban pertanyaan frekwensi membeli digunakan dalam model Logit. Di kota/kabupaten Bandung pada saat survei dilakukan sepengetahuan kami belum terdapat restoran yang khusus menghidangkan masakan dari produk organik, oleh karenanya diharapkan ada keselarasan

antara frekwensi membeli dan mengkonsumsi; artinya mereka yang membeli adalah juga yang mengkonsumsi. Produk yang disebutkan di beli/dikonsumsi oleh responden antara lain adalah sayuran, telur, beras dan susu/yogourt dan buah, tetapi mayoritas menyebut sayuran.

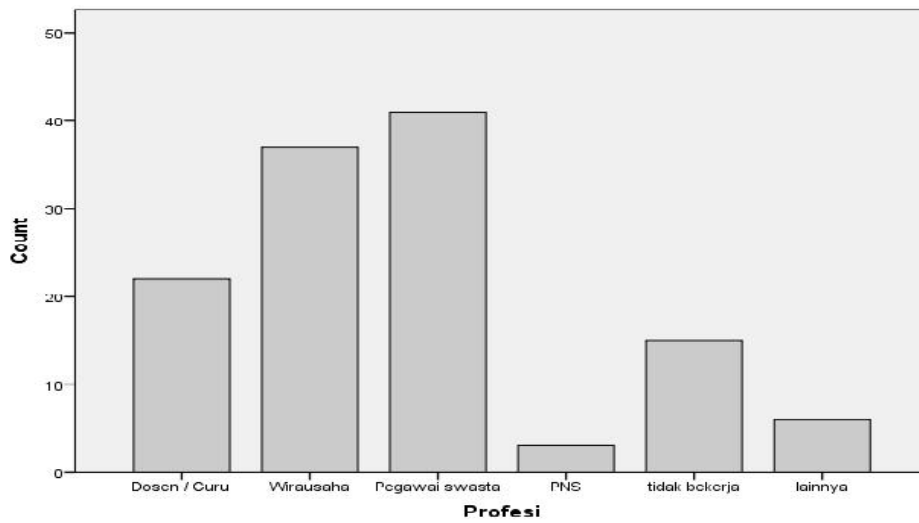
Gambar 5 menunjukkan distribusi responden berdasarkan usia. Terlihat bahwa mayoritas responden berusia antara 30-50 tahun, usia dimana pada umumnya orang sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri. Perkiraan awal kami mereka yang mengenal dan menggunakan produk organik adalah kelompok usia di atas 50 tahun dimana pada usia tersebut berbagai masalah kesehatan telah muncul.

Gambar 6 menunjukkan distribusi responden berdasarkan profesi. Dari responden yang terjaring jumlah terbesar yang membeli dan mengkonsumsi produk organik adalah pegawai swasta dan wirausahawan, baru kemudian diikuti oleh para pendidik (guru dan dosen). Responden yang terjaring dalam sampel penelitian adalah wanita. Mereka yang tidak bekerja diperkirakan adalah ibu rumah tangga.

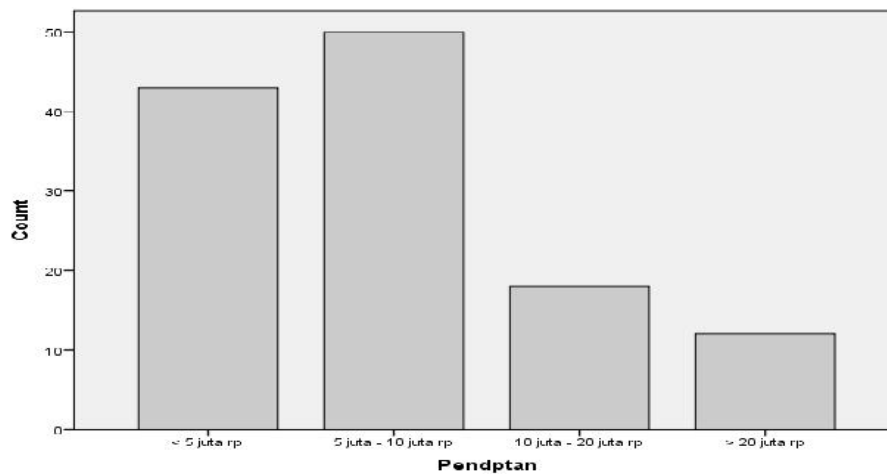
Gambar 7 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pendapatan 5-10 juta Rupiah. Mereka yang penghasilannya dibawah 5 juta jumlahnya cukup signifikan.



**Gambar 5**  
Distribusi responden berdasarkan usia



**Gambar 6**  
Responden berdasarkan profesi



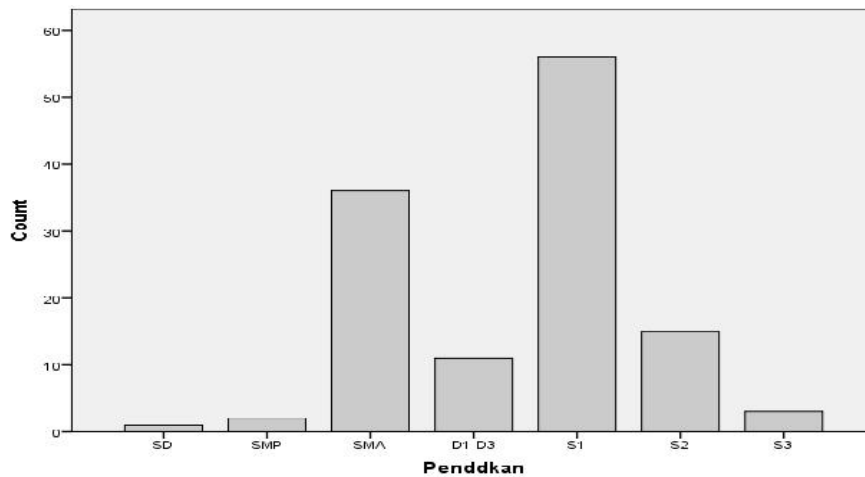
**Gambar 7**  
Responden berdasarkan pendapatan

Hal ini karena mereka yang berprofesi ibu rumah tangga (tidak bekerja) masuk dalam kelompok ini.

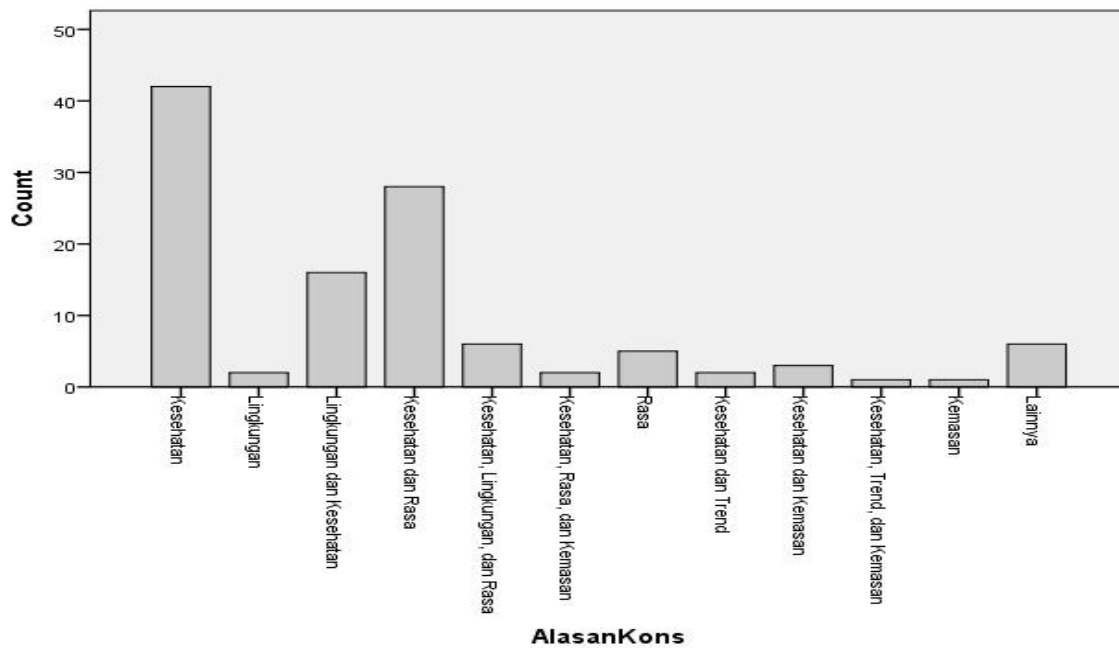
Dari gambar 8 terlihat bahwa sampel data didominasi oleh kelompok pendidikan S1, kemudian diikuti oleh pendidikan SMA. Lebih kecilnya jumlah responden yang berpendidikan S2 dan S3 dapat dimengerti karena jumlah penduduk yang berpendidikan tingkat tersebut memang lebih kecil. Dari Gambar 8 tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa konsumen produk organik adalah kelompok yang cukup terdidik.

Gambar 9 menunjukkan alasan responden mengkonsumsi produk organik. Dalam

hal ini responden boleh memilih lebih dari 1 alasan. Sebagian besar responden mengkaitkan pembelian produk organik dengan alasan kesehatan. Ada cukup banyak yang berpendapat bahwa produk organik mempunyai rasa yang lebih enak. Ada juga yang membeli karena produknya dikemas, yang pilihannya murni alasan lingkungan hidup kecil jumlahnya. Kebanyakan memberikan pilihan majemuk seperti alasan kesehatan dan lingkungan hidup, kesehatan, rasa dan kemasan seperti dapat dilihat dalam Gambar 9. Dilihat dari lokasi pembelian, gambar 10 menunjukkan bahwa mayoritas responden membeli produk organik dari super-



**Gambar 8**  
**Responden berdasarkan tingkat pendidikan**



**Gambar 9**  
**Responden Berdasarkan Alasan mengkonsumsi Produk Organik**

market. Cara kedua tertinggi adalah membeli dari agen. Membeli langsung dari petani sedikit dilakukan karena memang lokasi pertanian jauh dari kota dan seringkali tidak mudah diakses.

Hasil cross tabulation antara variabel usia dan frekwensi konsumsi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden (50,4%) mengkonsumsi produk organik 2-3 kali per minggu dan hanya 13% yang mengkonsumsi produk organik tiap

hari. Dari kelompok yang mengkonsumsi antar 2-3 kali seminggu, jumlahnya didominasi oleh kelompok usia 31-50 tahun. Demikian juga untuk yang mengkonsumsi tiap hari. Konsumen usia di atas 50 tahun berjumlah sekitar 20% dari total responden. Dari jumlah ini mayoritas mengkonsumsi 2-3 kali seminggu. Dari hasil ini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa frekwensi mengkonsumsi produk organik meningkat bersama dengan meningkatnya usia.

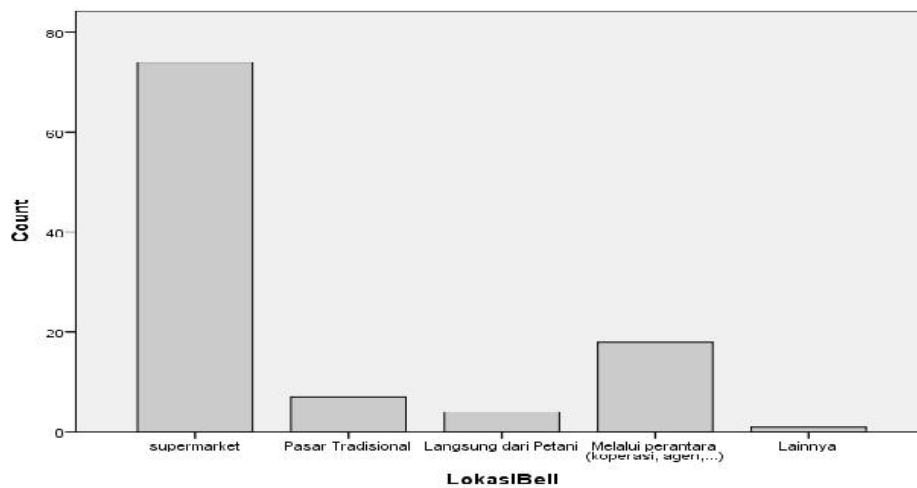
Tabel 2 secara deskriptif menunjukkan hubungan antara frekwensi mengkonsumsi produk organik dan pendapatan responden. Porsi terbesar di sini adalah kelompok berpendapatan 5–10 juta Rupiah. Dari kelompok pendapatan ini, frekuensi konsumsi yang mempunyai persentase tertinggi adalah 2-3 kali per minggu. Pada kelompok pendapatan yang lebih tinggi (10-20 juta) persentase konsumsi 1 kali per minggu adalah yang tertinggi.

Persentase mengkonsumsi produk organik tidak nampak meningkat atau menurun bersama dengan pendapatan.

**Hasil model ordered logit**

Hasil dari model ordered logit terdiri atas dua bagian yaitu hasil yang menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap Y\* (tingkat intensitas rasa/sentimen terhadap produk) sebagai variabel terikat dan marginal effects (besarnya pengaruh) variabel bebas terhadap probabilitas memilih masing-masing kategori. Angka koefisien Mu (1) dan Mu (2) menunjukkan nilai *threshold* K1 dan K2 pada model.

Dari Tabel 3, Nilai koefisien Usia secara statistik tidak signifikan, yang berarti makin tinggi usia tidak membuat probabilitas/ke-



**Gambar 10**  
Responden berdasarkan lokasi belanja produk organik

**Tabel 1**  
Frekwensi Mengkonsumsi Produk Organik Berdasarkan Usia

		Frekwensi konsumsi				Total
		Tiap hari	2-3 kali seminggu	1 kali seminggu	Jarang	
< 31 tahun	Jumlah	1	10	2	2	15
	%	6.7%	66.7%	13.3%	13.3	100%
31-40 tahun	Jumlah	6	24	11	2	43
	%	14%	55.8%	25.6%	4.6	100%
41-50 tahun	Jumlah	5	18	10	7	40
	%	12.5%	45%	25%	17.5	100%
>50 tahun	Jumlah	4	10	6	5	25
	%	16%	40%	24%	20	100%
Total	jumlah	16	62	29	16	123
	%	13%	50.4%	23.6%	13%	100%

Sumber: hasil pengolahan data

**Tabel 2**  
**Frekwensi mengkonsumsi produk organik berdasarkan pendapatan**

		Frekwensi					
		Tiap hari	2-3 kali seminggu	1 kali seminggu	Jarang	Total	
Pendapatan	< 5 juta Rp	Jumlah	4	20	13	6	43
		%	9.3%	46.5%	30.2%	14%	100%
	5-10 juta Rp	Jumlah	8	28	6	7	49
		%	16.3%	57.2%	12.2%	14.3%	100%
	10-20 juta Rp	Jumlah	1	8	9	0	18
		%	5.6%	44.4%	50%	0	100%
	>20 juta Rp	Jumlah	2	7	1	2	12
		%	16.7%	58.3%	8.3%	16.7%	100%
	Total	jumlah	15	63	29	15	122
		%	12.3%	51.6%	23.8%	12.3%	100%

Sumber: hasil pengolahan data

**Tabel 4**  
**Hasil estimasi model ordered Logit**

Variabel	Koefisien	p-value
Konstanta	1.5703*	0.0001
Usia	-0.0005	0.7775
Alasan_lingkHdp	-0.1199	0.7783
D_D1D3	1.5712**	0.0279
D_S1	0.3575	0.3943
D_S2	0.9225****	0.1157
D_S3	-1.3935	0.2391
D_Pendpt2	0.7798***	0.0657
D_Pendpt3	0.5057	0.3454
D_Pendpt4	0.9174****	0.1498
D_OpHrg	-0.2421	0.6009
Thresholds		
Mu(1)	1.4601*	0.0000
Mu(2)	4.1948*	0.0000

\*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\* menunjukkan signifikan pada alpha 1%, 5%, 10% dan 15%

Sumber: hasil pengolahan data

keinginan membeli produk organik lebih tinggi. Mereka yang alasan mengkonsumsi produk organik terkait dengan lingkungan hidup juga tidak selaras dengan probabilitas pembelian produk organik lebih sering seperti ditunjukkan oleh koefisien yang tidak signifikan. Pendidikan yang meningkat tidak membuat probabilitas membeli produk organik lebih tinggi. Bila dibandingkan dengan kelompok pendidikan SMA ke bawah, hanya mereka yang pendidikannya D1-D3

yang probabilitas frekuensi membeli produk organik secara signifikan lebih tinggi.

Kelompok pendidikan S2 juga mempunyai koefisien positif, yang berarti probabilitas membeli produk organik lebih tinggi dari yang berpendidikan SMA ke bawah, tetapi hubungannya tidak terlalu kuat (baru signifikan pada alpha 15%. Di sini, kelompok pendapatan 5–10 juta rupiah dan kelompok pendapatan di atas 20 juta rupiah signifikan kemungkinan membelinya di atas

pendapatan yang paling kecil, tetapi untuk kelompok pendapatan diatas 20 juta hubungan tersebut tidak terlalu kuat. Variabel Opini harga produk organik mahal bertanda negatif tapi tidak signifikan, yang berarti walaupun sebagian orang merasa harga produk organik mahal, tetapi mereka tetap membeli juga.

Tabel 4 menunjukkan marginal effect berbagai variabel terhadap kemungkinan responden jarang membeli produk organik. Koefisien variabel usia secara statistik tidak signifikan menentukan probabilitas responden jarang membeli produk organik. Untuk variabel pendidikan, koefisien yang signifikan adalah untuk variabel Dummy D1-D3, S2 dan S3. Koefisien variabel Dummy D1-D3 bertanda negatif yang berarti probabilitas untuk jarang membeli produk organik lebih rendah dari mereka yang pendidikannya SMA ke bawah. Koefisien variabel Dummy S2 dan variabel Dummy S3 bertanda positif yang menunjukkan bahwa probabilitas kelompok pendidikan tersebut untuk jarang membeli produk organik lebih tinggi daripada mereka yang berpendidikan SMA ke bawah. Secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa yang probabilitasnya besar untuk jarang mengkonsumsi produk organik adalah mereka yang pendidikannya tinggi.

Hal sebaliknya terjadi untuk variabel pendapatan, koefisien variabel Dummy pen-

dapatan 5–10 juta, 10–20 juta dan di atas 20 juta semuanya mempunyai p-value yang rendah walaupun untuk pendapatan 10–20 juta baru signifikan pada alpha 20% dan ketiganya bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang berpendapatan di atas 5 juta rupiah mempunyai probabilitas jarang membeli produk organik lebih rendah dari mereka yang pendapatannya di bawah 5 juta. Atau dengan kata lain kelompok pendapatan lebih tinggi lebih jarang membeli produk organik.

Koefisien variabel Dummy Opini bahwa produk organik mahal mempunyai tanda positif walaupun baru signifikan pada alpha 15%. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi antara pandangan dan tindakan. Mereka yang merasa produk organik itu mahal, kemungkinan jarang membeli produk organik lebih besar.

Tabel 5 menunjukkan marginal effect dari berbagai variabel terhadap probabilitas membeli produk organik 1 kali per minggu. Koefisien variabel Dummy terkait alasan lingkungan hidup tidak signifikan, yang berarti mereka yang mengkonsumsi produk organik karena alasan lingkungan hidup maupun alasan lain mempunyai probabilitas sama untuk membeli produk organik seminggu sekali. Koefisien variabel-variabel Dummy pendidikan secara statistik signifikan (kecuali variabel Dummy\_S1 yang

**Tabel 4**  
**Marginal effect untuk pilihan jarang membeli produk organik**

Variable	Coefficient	p-value
Usia	0.0004	0.7786
Alasan_lingkHdp	0.0118	0.5363
D_D1D3	-0.0942 **	0.0257
D_S1	-0.0340	0.2657
D_S2	0.1164*	0.0000
D_S3	0.2158*	0.0000
D_Pendpt2	-0.7107***	0.0752
D_Pendpt3	-0.0425	0.1675
D_Pendpt4	-0.0667***	0.0623
D_OpHrg	0.0249****	0.1375

\*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\* menunjukkan signifikan pada alpha 1%, 5%, 10% dan 15%

Sumber: hasil pengolahan data

baru signifikan pada alpha 20%). Koefisien Dummy D1-D3 dan S1 bertanda negatif dan koefisien Dummy S2 dan S3 bertanda positif. Ini berarti probabilitas mereka yang berpendidikan D1-D3 dan S1 untuk membeli produk organik sekali seminggu lebih rendah dari mereka yang berpendidikan SMA ke bawah. Probabilitas mereka yang berpendidikan S2 dan S3 untuk mengkonsumsi produk organik sekali seminggu lebih tinggi daripada mereka yang berpendidikan SMA ke bawah.

Koefisien variabel Dummy pendapatan juga semuanya signifikan dan bertanda negatif. Angka koefisien terbesar adalah pada koefisien kelompok pendapatan tertinggi (>

20 juta rupiah). Hal ini berarti kelompok pendapatan ini adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk membeli produk organik sekali seminggu. Koefisien variabel Dummy opini bahwa harga sayur organik terlalu mahal secara statistik tidak signifikan. Hal ini berarti mereka yang berpendapat bahwa produk organik lebih mahal daripada produk pertanian konvensional, probabilitas membeli produk organik seminggu sekali sama dengan yang tidak berpandangan demikian.

Tabel 6 menunjukkan marginal effect dari berbagai variabel terhadap probabilitas membeli produk organik 2-3 kali per minggu.

**Tabel 5**  
**Marginal Effect untuk pilihan membeli produk organik 1 kali per minggu**

Variable	Coefficient	p-value
Usia	0.0006	0.7774
Alasan_lingkHdp	0.0154	0.5712
D_D1D3	-0.1700*	0.0041
D_S1	-0.0458	0.1807
D_S2	0.1054*	0.0000
D_S3	0.1191*	0.0001
D_Pendpt2	-0.0983**	0.0148
D_Pendpt3	-0.0641***	0.0928
D_Pendpt4	-0.1109**	0.0180
D_OpHrg	0.0309	0.2269

\*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\* menunjukkan signifikan pada alpha 1%, 5%, 10% dan 15%

Sumber: hasil pengolahan data

**Tabel 6**  
**Marginal effect untuk pilihan membeli produk organik 2 – 3 kali per minggu**

Variable	Coefficient	p-value
Usia	-0.0006	0.7894
Alasan_lingkHdp	-0.0158	0.6633
D_D1D3	0.0197	0.8926
D_S1	0.0441	0.5289
D_S2	-0.1520*	0.0000
D_S3	-0.2518*	0.0000
D_Pendpt2	0.0867	0.3848
D_Pendpt3	0.0494	0.5167
D_Pendpt4	0.0582	0.5762
D_OpHrg	-0.0335	0.2639

\*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\* menunjukkan signifikan pada alpha 1%, 5%, 10% dan 15%

Sumber: hasil pengolahan data

Koefisien variabel usia tidak signifikan, yang berarti usia tidak menentukan probabilitas membeli produk organik 2-3 kali per minggu. Koefisien alasan lingkungan hidup juga tidak signifikan, yang berarti mereka yang alasan konsumsinya terkait dengan lingkungan hidup atau alasan lain mempunyai kemungkinan yang sama untuk membeli produk organik 2-3 kali per minggu.

Koefisien Dummy D1-D3 dan S1 bertanda positif dan tidak signifikan, sedangkan koefisien Dummy S2 dan S3 bertanda negatif dan signifikan. Ini berarti probabilitas mereka yang berpendidikan D1-D3 dan S1 untuk membeli produk organik 2-3 kali per minggu tidak berbeda dengan mereka yang berpendidikan SMA ke bawah. Probabilitas mereka yang berpendidikan S2 dan S3 untuk mengkonsumsi produk organik 2-3 kali seminggu lebih rendah daripada mereka yang berpendidikan SMA ke bawah.

Koefisien variabel Dummy pendapatan semuanya tidak signifikan. Hal ini berarti pendapatan tidak menentukan kemungkinan untuk mengkonsumsi produk organik 2-3 kali seminggu. Dengan kata lain semua kelompok pendapatan mempunyai probabilitas yang kurang lebih sama untuk membeli produk organik 2-3 kali per minggu.

Koefisien variabel Dummy opini harga produk organik mahal secara statistik tidak signifikan, yang berarti mereka yang berpendapat bahwa produk organik lebih ma-

hal daripada produk pertanian konvensional, probabilitas membeli produk organik 2-3 kali seminggu sama dengan yang tidak berpandangan demikian. Tabel 7 menunjukkan marginal effect dari berbagai variabel terhadap probabilitas membeli produk organik setiap hari. Koefisien variabel usia secara statistik signifikan dan bertanda negatif yang berarti meningkatnya usia membuat probabilitas untuk mengkonsumsi produk organik setiap hari makin menurun. Dengan kata lain kecenderungannya mereka yang mengkonsumsi produksi organik tiap hari adalah kelompok yang lebih muda.

Sama dengan frekwensi membeli produk organik yang lain, alasan mengkonsumsi karena pro lingkungan hidup tidak membuat probabilitas mereka membeli produk organik lebih tinggi dari yang mempunyai alasan lain. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien variabel Dummy alasan lingkungan hidup yang tidak signifikan.

Koefisien variabel-variabel Dummy pendidikan secara statistik signifikan kecuali untuk kelompok pendidikan S2 dan S3. Koefisien Dummy D1-D3 dan S1 bertanda positif dan koefisien Dummy S2 dan S3 bertanda negatif. Ini berarti probabilitas mereka yang berpendidikan D1-D3 dan S1 untuk membeli produk organik setiap hari lebih tinggi dari mereka yang berpendidikan SMA ke bawah. Probabilitas mereka yang berpendidikan S2 dan S3 untuk membeli

**Tabel 7**  
**Marginal effect untuk pilihan membeli produk organik lebih dari 3 kali seminggu**

Variable	Coefficient	p-value
Usia	-0.0004***	0.0659
Alasan_lingkHdp	-0.0114	0.7513
D_D1D3	0.2445*	0.0000
D_S1	0.0357***	0.0834
D_S2	-0.0697	0.2128
D_S3	-0.0830	0.1595
D_Pendpt2	0.0826*	0.0000
D_Pendpt3	0.0571*	0.0034
<b>D_Pendpt4</b>	0.1194*	0.0000
<b>D_OpHrg</b>	-0.0223	0.5724

\*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\* menunjukkan signifikan pada alpha 1%, 5%, 10% dan 15%  
Sumber: hasil pengolahan data



produk organik setiap hari cenderung lebih rendah atau sama dengan mereka yang berpendidikan SMA ke bawah.

Koefisien variabel Dummy pendapatan juga semuanya signifikan dan bertanda positif. Angka koefisien terbesar adalah pada koefisien kelompok pendapatan tertinggi (>20 juta rupiah). Hal ini berarti kelompok pendapatan ini adalah yang paling besar kemungkinannya untuk membeli produk organik setiap hari.

Koefisien variabel Dummy opini bahwa harga sayur organik terlalu mahal secara statistik tidak signifikan. Orang sering kali mengatakan bahwa harga suatu barang mahal, tetapi karena barang substitusinya agak jauh dalam kualitas, keamanan dan lain-lain, orang tetap juga membelinya. Hal yang sama rupanya juga berlaku untuk produk organik.

## SIMPULAN DAN SARAN

Jalur distribusi produk organik cukup bervariasi. Dari kebun (petani), produk dapat langsung dibeli oleh konsumen, atau langsung ke supermarket setelah melalui proses pengemasan, atau ke petani inti atau agen yang membeli putus dari petani untuk dikemas dan dijual ke supermarket atau ke agen lain, baru sampai ke konsumen akhir.

Nilai tambah yang diciptakan juga bervariasi tergantung pada panjangnya jalur distribusi dan standar kualitas dan jenis produk organik. Diantara berbagai saluran distribusi tersebut, penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di tingkat perkebunan (petani) terutama bila seluruh atau sebagian besar input diproduksi sendiri sebagaimana seharusnya sebuah proses pertanian organik, namun apakah tingkat kesejahteraan petani lebih besar daripada kelompok yang lebih hilir tergantung pada berapa banyak jumlah orang yang terlibat di perkebunan.

Walaupun responden yang mengkonsumsi produk (sayuran) organik mayoritas berada pada kisaran usia 30–50 tahun, namun frekwensi konsumsi dan membeli produk organik secara umum tidak terpengaruh oleh usia responden, tetapi khusus

untuk pilihan membeli tiap hari, nampaknya kecenderungannya makin muda usia makin tinggi probabilitas untuk membeli produk organik tiap hari. Pendidikan tidak secara signifikan berpengaruh positif terhadap probabilitas lebih sering membeli produk organik.

Responden pendukung lingkungan hidup tidak secara signifikan mempunyai probabilitas membeli produk organik dengan frekwensi lebih tinggi dari yang lain. Jung *et al.* (2016) dalam penelitiannya tentang konsumsi *Eco-Friendly Faux Leather* (EFFL) *product* menyimpulkan bahwa ketika konsumen membeli *ethical product* seperti EFFL mereka juga mempertimbangkan kenikmatan indra dan keuntungan yang sifatnya pragmatis. Griskevicius *et al.* (2010) berargumen bahwa membeli *pro-environmental green products* mempunyai konotasi melakukan tindakan altruistik, karenanya orang lebih bersedia membelinya di depan publik dalam upaya mendapat status baik walaupun harus membayar lebih tinggi. Bila dikaitkan dengan produk makanan organik, walaupun konsumen yang bersangkutan adalah orang yang pro lingkungan hidup, rasa, kesegaran dan kemudahan untuk didapat dan digunakan juga mempunyai peran yang penting; dan apabila penjualan dilakukan dalam *event* yang terkait dengan kesadaran akan lingkungan hidup yang terbuka untuk umum, konsumen akan bersedia untuk membeli banyak, walaupun mungkin tidak untuk sehari-harinya.

Untuk frekwensi konsumsi tinggi (tiap hari), hasil *marginal effect* menunjukkan bahwa probabilitas kelompok pendapatan tertinggi untuk sering membeli produk organik lebih tinggi dari kelompok pendapatan lainnya. Opini tentang murah atau mahal nya produk organik tidak menentukan sering tidaknya responden membeli produk organik.

Hasil penelitian ini tidak seluruhnya selaras dengan hasil penelitian di negara maju. Konsumsi dan belanja produk organik di negara-negara maju lebih banyak didorong oleh konsumen usia muda dan

terdidik. Dari hasil penelitian ini pendapatan tinggi nampaknya lebih menentukan frekwensi tinggi membeli produk organik.

Dari hasil wawancara kami dengan para pelaku pertanian organik di Jawa Barat, produsen yang permintaan produknya mengalami peningkatan pesat adalah produsen yang menjual tidak melalui supermarket dan dengan harga yang secara signifikan lebih murah tapi standar kualitas tidak sebaik yang dijual ke supermarket. Hal ini menunjukkan bahwa elastisitas permintaan cukup tinggi dan ada peluang untuk meningkatkan omset besar melalui penurunan harga. Hal ini dapat dilakukan apabila para petani menerapkan *best practice* bertani organik sehingga dapat memproduksi lebih efisien dengan harga produk yang lebih terjangkau oleh masyarakat luas.

Penerapan *best practice* dalam bertani organik dalam praktek tidak selalu mudah dilaksanakan. Tekanan pada unsur kealamiah dalam proses produksi membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga dibandingkan dengan pertanian konvensional. Mengingat kontribusi pertanian organik terhadap kesehatan dan lingkungan, pemerintah dapat memberi dukungan antara lain dalam konversi lahan dari sistem konvensional ke organik dan dalam penyediaan pupuk dan anti hama organik.

Hal yang kurang terpikirkan dalam penelitian ini adalah kemungkinan responden yang terjaring semuanya perempuan. Hal ini terjadi karena kriteria utama anggota sampel adalah mereka yang pernah membeli produk organik. Pria belanja dalam keluarga jarang. Kondisi ini membuat variabel pendapatan agak bias karena sebagian wanita yang tidak bekerja pendapatannya akan termasuk kurang dari 5 juta Rupiah, padahal mungkin suaminya berpendapatan tinggi. Ukuran pendapatan rumah tangga akan lebih tepat digunakan dalam penelitian seperti ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arsil, P., E. Li, J. Bruwer dan G. Lyons. 2014. Exploring Consumer Motivations to-

- ward Buying Local Fresh Food Products. *British Food Journal* 116(10): 1533-1549.
- Dimitri, C. dan C. Greene. 2002. Recent growth Patterns in the US Organic Food Market. *USDA Agriculture Information Bulletin no. 777*. [www.ers.usda.gov/publications/aib-agricultural-information-bulletin/aib777.aspx](http://www.ers.usda.gov/publications/aib-agricultural-information-bulletin/aib777.aspx). Diakses 20 Desember 2014.
- Dimitri, C. dan L. Oberholzer. 2009. Marketing US Organic Food: Recent Trends from Farm to Consumer. *USDA Economic Information Bulletin no. 58*. [www.ers.usda.gov/media/185268/eib58\\_reportsummary\\_1\\_.pdf](http://www.ers.usda.gov/media/185268/eib58_reportsummary_1_.pdf). Diakses 22 Februari 2015.
- Dimitri, C. dan R. L. Dettmann. 2012. Organic Food Consumers: What Do We Really Know about Them? *British Food Journal* 114(8): 1157-1183.
- Diclemente, D. F. dan D. A. Hantula. 2003. Applied Behavioral Economics and Consumer Choice. *Journal of Economic Psychology* 24: 589-602.
- Donovan, J., S. Franzel, M. Cunha, A. Gyau dan D. Mithover. 2015. Guides for Value Chain Development: a Comparative Review. *Agribusiness in Developing and Emerging Economies* 51: 2-23.
- FiBL and IFOAM. 2015. The world of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2015. <http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook2015/pdf.html> Diakses: 10 Maret 2016.
- Gloy, B. 2005. A Guide to Understanding the Value Chain. Department of Applied Economics and Management, Cornell University. [www.cias.wisc.edu/wp-content/.../06/GuideToUnderstandingTheValueChain-1](http://www.cias.wisc.edu/wp-content/.../06/GuideToUnderstandingTheValueChain-1). Diakses 20 Desember 2014.
- Green, W. H. 2008. *Econometric Analysis*. Pearson International Edition, Singapore.
- Griskevicius, V., J. M. Tybur dan B. Van den Bergh. 2010. Going Green to Be Seen: Status, Reputation and Conspicuous Conservation. *Journal of Personality and Social Psychology* 98(3): 392-404.

- Habib, S. A. 2011. A Guidance Framework for Developing Pro-Poor Value Chain. *International Journal of Economic Perspectives* 5(4): 363-376.
- Herr, M., L. dan T. J. Muzira. 2009. Value Chain Development for Decent Work. ILO Publication. [www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/---/wcms\\_115490](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---/wcms_115490). Diakses 22 Februari 2015.
- Iowa State University digital repository. 2003. Fundamentals of Organic Agriculture. [lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=extension\\_pubs](http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=extension_pubs). Diakses 10 Maret 2016.
- Jung, H. J., H. J. Kim dan K. W. Oh. 2016. Green Leather for Ethical Consumers in China and Korea: Facilitating Ethical Consumption with Value-Belief-Attitude Logic. *J. Bus Ethics* 135: 483-502.
- Kahl, J., A. Zalecka, A. Ploeger, S. Bugel dan M. Huber. 2012. Functional Food and Organic Food are Competing rather than Supporting Concepts in Europe. *Agriculture* 2: 316-324.
- Khan, M.R.T., S. Chamhuri dan H.S. Farah. 2015. Green Food Consumption in Malaysia: a Review of Consumers' Buying Motives. *International Food Research Journal* 22(1): 131-138.
- Leenes, G. P. W., S. Nonhebel, dan M. S. Krol. 2010. "Food Consumption Pattern and Economic Growth. Increasing Affluence and the Use of Natural Resources." *Appetite*, 1066, [www.elsevier.com/locate/appet](http://www.elsevier.com/locate/appet). Diakses 20 Maret 2016.
- Lopez, F. L. dan M. R. Garate. 2007. The Demand for Sport: Sport Consumption and Participation Models. *Journal of Sport Management* 21: 103-122.
- Min, H. 2013. Ordered Logit Regression Modelling of the Self-Rated Health in Hawai'i with Comparison to the OLS Models. *Journal of Modern Applied Statistical Methods* 12(2): 371-380.
- Monirul, H. M. 2014. Climate Change Induced Marginality: Households' Vulnerability in the Meal Consumption Frequencies. *American Journal of Environmental Protection* 3(3): 103-112.
- Moslehpour, M., P. Van Kien dan I. Danyfiska. 2014. Differences of Customer Purchase Behavior towards Organic Rice in Indonesia and Taiwan. *International Journal of Quality and Service Sciences* 6(4):348-368.
- Oquist, K. A., J. S. Strock dan D. J. Mulla. 2007. Influence of Alternative and Conventional Farming Practices on Surface Drainage and Water Quality. *Journal of Environmental Quality* 36(4): 1194-1204.
- Park, S., K. Jang, S. H. Park, D. K. Kim dan K.S. Chon. 2012. Analysis of Injury Severity in Traffic Crashes: a Casestudy of Korean Expressways. *KSCE Journal of Civil Engineering* 12(7): 1280-1288.
- Porter, M. E. 1985. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Simon and Schuster, New York.
- Rauh, A. 2010. Empirical Analysis of Linder hypothesis: the Case of Germany's Trade within Europe. *American Economist* 55(2): 136-141.
- Regmi, A. 2001. Changing Structure of Global Food Consumption and Trade. *Economic Division, Economic Research Service, USDA report, WRS-01-1*
- Regmi, A., N. Ballenger dan J. Putnam. 2004. Globalization and Income Growth Promote Mediterranean Diet. *Public Health Nutrition* 7(7): 977-983.
- Ricketts, K. D., G. Calum, dan C. D. Gomes. 2013. Value Chain Approach to Development. *Journal of Agribusiness and Emerging Economies* 4(1): 2-22.
- Scialabba, N. E. 2013. Organic Agriculture's Contribution to Sustainability. *Plant Management Network*. [www.fao.org/3/a-aq537e](http://www.fao.org/3/a-aq537e). Diakses 22 Februari 2015.
- Stern, P. C, T. Dietz, T. Abel, G. A. Guagnano dan L. Kalof. 1999. A Value-Belief-Norm Theory of Support for Social Movements: the Case of Environmentalism. *Human Ecology Review* 6(2): 81-97.

- Stockdale, E. A. dan C. A. Watson. 2009. Biological Indicators of Soil Quality in Organic Farming Systems. *Renewable Agriculture and Food Systems* 24(4): 308-318.
- Weber, M. dan P. Labaste. 2007. Using Value Chain Approaches in Agribusiness and Agriculture in Sub-Saharan Africa. The World Bank publication. [www.technoserve.org/files/downloads/vcguidenov12-2007](http://www.technoserve.org/files/downloads/vcguidenov12-2007). Diakses 22 Februari 2015.
- Weber, M. dan P. Labaste. 2010. Building Competitiveness in Africa's Agriculture: a Guide to Value Chain Concepts and Application. International Bank for Reconstruction Publication. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2401>. Diakses 22 Februari 2015
- Wiswall, R. 2009. *The Organic Farmer's Business Handbook*. Chelsea Green Publishing, White River Junction, USA.
- Zaviona, R. Dan W. McKelvey. 1975. A statistical Model for the Analysis of Ordinal Level Dependent Variables. *Journal of Mathematical Sociology* 4(1): 103-12

## ANALISIS KOMPARATIF EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN FORCED DAN VOLUNTARY DELISTING PADA BURSA EFEK INDONESIA

Winne Carissa Hidayat

*winne.carissa@gmail.com*

Sahala Manalu

Rony Joyo Negoro Octavianus

Universitas Ma Chung

### ABSTRACT

From 2005 until early 2015, as many as 52 companies perform delisting. Meanwhile, the practice of earnings management will be found on all companies including the delisted companies. Previously earnings management are found on discretionary accruals, but because it is often used and can be detected easily managers began to switch to manipulate earnings through operating activities or real activities manipulation. The purpose of this study is to analyze the practices of earnings management through real activities manipulation in companies that perform forced and voluntary delisting. Obtained each of 14 companies forced and voluntary delisting during observation from 2005 to 2014 who meet the criteria of purposive sampling. The results using independent t-test found there were no difference in the average earnings management in forced and voluntary delisting companies, which in both earnings management done to lower profits. It is analyzed as the company's goals for the restructuring of debt, save on tax payments as well as the distribution of dividends and employee bonuses. Thus, earnings management to do more to efficient contracting perspective.

*Key words: earnings management, real activities manipulation, forced delisting, voluntary delisting, efficient contracting perspective*

### ABSTRAK

Dari tahun 2005 sampai awal 2015, sebanyak 52 perusahaan melakukan *delisting*. Sementara itu, praktik *earnings management* ditemukan pada semua perusahaan, termasuk pada perusahaan *delisting*. Sebelumnya manajemen laba banyak ditemukan pada *discretionary accrual*, tetapi disebabkan hal ini sering digunakan dan dapat terdeteksi dengan mudah, para manajer mulai beralih memanipulasi laba melalui aktivitas operasi atau *real activities manipulation*. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis praktik *earnings management* melalui *real activities manipulation* dalam perusahaan-perusahaan yang melakukan *forced* dan *voluntary delisting*. Didapatkan masing-masing 14 perusahaan *forced* dan *voluntary delisting* selama periode amatan 2005-2014 yang memenuhi kriteria *purposive sampling*. Hasil penelitian dengan menggunakan *independent t-test* menemukan tidak terdapat perbedaan rata-rata *earnings management* pada perusahaan *forced* dan *voluntary delisting*, dimana persamaan manipulasi laba yang terjadi ialah untuk menurunkan atau mengecilkan laba. Hal ini dianalisis sebagai tujuan perusahaan untuk restrukturisasi utang, menghemat pembayaran pajak serta pembagian dividen dan bonus karyawan, sehingga, manajemen laba dilakukan lebih kepada *efficient contracting perspective*.

*Kata kunci: manajemen laba, manipulasi aktivitas riil, forced delisting, voluntary delisting, efficient contracting perspective*

### PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan peringkat keempat penduduk terbanyak di dunia menjadikan Indonesia sebagai negara yang

diminati oleh investor asing. Cosseboom (2014) mengungkapkan bahwa yang menarik minat investor asing ini ialah kestabilan ekonomi Indonesia saat meng-

hadapi krisis keuangan global di tahun 2008. Ada berbagai cara investor untuk berinvestasi. Salah satunya ialah dengan membeli saham-saham perusahaan Indonesia yang dinilai mampu untuk memberikan keuntungan. Hal ini tentu disambut dengan baik oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, terutama bagi perusahaan yang sedang mencari dana untuk aktivitas pendanaan operasionalnya.

Saham (*stock*) merupakan tanda bukti kepemilikan investor atas suatu perusahaan, yang mekanismenya ialah pemegang saham (investor) membeli atau menjual saham perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa dividen atau *capital gain*, akan tetapi sebelum perusahaan dapat memperjual-belikan sahamnya, perusahaan harus melakukan IPO (*Initial Public Offering*) terlebih dahulu. IPO merupakan penawaran saham secara perdana ke publik melalui pasar perdana dalam proses *go public* (Kristiantari, 2013). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), mulai dari tahun 2005 sampai awal tahun 2013, jumlah perusahaan perusahaan yang *listing* dan mendaftar untuk melakukan IPO cenderung bertambah. Sementara itu, tahun 2014 sampai dengan Juni 2015 mulai menurun. Berikut Gambar 1 merupakan jumlah perusahaan yang melakukan IPO dari tahun 2006 sampai Juni 2015.

Hal pertama yang menarik perhatian investor ketika IPO perusahaan ialah laporan

keuangan, yang memuat seluruh informasi kondisi keuangan suatu perusahaan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi atau tidak. Hal ini tentu saja membuat pihak manajemen tertekan dalam menyajikan laporan keuangan semenarik mungkin, sehingga manajer kemungkinan melakukan tindakan atau keputusan yang meningkatkan kesejahteraannya dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham (Rahayu, 2005). Rahmawati *et al.* (2010) mengungkapkan bahwa pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu ini dikenal dengan sebutan manajemen laba atau *earnings management*. Berdasarkan Iraya *et al.* (2015), *earnings management* merupakan sebuah strategi yang digunakan oleh manajemen untuk memanipulasi laba perusahaan, sehingga mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Teoh *et al.* (1998) dalam Li dan Zhou (2006), investor tidak dapat melihat nilai perusahaan sebenarnya ketika IPO, oleh karena itu, laporan keuangan bisa menjadi sumber yang salah bagi calon investor dalam mengambil keputusan. Mengamalkan *earnings management* akan menciptakan kesan baik bagi para manajer, tetapi disisi lain juga akan sangat merugikan pemegang saham.

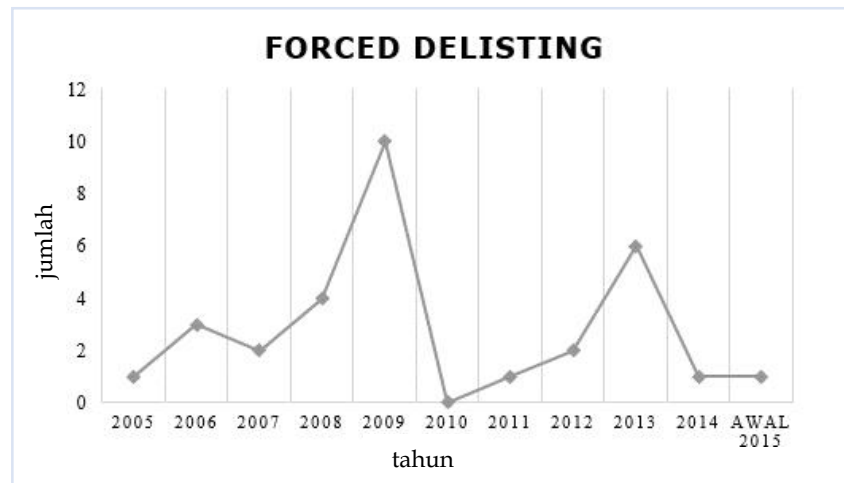
Bila semakin banyak perusahaan yang mengajukan *listing*, maka di sisi berseberangan banyak pula perusahaan yang



Gambar 1

Grafik Jumlah IPO Perusahaan pada BEI 2005-Juni 2015

Sumber: data diolah dari IDX Fact Book (2015)



Gambar 2

Grafik Jumlah *Forced Delisting* pada BEI 2005-awal 2015

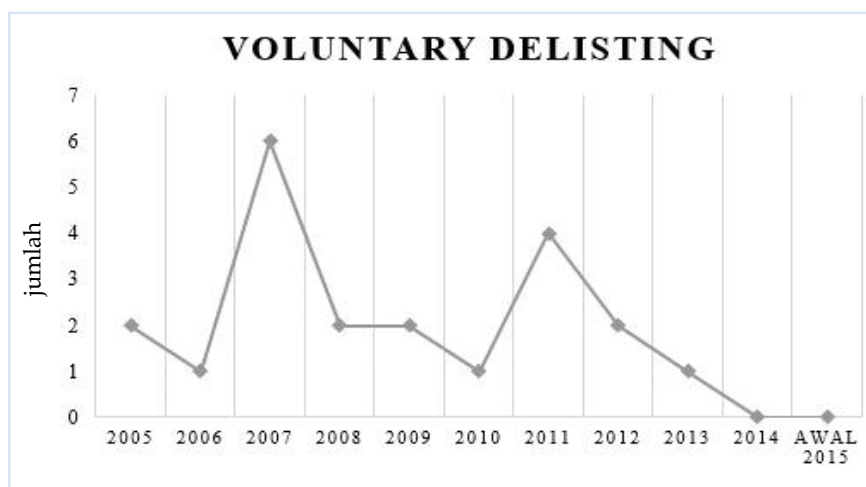
Sumber: data diolah dari IDX Fact Book (2015)

melakukan delisting. Berdasarkan keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I ketentuan I.14 tahun 2004 tentang penghapusan pencatatan (delisting) dan pencatatan kembali (relisting) saham di bursa, penghapusan pencatatan (delisting) merupakan penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa (Nafisatin *et al.*, 2014). Terdapat 2 jenis delisting menurut Raharjo (2006) dalam Sunaryo (2015), yaitu forced dan voluntary delisting. Forced delisting merupakan delisting yang ditetapkan dan diputuskan oleh bursa efek. Sementara itu, voluntary delisting merupakan permintaan delisting yang diajukan perusahaan sendiri kepada pihak otoritas pasar modal agar sahamnya tidak diperdagangkan lagi di bursa efek. Li dan Zhou (2006) mengungkapkan bahwa perusahaan yang melakukan delisting disebabkan karena kegagalan kinerja perusahaan yang berhubungan dengan kualitas ketika perusahaan melakukan IPO. Tahun 2005 sampai awal 2015 sebanyak 52 perusahaan melakukan delisting, dengan 21 perusahaan melakukan voluntary delisting dan tercatat 31 perusahaan yang dikeluarkan secara paksa oleh BEI (forced delisting). Berikut merupakan Gambar 2 jumlah perusahaan

yang melakukan forced delisting dan voluntary delisting. Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa jumlah paling tinggi perusahaan yang dikeluarkan secara paksa dari BEI tahun 2005 sampai awal 2015 terjadi pada tahun 2009, yaitu sebanyak 10 perusahaan. Sementara pada tahun 2010, tidak terdapat perusahaan yang melakukan *forced delisting*. Penghapusan secara paksa ini dapat disebabkan karena alasan tertentu seperti, kinerja dan kondisi keuangan perusahaan yang memburuk, atau perusahaan mengalami kebangkrutan (Raharjo, 2006 dalam Sunaryo, 2015).

Selanjutnya, Gambar 3 menunjukkan jumlah paling tinggi perusahaan yang keluar secara sukarela ialah terjadi pada tahun 2007, yaitu sebanyak 6 perusahaan. Berdasarkan Tambunan *et al.* (2015), perusahaan melakukan *voluntary delisting* disebabkan karena bergabung dengan perusahaan lainnya (*merger*) atau kembali menjadi perusahaan tertutup (*go private*).

Malik *et al.* (2014) menyatakan bahwa walaupun *delisting* tidak sama sepenuhnya dengan kebangkrutan, tetapi perusahaan dan *shareholder* juga mengalami dampak yang signifikan negatif, yaitu dapat membebankan biaya yang besar pada *shareholders*. Selain itu, Macey *et al.* (2004) dalam Li dan Zhou (2006) menemukan bahwa



Gambar 3

### Grafik Jumlah *Voluntary Delisting* pada BEI 2005-awal 2015

Sumber: data diolah dari IDX Fact Book (2015)

*forced delisting* akan membutuhkan biaya yang sangat besar dengan sampel perusahaan yang *delisted* dari NYSE (*New York Stock Exchange*) tahun 2002. Lebih spesifik, penelitian tersebut menemukan harga saham yang jatuh mendekati setengah harganya, tiga kali dari persentase *spread*, dua kali volatilitas harga saham ketika saham keluar dari bursa, oleh karena itu, hal ini dapat menjadi sebuah kejadian traumatik bagi para investor pasar modal (Benny dan Hutagaol, 2013).

Fenomena banyaknya perusahaan yang melakukan IPO dan banyak pula yang *delisting*, diduga disebabkan oleh adanya praktik *earnings management*. Dugaan ini dilandasi oleh penelitian Li dan Zhou (2006); Yudhanti dan Rachmawati (2008), keduanya meneliti *earnings management* pada saat IPO berpengaruh atau tidak terhadap risiko *delisting*. Hasil temuan keduanya saling bertentangan, yang mana Yudhanti dan Rachmawati (2008) menemukan bahwa DCA (*Discretionary Current Accrual*) dan SHARE, bukan merupakan variabel independen yang bisa menyebabkan risiko *delisting*, namun, penelitian ini sedikit berbeda dengan kedua penelitian tersebut, yang mana tidak meneliti lagi *earnings management* pada saat IPO, namun hanya akan meneliti mengenai *earnings*

*management* dalam perusahaan *forced delisting* maupun *voluntary delisting*. Hal ini disebabkan baik *earnings management*, *forced delisting*, dan *voluntary delisting*, ketiganya dapat merugikan pemegang saham. Pemikiran ini dilatarbelakangi oleh penelitian yang dilakukan oleh Zeidi *et al.* (2014) yang mengemukakan bahwa *earnings management* dan *accounting conservatism* sama-sama dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dan berdampak pada efisiensi pasar modal serta perilaku para investor, kreditor, dan pengguna laporan keuangan secara umum, namun, hasil penelitian menemukan hasil negatif dan signifikan antara *earnings management* dan *accounting conservatism*. Penelitian-penelitian terdahulu belum ditemukan yang meneliti mengenai seberapa besar *earnings management* dalam perusahaan-perusahaan yang *delisting*, baik itu berupa *forced delisting* maupun *voluntary delisting*.

Penelitian mengenai *earnings management* pada perusahaan *forced delisting* dan *voluntary delisting* ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: Apakah terdapat perbedaan rata-rata *earnings management* dengan menggunakan proksi *real activities manipulation* pada perusahaan *forced delisting* dan *voluntary delisting*?, sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *earnings*



*management* dengan menggunakan proksi *real activities manipulation* pada perusahaan *delisting* (*forced* dan *voluntary*), dengan asumsi bahwa semua perusahaan melakukan *earnings management*, yang didasari penelitian oleh Llukani (2013) bahwa *earnings management* dilakukan oleh perusahaan berskala besar maupun kecil.

## TINJAUAN TEORETIS

Terdapat 4 bentuk *earnings management* menurut Scott (2003) dalam Rahmawati *et al.* (2010), yaitu *taking a bath*, *income minimization*, *income maximization*, dan *income smoothing*. *Taking a bath* mengakui adanya beban pada periode mendatang dan kerugian pada periode berjalan, sehingga manajemen harus menghapus beberapa aktiva dan membebaskan perkiraan laba mendatang serta melakukan *clear the desk* yang menyebabkan laba yang dilaporkan pada periode mendatang akan meningkat. *Income minimization* dilakukan pada periode laba yang tinggi dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai beban. Hal ini dilakukan sebagai tujuan manajemen untuk mengecilkan laba perusahaan. Sementara itu, bentuk *income maximization* dilakukan dengan melaporkan pendapatan bersih yang tinggi sehingga bonus yang diterima lebih besar. Bentuk keempat dari manajemen laba ini ialah *income smoothing* atau perataan laba, merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai *trend* atau level tertentu.

*Earnings management* dilakukan dengan motivasi yang berbeda, berdasarkan hasil penelitian Chen dan Tsai (2010) dari 650 sampel perusahaan, terdapat 3 motivasi yang melatarbelakangi praktik *earnings management*, yaitu motivasi altruistik, tekanan dari pihak-pihak terkait, dan motivasi spekulatif. Motivasi altruistik merupakan praktik *earnings management* yang dilakukan untuk menghindari ketidakpercayaan dari bank dalam status finansial, mencegah jatuhnya harga saham, mengurangi beban

pajak, atau bertujuan untuk terdaftar di bursa. Sementara yang dimaksud dengan tekanan dari pihak-pihak terkait, yaitu seperti supervisor, akuntan, *shareholders*, kreditur, atau analis, dimana motivasi ini sama dengan yang diungkapkan oleh Stice *et al.* (2009), yaitu manajemen laba dilakukan untuk memenuhi target internal dan harapan eksternal. Motivasi ketiga ialah motivasi spekulatif, yang mana manajer bisanya memanipulasi pada bagian produksi atau distribusi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan pribadi.

Kemudian, terdapat 2 perspektif mengenai praktik *earnings management* atau manajemen laba menurut Scott (2009) dalam Kesatria (2013). Pertama dilihat dari sisi *efficient contracting perspective*, yaitu bentuk tindakan positif dengan memilih metode akuntansi untuk tujuan kepentingan perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Kedua, dilihat dari segi *oportunistic behavior* (tindakan oportunistik manajer), adalah seperti yang dikemukakan oleh Sanusi *et al.* (2014) bahwa manajemen laba merupakan manipulasi informasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan untuk kepentingan sendiri di atas kepentingan pihak lainnya. Kesatria (2013) menemukan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia cenderung melakukan *earnings management* dari sisi *oportunistic*.

Perusahaan-perusahaan yang gagal melakukan *earnings management*, secara keseluruhan memiliki 7 elemen ketidak berhasilan yang sama secara berurutan, seperti yang diungkap oleh Stice, Stice, & Skousen (2009), yaitu: (1) Kemunduran dalam bisnis. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik, tidak memiliki kebutuhan tinggi terhadap *earnings management*, oleh karena itu, *earnings management* yang berlebihan hampir selalu diawali oleh kemunduran bisnis perusahaan; (2) Tekanan untuk memenuhi harapan. Adanya keinginan untuk memenuhi harapan pihak internal maupun eksternal perusahaan, memotivasi para manajer untuk melakukan *earnings mana-*

gement; (3) Percobaan solusi akuntansi. Kinerja perusahaan yang buruk menyebabkan pasar kecewa sehingga nilai saham perusahaan mulai menurun. Untuk mengatasi hal ini, para akuntan dan bukannya orang-orang operasional atau pemasaran diminta untuk mengembalikan posisi perusahaan ke tingkat profitabilitasnya melalui manajemen laba, yang sebenarnya hal ini hanya bersifat sementara; (4) Risiko terhitung dari auditor (*auditor's calculated risk*). Kantor akuntan publik berharap mempertahankan reputasinya dan menghindari tuntutan para investor untuk tidak menyetujui perlakuan akuntansi yang terlihat terlalu optimis dari laporan keuangan. Seorang auditor sering kali diminta untuk menentukan apakah perlakuan akuntansi yang terlalu optimis oleh manajemen dapat diterima atau tidak. Dalam membuat keputusan ini, auditor harus menyeimbangkan pendapatan jangka panjang di tahun-tahun yang akan datang yang diperoleh dengan cara terus melanjutkan sebagai auditor perusahaan dengan biaya potensial bila terlibat dalam suatu skandal akuntansi, kehilangan reputasi, dan mungkin kalah dalam tuntutan hukum; (5) Skeptimisme yang tidak mencukupi dari para pengguna laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan biasanya menerima laporan keuangan perusahaan apa adanya dengan suatu kesadaran bahwa ada risiko pelaporan yang menipu tetapi tanpa memperhitungkan kerugian besar yang disebabkan oleh penipuan itu. Selain itu, analis dan komunitas investasi sering kali mendapatkan keuntungan secara ekonomi pada saat perusahaan mendapatkan pinjaman, mengeluarkan saham, menyusun berbagai cara pendanaan yang rumit, dan terlibat dalam suatu *merger* atau aktivitas akuisisi; (6) Investigasi hukum. Investigasi dilakukan ketika perusahaan dicurigai melanggar batas-batas oval GAAP ke area pelaporan keuangan yang menipu. Selain investigasi hukum, penyimpangan laporan keuangan juga bisa dianggap sebagai suatu tindak pidana. Misalnya dalam

kasus Enron, Arthur Andersen dianggap melanggar hukum karena memusnahkan kertas-kertas kerja audit; (7) Hilangnya reputasi secara besar-besaran. Kehilangan kredibilitas atau reputasi merupakan tahap akhir yang diakibatkan oleh perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi atas laba yang dilaporkan. Hilangnya kredibilitas ini merugikan banyak pihak yang berhubungan dengan perusahaan dan secara drastis melemahkan nilai ekonominya.

Ketujuh elemen kegagalan ini secara berturut-turut akan dialami oleh setiap perusahaan yang melakukan *earnings management*, akan tetapi, berdasarkan data diolah mengenai perusahaan-perusahaan yang melakukan *forced delisting* dan *voluntary delisting* di BEI, *earnings management* yang dilakukan belum mencapai tahap keenam dan ketujuh, namun diyakini hanya sampai pada tahap kelima.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I ketentuan I.14 tahun 2004 tentang penghapusan pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*) saham di bursa, penghapusan pencatatan (*delisting*) merupakan penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa (Nafisatin *et al.*, 2014). Terdapat 2 jenis *delisting* menurut Raharjo (2006) dalam Sunaryo (2015), yaitu *forced* dan *voluntary delisting*. *Forced delisting* merupakan *delisting* yang ditetapkan dan diputuskan oleh bursa efek. Sementara itu, *voluntary delisting* merupakan permintaan *delisting* yang diajukan perusahaan sendiri kepada pihak otoritas pasar modal agar sahamnya tidak diperdagangkan lagi di bursa efek.

Walaupun *delisting* tidak sama sepenuhnya dengan kebangkrutan, tetapi perusahaan dan *shareholder* juga mengalami dampak yang signifikan negatif, yaitu dapat membebankan biaya yang besar pada *shareholders* (Malik *et al.*, 2014). Sementara itu, Fatmawati

(2012:56) dalam Tambunan *et al.* (2015) menyatakan bahwa indikator perusahaan bangkrut di pasar modal adalah perusahaan *delisting*. Maksud *delisting* dari pernyataan ini lebih mengarah kepada *forced delisting*. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang melakukan *voluntary delisting* biasanya disebabkan karena *merger* atau diakuisi oleh perusahaan lain, dan ingin kembali menjadi perusahaan tertutup, akan tetapi, tidak menutup kemungkinan apabila perusahaan yang memutuskan melakukan *voluntary delisting* berakhir dengan kebangkrutan.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan *earnings management* telah banyak dilakukan. Misalnya, penelitian oleh Nan (2008) yang mempelajari interaksi antara *earnings management* dan *hedging*, yang mana interaksi keduanya belum pernah dipelajari secara teoritis oleh peneliti lain. Menurut Nan (2008), *earnings management* biasanya dilakukan oleh para manajer, dan untuk mengurangi serta mencegah bahaya dari manajemen laba pemilik perusahaan akan melakukan *hedging*. Seberapa efisien *hedging* yang dilakukan oleh pemilik, akan dibagi menjadi empat skenario, yaitu skenario A sampai skenario D. Skenario A diasumsikan apabila *earnings management* sulit dilakukan dan tidak terdapat *hedging*. Sementara itu, skenario B terjadi jika *earnings management* sulit dilakukan dan pemilik melakukan *hedging*, sehingga, jika pemilik perusahaan menginginkan untuk tidak terjadi *earnings management* pada skenario A dan skenario B, pemilik akan memberikan bonus kepada manajer. Selanjutnya, skenario C terjadi jika *earnings management* ditoleransi keberadaannya, tetapi pemilik tidak melakukan *hedging*. Apabila manajer dapat melakukan *earnings management*, sementara di sisi lain pemilik juga melakukan *hedging*, dapat dikategorikan sebagai skenario D. Untuk mengetahui skenario mana yang efisien ketika terdapat *hedging* atau tidak terdapat *hedging* terhadap manajemen laba, Nan

(2008) menggunakan model LEN dan *a mean-preserving spread hedging structure*.

Berdasarkan Iraya *et al.* (2015), telah banyak penelitian yang membahas mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) di Kenya, namun masih belum ada penelitian yang berfokus pada hubungan atau efek yang ditimbulkan GCG terhadap *earnings management*. Penelitian di Kenya terkonsentrasi pada profitabilitas yang digunakan sebagai ukuran dari kinerja keuangan dan efek dari GCG pada kinerja dari beberapa sektor ekonomi, oleh karena itu, Iraya *et al.* (2015) meneliti mengenai efek yang ditimbulkan GCG dengan menggunakan lima dari tujuh pendekatan GCG (kepemilikan terpusat, ukuran direksi, independensi direksi, aktivitas direksi, dan dualisme CEO), terhadap *earnings management*. Metode yang digunakan untuk menghitung *earnings management* ialah model *discretionary accrual*. Selanjutnya, untuk menguji hubungan antara *discretionary accrual*, sebagai alat *earnings management*, dan GCG digunakan analisis regresi linear.

Berbeda dengan Iraya *et al.* (2015), Malik *et al.* (2014) meneliti mengenai GCG terhadap *involuntary delisting*. Walaupun hubungan diantara keduanya memiliki bukti yang sedikit, namun *delisting* diasumsikan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kebangkrutan atau *takeovers*. Selain berbeda pada variabel dependen, perbedaan juga terletak pada variabel GCG yang digunakan, yang mana Malik *et al.* (2014) menggunakan ketujuh variabel GCG yaitu, aktivitas *shareholder*, aktivitas direksi, komite audit, ukuran direksi, independensi direksi, kepemilikan terpusat, dan *insider ownership*. Untuk menguji hubungan antara variabel-variabel terkait, digunakan analisis regresi, dengan dibantu oleh variabel *dummy* untuk variabel dependen, dimana nilai '1' untuk *delisting* dan '0' untuk perusahaan yang bertahan.

*Earnings management* kembali diteliti oleh Chen dan Tsai (2010). Penelitian ini bertujuan untuk menggolongkan tipe-tipe dan motivasi melakukan *earnings manage-*

ment, yang menggunakan analisis model *real activities manipulation* dari Dechow *et al.* (1998) dan Roychowdhury (2006) untuk menganalisisnya. Selain menggunakan data statistik dan laporan keuangan, Chen dan Tsai (2010) juga menyebarkan kuisioner kepada 650 perusahaan terpilih untuk mengumpulkan data mengenai motivasi melakukan *earnings management*.

Zeidi *et al.* (2014) meneliti hubungan antara *earnings management* dan *accounting conservatism*, yang merupakan kehati-hatian dalam meramalkan keuntungan. Keduanya diyakini dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dan berdampak pada efisiensi pasar modal serta perilaku para investor, kreditor, dan pengguna laporan keuangan secara umum. Hubungan keduanya akan dianalisis menggunakan regresi berganda, dengan *conservatism* sebagai variabel dependen dan *earnings management* sebagai variabel independen. Apabila rasio nilai buku terhadap nilai pasar dari *stockholders* kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perusahaan terjadi *conservatism*. Sementara itu, untuk mengukur *earnings management*, Zeidi *et al.* (2014) menggunakan model modifikasi Jones.

Llukani (2013) meneliti mengenai *earnings management* terhadap ukuran perusahaan. Llukani (2013) juga menyebutkan bahwa perusahaan besar yang telah diaudit oleh pihak eksternal memiliki struktur audit internal yang terkelola dengan baik dan telah memiliki reputasi yang baik di depan publik, diyakini tidak memiliki inisiatif dalam melakukan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan kecil, namun, ditambahkan juga bahwa terdapat kemungkinan perusahaan besar untuk melakukan *earnings management* jika perusahaan besar memiliki hubungan yang baik dengan auditor eksternal, manajer menggunakan otoritasnya pada audit internal sehingga dapat mengatur hasilnya, ingin mengurangi risiko politik, dan memperbesar laba fiskal untuk meningkatkan pendanaan

eksternal. Llukani (2013) juga menggunakan model modifikasi Jones untuk mendeteksi adanya *earnings management*. Sementara itu, ukuran perusahaan menggunakan pendekatan log of total aset. Hubungan diantara keduanya diuji dengan model regresi.

Penelitian oleh Inaam *et al.* (2012) membahas pengaruh kualitas audit terhadap *earnings management*. Variabel kualitas audit sebagai variabel independen terdiri dari jumlah auditor, spesialisasi industri auditor, dan masa jabatan auditor, sedangkan *earnings management* sebagai variabel dependen terbagi menjadi dua yaitu, *discretionary accrual* dan *real earnings management*. Untuk mendeteksi manajemen laba pada akun *discretionary accrual* menggunakan model modifikasi Jones. Sementara itu, metode yang digunakan untuk mengetahui manajemen laba pada *real earnings management*, menggunakan metode *real activities manipulation* oleh Roychowdhury (2006). Alat analisis untuk menguji masing-masing hipotesis ialah menggunakan regresi linear berganda.

Fatmawati (2012:56) dalam Tambunan *et al.* (2015) menyatakan bahwa indikator perusahaan bangkrut di pasar modal adalah perusahaan *delisting*, oleh karena itu, Tambunan *et al.* (2015) meneliti mengenai perusahaan subsektor rokok yang *listing* dan telah *delisting*, dengan tujuan mencari tahu apakah perusahaan-perusahaan tersebut memiliki risiko kebangkrutan dan terdapat tanda-tanda kegagalan bisnis yang mengarah pada kebangkrutan. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis kebangkrutan ialah Altman (Z-Score). Penelitian ini menggunakan masing-masing 3 sampel perusahaan untuk subsektor rokok yang *listing* dan telah *delisting*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu *earnings management* dapat dibedakan menjadi *accrual earnings management*, yaitu *earnings management* pada akun *discretionary accrual*, dan *real earnings management* (*real activities mani-*

pulation), pada akun produksi. Model modifikasi Jones digunakan untuk mengukur manajemen laba dari aktivitas *accrual*, sedangkan untuk mengetahui manajemen laba pada *real earnings management*, dapat digunakan model *real activities manipulation* oleh Dechow *et al.* (1998) dan Roychowdhury (2006). Model modifikasi Jones merupakan model yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dalam menghitung *earnings management*, akan tetapi, dalam hasil penelitian Inaam *et al.* (2012), mengungkapkan bahwa semua hipotesis dari kualitas auditor terhadap *earnings management* pada *accrual earnings management*, menghasilkan hasil yang negatif dan signifikan, namun, menemukan hasil positif dan signifikan pada *auditor size* terhadap *real earnings management*. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan *real activities manipulation* yang sebelumnya telah digunakan oleh Dechow *et al.* (1998), Roychowdhury (2006), dan Chen dan Tsai (2010).

Perusahaan yang melakukan *delisting* belum tentu perusahaan yang bangkrut, oleh karena itu, untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan bisa dikatakan bangkrut, peneliti dapat menggunakan metode Altman, Springate, atau Zmijewski, namun dari ketiga metode ini, metode Altman (*Z-score*) merupakan metode yang paling akurat dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan.

### **Pengembangan Hipotesis**

Penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian mengenai *earnings management* dalam *forced delisting* dan *voluntary delisting* ini ialah penelitian oleh Li dan Zhou (2006) serta Yudhanti dan Rachmawati (2008), namun, perbedaan yang paling signifikan ialah penelitian ini meneliti *earnings management* pada perusahaan yang telah *delisting*, bukan risiko *delisting* lagi. *Delisting* yang diteliti juga dibedakan menjadi 2, yaitu *forced* dan *voluntary*. Sementara itu, metode yang digunakan dalam meng-

hitung *earnings management* bukan berdasarkan model modifikasi Jones, tetapi menggunakan *real activities manipulation*. Hal ini disebabkan semakin sering praktik *earnings management* pada *discretionary accrual*, menyebabkan praktik ini semakin mudah dideteksi (Graham *et al.* 2005 dalam Chen dan Tsai 2010), oleh karena itu, Roychowdhury (2006) serta Eldenburg *et al.* (2008) dalam Chen dan Tsai (2010) menyatakan bahwa banyak perusahaan yang meninggalkan *earnings management* dengan *discretionary accrual* dan beralih kepada aktivitas operasional (Shchipper 1989 dalam Chen dan Tsai 2010).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai tingkat *earnings management* pada perusahaan *forced delisting* dan *voluntary delisting*, akan tetapi, diprediksi bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat *earnings management* pada perusahaan *forced delisting* dan *voluntary delisting*, yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam melakukan manajemen laba. Hasil penelitian Li dan Zhou (2006) menemukan bahwa *earnings management* saat IPO berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap *involuntary delisting*, yang berarti perusahaan yang memanipulasi labanya untuk kepentingan IPO akan menyebabkan *forced delisting*. Perusahaan *forced delisting* memiliki kinerja keuangan yang lebih buruk dibandingkan perusahaan *voluntary delisting*, oleh karena itu, agar tetap bertahan di BEI dan mendapatkan kembali kepercayaan investor, maka perusahaan *forced delisting* akan cenderung melakukan *earnings management* untuk memperbesar laba perusahaan. Sementara itu, dengan kinerja keuangan yang cukup baik, perusahaan *voluntary delisting* akan cenderung melakukan *earnings management* laba untuk menurunkan laba perusahaan, dengan motivasi altruistik seperti hasil penelitian Chen dan Tsai (2010), yaitu bertujuan untuk mengurangi beban pajak, sehingga, penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut.

$H_a$  : Terdapat perbedaan rata-rata *earnings management* dengan menggunakan proksi *real activities manipulation* pada perusahaan *forced delisting* dan *voluntary delisting*. ( $H_a: \mu_1 \neq \mu_2$ ).

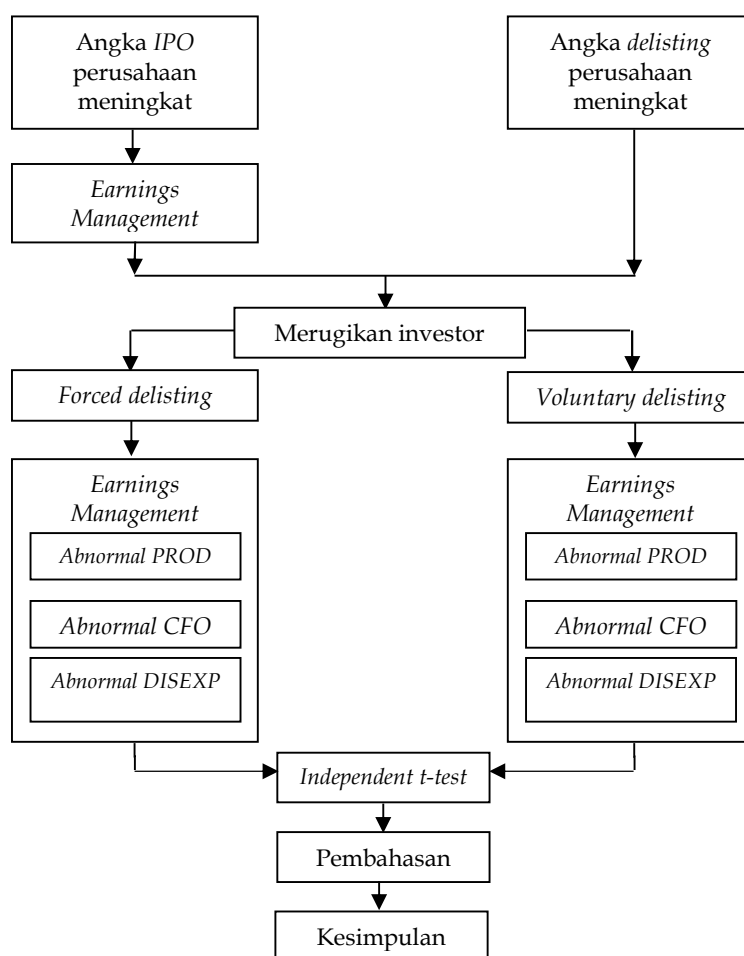
$\mu_1$  merupakan rata-rata *earnings management* pada perusahaan *forced delisting*.  $\mu_2$  merupakan rata-rata *earnings management* pada perusahaan *voluntary delisting*.

Berikut merupakan alur rerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti pada Gambar 4.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kompa-

ratif, yang menurut Kaunang (2013) bersifat membandingkan. Sumber data dalam penelitian ini termasuk sumber data sekunder, berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang didokumentasikan dari *data base* Pojok Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian berjumlah 52 perusahaan *delisting* dari BEI pada periode 2005-awal 2015. Kemudian dari populasi tersebut dipilih sejumlah sampel dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan *delisting* memiliki laporan keuangan 3 tahun berturut-turut sebelum *delisting* secara lengkap. Hal ini disebabkan apabila lebih dari 3 tahun laporan keuangan secara berturut-turut sebelum perusahaan *delisting*, sampel yang memenuhi kriteria *purposive sampling* akan sedikit.



**Gambar 4**  
Alur Rerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: data diolah (2015)

Berdasarkan hasil purposive sampling ini, didapatkan 14 perusahaan pada perusahaan forced delisting dan 14 perusahaan pada voluntary delisting.

Eldenburg *et al.* (2008) dalam Chen dan Tsai (2010) menyatakan bahwa banyak perusahaan yang meninggalkan *earnings management* dengan *discretionary accrual*, dan beralih kepada aktivitas operasional (Schipper, 1989 dalam Chen dan Tsai, 2010), oleh karena itu, dalam penelitian ini, *earnings management* akan dihitung dari aktivitas operasi. Model ini pertama kali dikemukakan oleh Dechow *et al.* (1998), yang selanjutnya digunakan oleh Roychowdhury (2006) serta Chen dan Tsai (2010), yang oleh Roychowdhury (2006) metode ini disebut dengan *real activities manipulation*. Terdapat 3 variabel didalam model ini, yaitu *abnormal CFO*, *abnormal PROD*, dan *abnormal DISEXP*, dengan definisi operasional sebagai berikut;

Pertama, *abnormal CFO* merupakan arus kas tidak normal dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas dan dihitung dengan:

$$CFO_t \text{ aktual} - CFO \text{ normal} \quad (1)$$

CFO aktual dapat diketahui dari laporan arus kas operasi perusahaan, sementara CFO normal diketahui dari persamaan regresi di bawah ini.

$$CFO_t/A_{t-1} = a_0 + a_1(1/A_{t-1}) + \beta_1(S_t/A_{t-1}) + \beta_2(\Delta S_t/A_{t-1}) + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

keterangan:

$$\begin{aligned} A_t &= \text{total aset pada akhir periode } t \\ S_t &= \text{penjualan selama periode } t \\ \Delta S_t &= S_t - S_{t-1} \\ a, \beta &= \text{parameter regresi} \\ \varepsilon &= \text{error} \end{aligned}$$

Kedua, *abnormal PROD* merupakan biaya produksi tidak normal dan dihitung dari:  $PROD_t$  aktual- $PROD$  normal (3) Biaya produksi didefinisikan sebagai jumlah dari COGS (*Cost of Good Sold*) dan perubahan inventori selama sebuah periode. Definisi ini juga berlaku bagi perusahaan non manufaktur, meskipun hal ini tidak berlaku secara harafiah pada perusahaan tersebut (Roychowdhury, 2006).  $PROD$  normal dapat diketahui dari persamaan regresi di bawah ini.

$$PROD_t/A_{t-1} = a_0 + a_1(1/A_{t-1}) + \beta_1(S_t/A_{t-1}) + \beta_2(\Delta S_t/A_{t-1}) + \beta_3(\Delta S_{t-1}/A_{t-1}) + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

keterangan:

$$\begin{aligned} A_t &= \text{total aset pada akhir periode } t \\ S_t &= \text{penjualan selama periode } t \\ \Delta S_t &= S_t - S_{t-1} \\ a, \beta &= \text{parameter regresi} \\ \varepsilon &= \text{error} \end{aligned}$$

Ketiga, *abnormal DISEXP* merupakan beban *discretionary* tidak normal dan dihitung berdasarkan:  $DISEXP_t$  aktual- $DISEXP$  normal (5)

$DISEXP$  ialah jumlah dari beban iklan, beban R dan D, dan beban penjualan, administrasi dan umum.  $DISEXP$  normal dapat diketahui dengan persamaan regresi berikut.

$$DISEXP_t/A_{t-1} = a_0 + a_1(1/A_{t-1}) + \beta(S_{t-1}/A_{t-1}) + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

keterangan:

$$\begin{aligned} A_t &= \text{total aset pada akhir periode } t \\ S_t &= \text{penjualan selama periode } t \\ a, \beta &= \text{parameter regresi} \\ \varepsilon &= \text{error} \end{aligned}$$

Berdasarkan Pratiwi dan Meiranto (2013), untuk mendapatkan proksi keseluruhan dari ketiga variabel *real activities manipulation* ini, maka ketiga variabel akan dijumlahkan, namun sebelum itu, variabel *abnormal PROD* perlu dikalikan dengan -1 (minus satu) untuk menyamakan arah. Berikut merupakan proksi yang dimaksud.

$$EMTRAM = \text{abnormal CFO} + \text{abnormal DISEXP} + (\text{abnormal PROD} \times (-1)) \quad (7)$$

$EMTRAM = \text{Earnings Management through Real Activities Manipulation}$

Hipotesis penelitian ini diuji dengan *independent t-test*, yang menurut Nisfiannoor (2009) bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok, yang dalam penelitian ini 2 kelompok tersebut merupakan perusahaan *forced delisting* dan *voluntary delisting*, dengan jenis data nominal dimana '1' untuk perusahaan *forced delisting* dan '2' untuk perusahaan *voluntary delisting*.

Apabila hasil perhitungan statistik menunjukkan  $\text{Sig. (2-tailed)} < \alpha (0,05)$ , maka dapat diambil keputusan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti terdapat

perbedaan rata-rata *earnings management* pada perusahaan *forced* dan *voluntary delisting* ( $\mu_1 \neq \mu_2$ ), akan tetapi, jika *Sig. (2-tailed)* >  $\alpha$  (0,05), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata *earnings management* pada perusahaan *forced* dan *voluntary delisting* ( $\mu_1 = \mu_2$ ).

Sebelum dilakukan uji *independent t-test*, diperlukan uji normalitas dan homogenitas. Tujuan dilakukannya uji normalitas ialah untuk mengecek apakah data yang didapatkan mengikuti atau mendekati hukum sebaran normal baku dari Gauss, yaitu menyerupai bentuk bel atau lonceng (Nisfianoor, 2009). Untuk menguji normalitas, penelitian akan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan kriteria apabila nilai signifikansi ( $p$ ) <  $\alpha$  (0,05), maka data tidak normal, namun, jika nilai signifikansi ( $p$ ) >  $\alpha$  (0,05), maka data dapat dikatakan normal. Sementara itu, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians antar kelompok yang diuji berbeda atau tidak (heterogen atau homogen), karena data yang diharapkan adalah homogen (Nisfianoor, 2009). Uji homogenitas menggunakan uji *Levene*, dimana apabila signifikansi ( $p$ ) lebih besar dari  $\alpha$  (0,05), maka data penelitian dapat dikatakan homogen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 berikut merupakan hasil statistik deskriptif penelitian ini. Berdasarkan Tabel 1 rata-rata (*mean*) *earnings management* pada perusahaan *forced delisting* dan *voluntary delisting* menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini dapat terjadi karena metode yang digunakan dalam mendeteksi manajemen laba ialah menjumlahkan abnormal CFO, abnormal PROD, dan abnormal

DISEXP. Dari ketiga variabel tersebut, CFO dan PROD berperan dalam menghasilkan rata-rata negatif dari manajemen laba, yang dianalisis sebagai dampak akun CFO pada laporan keuangan perusahaan *forced* dan *voluntary* menunjukkan angka negatif, yang berarti sebagian perusahaan *delisting* menggunakan kasnya untuk aktivitas operasi dan bukan mendapatkan kas dari aktivitas operasi. Sementara untuk variabel PROD, yang didalamnya terdapat penjualan, rata-rata perusahaan *forced delisting* mengalami penurunan penjualan dari tahun ke tahun yang tidak dapat mengimbangi harga (beban) pokok penjualan.

Sebelum dilakukan uji hipotesis, berupa uji *independent t-test*, terdapat 2 uji yang harus dilakukan untuk memenuhi kriteria untuk dapat melakukan uji hipotesis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov*.

Hasil uji normalitas pada Tabel 2 menunjukkan *Sig. (2-tailed)* lebih besar dari  $\alpha$  (0,22 > 0,05), sehingga dapat diambil keputusan bahwa data telah terdistribusi secara normal.

Selanjutnya, asumsi kedua yang harus dipenuhi ialah data antar kelompok memiliki varians yang sama, yang dapat diketahui melalui uji *Levene*. Berikut merupakan hasil uji *Levene*.

Hasil uji homogenitas pada Tabel 2 menunjukkan signifikansi sebesar 0,092, yaitu lebih besar dari  $\alpha$  (0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa data antar kelompok memiliki varians yang sama. Baik uji normalitas dan homogenitas menunjukkan hasil yang signifikan, maka uji *independent t-test* dapat dilakukan.

**Tabel 1**  
Statistik Deskriptif

	<i>Delisting</i>	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>
<i>Earnings_Management</i>	<i>Forced</i>	28	-,164	1,242	,234
	<i>Voluntary</i>	28	-,580	1,569	,296

Sumber: data diolah (2015)



**Tabel 2**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		<i>Levene's Test for Equality of Variances</i>	
		<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Earnings_Management</i>	<i>Equal variances assumed</i>	2,943	,092
	<i>Equal variances not assumed</i>		

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

Sumber: data diolah (2015)

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Levene**

			<i>Earnings_Management</i>
<b>N</b>			56
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>		-.372302
	<i>Std. Deviation</i>		1,417915
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>		.140
	<i>Positive</i>		.086
	<i>Negative</i>		-.140
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>			1,050
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>			.220

Sumber: data diolah (2015)

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Independent T-Test**

		<i>t-test for Equality of Means</i>				
		<i>t</i>	<i>df</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	<i>95% Confidence Interval of the Difference</i>	
					<i>Lower</i>	<i>Upper</i>
<i>E_M</i>	<i>Equal variances assumed</i>	1,099	54	,277	-,342	1,173
	<i>Equal variances not assumed</i>	1,099	51,292	,277	-,343	1,174

Sumber: data diolah (2015)

Tabel 4 merupakan hasil uji *independent t-test*.

Uji homogenitas dengan menggunakan uji *Levene* pada table 2 menunjukkan hasil yang signifikan, maka dalam melihat signifikansi uji *independent t-test* akan

digunakan *equal variances assumed*, dimana *Sig. (2-tailed)* menunjukkan angka sebesar 0,277, yaitu lebih besar dari  $\alpha$  (0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga  $\mu_1 = \mu_2$ , yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata *earnings*

*management* pada perusahaan *forced delisting* dan *voluntary delisting* dengan menggunakan proksi *real activities manipulation*. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu yang terkait dengan *delisting* belum ditemukan yang membagi *delisting* menjadi *forced* dan *voluntary delisting*.

Seperti yang telah dijelaskan pada pendahuluan, penelitian ini membagi *delisting* menjadi 2 jenis tersebut. Berdasarkan *independent-t test* yang telah dilakukan, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata *earnings management* dalam *forced* dan *voluntary delisting*. Artinya, apabila perusahaan *forced delisting* melakukan *earnings management* untuk menaikkan laba, maka perusahaan *voluntary delisting* juga akan menaikkan laba. Demikian pula apabila perusahaan *forced delisting* memperkecil atau meratakan labanya, maka perusahaan yang melakukan *voluntary delisting* akan melakukan hal yang sama, akan tetapi, hasil ini berbeda dengan hipotesis awal, yaitu perusahaan *forced delisting* melakukan *earnings management* bertujuan untuk menaikkan laba, yang disebabkan kinerja keuangan semakin memburuk tetapi masih ingin bertahan di bursa. Sebaliknya, perusahaan *voluntary delisting* diduga melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba. Hal ini disebabkan karena kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik akan mendorong manajer melakukan manipulasi untuk menghindari pajak atau pembagian dividen dan bonus karyawan.

Scott (2003) dalam Rahmawati *et al.* (2010) mengungkapkan bahwa terdapat 4 bentuk praktik *earnings management*, yaitu *taking a bath*, *income minimization*, *income maximization*, dan *income smoothing*. Akan tetapi, dibandingkan dengan ketiga bentuk *earnings management* lainnya, hasil pada Tabel 1. menunjukkan kesamaan praktik *earnings management* pada perusahaan *forced delisting* dan *voluntary delisting* ialah lebih mengarah pada praktik *income minimization* atau manipulasi untuk menurunkan atau mengecilkan laba. Hal ini sejalan dengan

pernyataan Roychowdhury (2006) bahwa manipulasi pada penjualan akan menyebabkan arus kas kegiatan operasi (CFO) periode sekarang menurun dibandingkan level penjualan normal. Penjualan yang menurun berdampak pada menurunnya penerimaan kas dari pelanggan. Kemudian, apabila biaya untuk membayar kepada pemasok dan gaji karyawan serta beban bunga lebih besar daripada penerimaan kas dari pelanggan, akan menyebabkan arus kas operasi perusahaan menjadi kecil. Hal inilah yang terjadi pada akun CFO perusahaan *forced* dan *voluntary delisting*.

Roychowdhury (2006) juga menyebutkan bahwa produksi yang meningkat akan menyebabkan biaya tetap (*fixed cost*) per unit produk lebih rendah dan harga (beban) pokok penjualan (HPP) menurun, sehingga laba operasi meningkat, namun yang terjadi pada perusahaan *delisting* ialah sebaliknya. HPP, yang termasuk dalam variabel PROD, rata-rata mengalami kenaikan. Sementara penjelasan sebelumnya pada CFO menyatakan bahwa rata-rata penjualan perusahaan *delisting* mengalami penurunan, sehingga, hal inilah yang menyebabkan laba operasi perusahaan *delisting* mengalami penurunan.

Variabel ketiga dari *earnings management* melalui *real activities manipulation* ialah DISEXP atau beban diskrisioner. Roychowdhury (2006) menjelaskan bahwa perusahaan yang menurunkan atau mengurangi biaya diskrisioner akan meningkatkan laba periode berjalan, akan tetapi yang terjadi ialah perusahaan *delisting* memiliki beban diskrisioner yang meningkat. Beban diskrisioner dalam laporan laba/rugi perusahaan merupakan beban usaha, seperti beban gaji, iklan, serta administrasi dan umum, sehingga, apabila beban diskrisioner mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan laba pada periode berjalan menurun.

Kembali pada pembahasan utama, hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata *earnings management* dalam perusahaan *forced* dan *voluntary delisting*, di-

mana persamaan manipulasi laba yang terjadi ialah untuk menurunkan atau mengecilkan laba. Hasil ini sebenarnya cukup mengejutkan, karena perusahaan *forced delisting* yang memiliki kinerja keuangan yang sudah memburuk tetapi masih melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba, namun, masih terdapat kemungkinan hal ini terjadi. Terdapat 3 alasan utama yang dapat menjelaskan hal ini, yaitu sebagai berikut.

Pertama, restrukturisasi utang. Ketika kinerja keuangan perusahaan kurang baik, perusahaan tentu akan kesulitan dalam membayar bunga dan pokok pada jangka waktu yang telah ditetapkan kepada bank atau pihak lainnya, sehingga perusahaan akan mengajukan permohonan restrukturisasi utang yang akan lebih meringankan beban perusahaan, namun, permohonan restrukturisasi utang tidak hanya terjadi pada perusahaan dengan kinerja buruk, perusahaan *voluntary delisting*, yang memiliki kinerja keuangan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan *forced delisting* juga akan mengajukan permohonan untuk merestrukturisasi utang.

Kedua, penghematan pembayaran pajak. Pembayaran pajak oleh perusahaan bergantung pada laba atau rugi perusahaan. Semakin besar pencatatan laba perusahaan, semakin besar pula pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, akan tetapi, apabila laba perusahaan menurun, maka pajak yang wajib dibayarkan juga akan menurun. Berdasarkan hasil penelitian oleh Chen dan Tsai (2010), motivasi melakukan *earnings management* dengan tujuan ini penghematan pembayaran pajak termasuk motivasi altruistik.

Ketiga, menghindari pembayaran dividen dan bonus karyawan. Sebagai perusahaan terbuka, merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham ketika perusahaan memiliki keuntungan, akan tetapi, hal ini tidak berlaku saat perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar, yang dapat terjadi ketika perusahaan melakukan mani-

pulasi untuk menurunkan laba. Sama halnya seperti pembagian dividen, apabila laba perusahaan menurun, maka karyawan tidak dapat menuntut haknya untuk mendapatkan bonus.

Terdapat 2 perspektif mengenai praktik *earnings management*, yaitu dari *efficient contracting perspective* dan *oportunistic behavior* (Scott, 2009 dalam Kesatria, 2013). Dari kedua perspektif ini, Kesatria (2013) menyatakan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia cenderung melakukan *earnings management* dari sisi *oportunistic*, yaitu manajemen laba dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan perusahaan (Zakaria, 2014). Kepentingan sendiri ini terkait dengan praktik *earnings management* untuk menaikkan laba perusahaan yang dilakukan manajer demi kepentingan pimpinan, seperti untuk menghindari adanya pergantian pimpinan, namun, apabila yang terjadi sebaliknya, yaitu ketika *earnings management* dilakukan untuk menurunkan laba untuk kepentingan perusahaan, tanpa mempertimbangkan kerugian pemegang saham publik seperti yang terjadi pada perusahaan *forced* maupun *voluntary delisting* dalam penelitian ini, maka manajemen laba dilakukan lebih kepada *efficient contracting perspective*.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Hasil penelitian menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata *earnings management* pada perusahaan *forced* dan *voluntary delisting*, yang mana perusahaan-perusahaan *delisting* melakukan *earnings management* untuk tujuan yang sama, yaitu menurunkan laba perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan hendak merestrukturisasi utang, menghemat pembayaran pajak, dan menghindari pembagian dividen serta bonus karyawan. Berdasarkan ketiga alasan ini, dapat dikatakan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan *delisting* sebenarnya dilakukan untuk ke-

pentingan perusahaan (*efficient contracting perspective*).

### Saran

*Earnings management* dalam penelitian ini diketahui dengan menggunakan metode *real activities manipulation* (aktivitas riil). Sementara itu, manajemen laba bukan hanya terjadi aktivitas riil, oleh karenanya, saran bagi penelitian selanjutnya untuk membandingkan manajemen laba dari *real activities manipulation*, *descretionary accrual*, dan *classification shifting*, untuk mengetahui kecenderungan perusahaan-perusahaan *delisting* di Indonesia lebih mengarah kemana. Kemudian apabila memungkinkan, sebaiknya peneliti selanjutnya menambah variabel GCG (*Good Corporate Governance*) pada masing-masing manajemen laba tersebut untuk melihat apakah dengan adanya GCG, praktik manajemen laba dapat dikontrol oleh perusahaan. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti mengenai motivasi melakukan *earnings management* dalam perusahaan *delisting* untuk semakin menguatkan penelitian ini. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah tahun laporan tahunan perusahaan, setidaknya 5 tahun sebelum *delisting*. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian lebih kuat lagi. Bagi pengguna laporan keuangan, khususnya investor, disarankan untuk berhati-hati dalam menempatkan investasinya karena semua perusahaan tentunya memiliki risiko *delisting* dengan bentuk manajemen laba yang sama. Dan bagi pemerintah, pemerintah perlu menyempurnakan lagi peraturan terkait manajemen laba melalui aktivitas riil, karena bukan hanya investor yang mengalami kerugian akibat manipulasi laba ini, tetapi juga pemerintah juga akan mendapat kerugian akibat tidak dibayarnya pajak yang sebenarnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada data penelitian yang hanya menggunakan tiga tahun laporan keuangan sebelum *delisting*, sehingga bentuk manajemen laba yang lain, seperti *taking a bath* dan *income*

*smoothing*, kurang dapat terlihat. Keterbatasan penelitian yang kedua ialah 2 alasan, yaitu restrukturisasi utang dan pembagian dividen dan bonus, sebagai alasan yang menunjukkan tidak adanya perbedaan rata-rata manajemen laba pada perusahaan *delisting*, belum dapat sepenuhnya dikatakan benar. Dua alasan tersebut merupakan yang paling memungkinkan mendasari perusahaan untuk melakukan *earnings management* dalam mengecilkan atau menurunkan laba perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian selanjutnya untuk dapat membuktikan kedua alasan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Benny, L. dan Y. Hutagaol. 2013. Empirical Investigation of Determinant Factors of Company Delisting: Evidence From Indonesia. *Journal of Applied Finance and Accounting* 6(1): 25-66.
- Chen, M. dan Y. C. Tsai. 2010. Earnings Management Types and Motivation: A Study in Taiwan. *Social Behavior and Personality* 38(7): 955-962.
- Cosseboom, L. 2014. 3 Cara Indonesia Menjadi Lebih Menarik Bagi Investor Asing. <http://id.techinasia.com/3-cara-indonesia-menarik-investor-asing>. Diakses tanggal 15 Maret 2015.
- Dechow, P., S. P. Kothari, dan R. L. Watts. 1998. The Relation Between Earnings and Cash Flows. *Journal of Accounting and Economics* 25: 133-168.
- Indonesia Stock Exchange. 2015. *IDX Fact Book 2006-2015*. IDX. Jakarta.
- Inaam, Z., H. Khmoussi, dan Z. Fatma. 2012. Audit Quality and Earnings Management in the Tunisian Context. *International Journal of Accounting and Financial Reporting* 2(2): 17-33.
- Iraya, C., M. Mwangi, dan G. W. Muchoki. 2015. The Effect of Corporate Governance Practices on Earnings Management of Companies Listed at The Nairobi Securities Exchange. *European Scientific Journal* 11(1): 169-178.
- Kaunang, C. 2013. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Meng-

- gunakan Rasio Profitabilitas dan Economic Value Added pada Perusahaan yang Tergabung dalam LQ 45. *Jurnal EMBA* 1(3): 648-657.
- Kesatria, H. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Good Corporate Governance terhadap Jenis Earnings Management pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2(2): 1-15.
- Kristiantari, I. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Penawaran Saham Perdana di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 2(2): 785-811.
- Li, J. dan J. Zhou. 2006. Earnings Management and Delisting Risk of Initial Public Offerings. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=641021](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=641021). Diakses tanggal 14 Maret 2015.
- Llukani, T. 2013. Earnings Management and Firm Size: An Empirical Analyze in Albanian Market. *European Scientific Journal* 9(16): 135-143.
- Malik, M., X. Xinping, dan R. Shabb. 2014. Corporate Governance and Involuntary Delisting: Empirical Evidence. *International Journal of Economics and Finance* 6(6): 247-256.
- Nafisatin, M., Suhadak, dan R. Hidayat. 2014. Implementasi Penggunaan Metode Altman (Z-Score) untuk Menganalisis Estimasi Kebangkrutan (Studi pada PT Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 10(1): 1-8.
- Nan, L. 2008. The Agency Problems of Hedging and Earnings Management. *Contemporary Accounting Research* 25(3): 859-889.
- Nisfiannoor, M. 2009. *Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Pratiwi, Y. dan W. Meiranto. 2013. Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Earnings Management Melalui Manipulasi Aktivitas Rii. *Diponegoro Journal of Accounting* 2(3): 1-15.
- Rahayu, D. 2005. Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial dan Instiusional pada Struktur Modal Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing* 1: 181-197.
- Rahmawati, A. R. Suprpti, dan S. Seventi. 2010. Model Strategi Manajemen Laba pada Perusahaan Publik di Bursa Efek Indonesia: Suatu Pemeriksaan Pergeseran Klasifikasi Serta Dampaknya terhadap Kinerja Saham, Pemilihan Metoda Akuntansi, dan Pengaturan Waktu Transaksi. *Jurnal Tarumanegara* 14(1): 11-24.
- Roychowdhury, S. 2006. Earnings Management Through Real Activities Manipulation. *Journal of Accounting and Economics* 42: 335-370.
- Sanusi, Z., N. F. Selahudin, dan N. B. Zakaria. 2014. Remodelling the Earnings Management with The Appearance of Leverage, Financial Distress and Free Cash Flow: Malaysia and Thailand Evidences. *Journal of Applied Sciences* 14(21): 2644-2661.
- Stice, E., J. D. Stice, dan K. F. Skousen. 2009. *Akuntansi Keuangan Buku 1*. 16<sup>th</sup> ed. Salemba Empat. Jakarta.
- Sunaryo. 2015. Evaluasi Tingkat Keakuratan Antara Model Springate dengan Model Altman dalam Memprediksi Delisting Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Business Strategy and Execution* 7(2): 155-176.
- Tambunan, R., Dwiatmanto, dan M. G. W. Endang. 2015. Analisis Prediksi Kebangkrutan Perusahaan dengan Menggunakan Metode Altman (Z-Score) (Studi pada Subsektor Rokok yang Listing dan Perusahaan Delisting di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 2(1): 1-11.
- Yudhanti, C. dan D. Rachmawati. 2008. Apakah Earnings Management Mengakibatkan Risiko Delisting pada Perusahaan IPO? *Jurnal Akuntansi Tarumanegara* 12(3): 260-276.

Zeidi, A., Z. Taheri, dan O. G. Farahabadi.  
2014. A Study on the Relationship between Accounting Conservatism and Earnings Management in Teheran Stock Exchange Listed Companies. *International Journal of Scientific Research in Knowledge* 2(2): 105-115.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada para Mitra Bebestari (*expert board*) di bawah ini yang telah terlibat aktif dalam penelaahan artikel-artikel pada Jurnal Ekuitas Vol. 19 No. 1, Maret 2015, Vol. 19 No. 2 Juni 2015, Vol. 19 No. 3 September 2015 dan Vol. 19 No. 4 Desember 2015.

Agung Budi Sulistiyo	(Univ. Jember)
Budiyanto	(STIESIA Surabaya)
Bambang Agus Pramuka	(Univ. Jendral Sudirman Purwokerto)
Hastin Umi Anisah	(Univ. Lambung Mangkurat)
Hening Widi Oetomo	(STIESIA Surabaya)
Hedy Desiree Rumambi	(Poltek Negeri Menado)
Istifadah	(Univ. Jember)
Lindrianasari	(Univ. Lampung)
Muafi	(UPN Yogyakarta)
Putu Anom Mahadwartha	(UBAYA)
Sri Iswati	(Univ. Airlangga)
Siti Aisyah	(Univ. Brawijaya)
Tatang Aribumanti	(Univ. Jember)
Wiwiek Rabiatal Adawiah	(Univ. Jendral Sudirman Purwokerto)